



20 LAPORAN KINERJA

25 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan tepat waktu. Laporan kinerja tahun 2025 merupakan laporan kinerja pada awal periode renstra 2025–2029. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin tahun 2025. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin pada tahun 2025 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Secara umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin pada tahun 2025.

Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan tinggi serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin pada tahun 2025.

Banjarmasin, Januari 2026



Dr. Drs. Muhammad Akbar, M.Si.

Kepala LLDIKTI Wilayah XI



Daftar isi



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I PENDAHULUAN	1
<i>a. Gambaran Umum</i>	<i>2</i>
<i>b. Dasar Hukum</i>	<i>4</i>
<i>c. Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi</i>	<i>5</i>
<i>d. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi</i>	<i>7</i>
II PERENCANAAN KINERJA	9
<i>a. Visi dan Misi</i>	<i>10</i>
<i>b. Rencana Kinerja Jangka Menengah</i>	<i>11</i>
<i>c. Tujuan Strategis</i>	<i>14</i>
<i>d. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir</i>	<i>16</i>
<i>e. Program Prioritas</i>	<i>19</i>
III AKUNTABILITAS KINERJA	20
<i>a. Capaian Kinerja</i>	<i>21</i>
<i>b. Realisasi Anggaran</i>	<i>104</i>
1. <i>Capaian Anggaran</i>	<i>104</i>
2. <i>Efisiensi Anggaran</i>	<i>106</i>
<i>c. Inovasi, Penghargaan, Program Crosscutting/Collaborative</i>	<i>108</i>
1. <i>Inovasi.....</i>	<i>108</i>
2. <i>Penghargaan</i>	<i>111</i>
3. <i>Program Crosscutting/Collaborative</i>	<i>114</i>
IV PENUTUP	118
LAMPIRAN	120

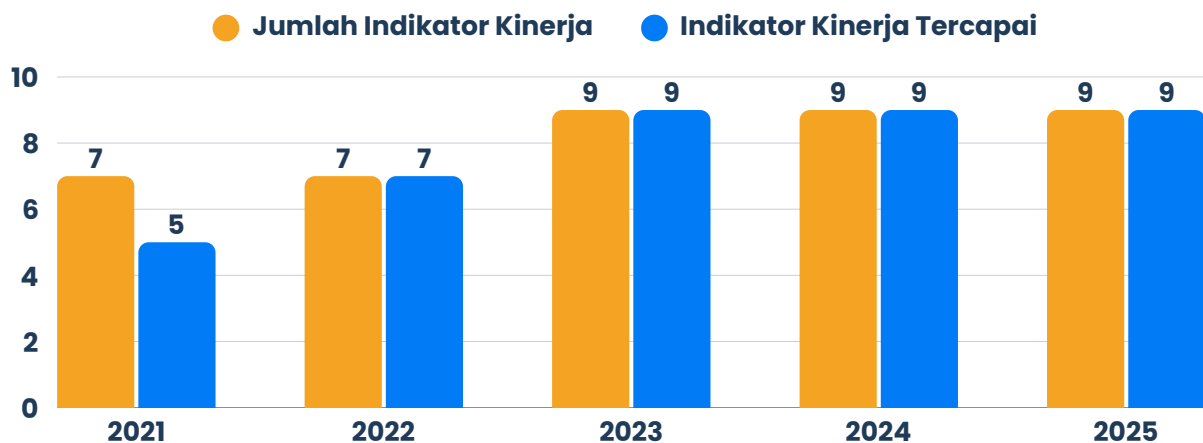


Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian 4 sasaran kinerja dengan 7 indikator kinerja utama dan 2 indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.



Capaian Kinerja 2021–2025



Jumlah indikator kinerja tahun 2023 bertambah karena perubahan Kepmendikbud 3/M/2021 menjadi Kepmendikbudristek 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja pada PTN dan LLDIKTI.

Penyerapan Anggaran Tahun 2025



Penyerapan Anggaran Tahun 2021 – 2025

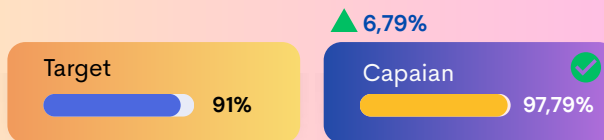
TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2021	100.225.118.000	97.539.493.482	97,31%
2022	109.935.877.000	101.059.784.848	91,93%
2023	109.061.336.000	105.099.383.988	96,37%
2024	124.238.987.000	120.419.246.322	96,93%
2025	151.744.333.000	147.158.438.967	96,98%

Capaian Kinerja

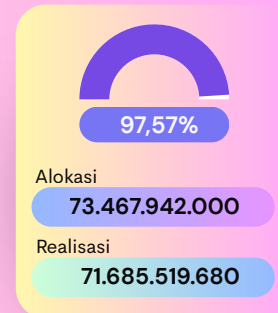
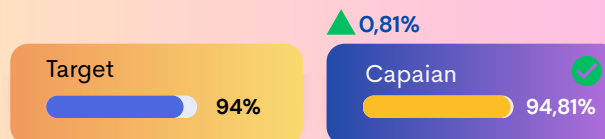
Realisasi Anggaran

**[S 1.0]
Meningkatnya
kualitas layanan
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
(LLDIKTI)**

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.

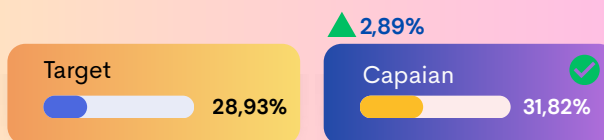


[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.

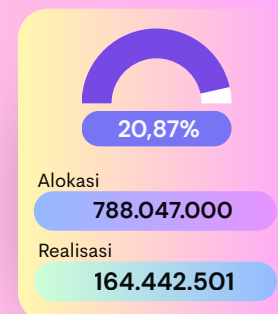
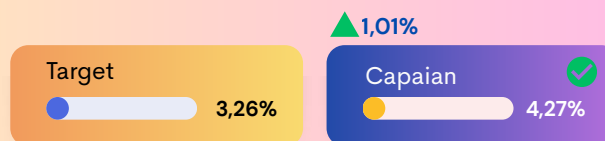


[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

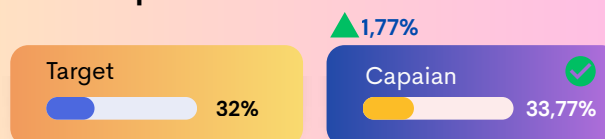
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.



[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.



[IKU 2.3] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi.

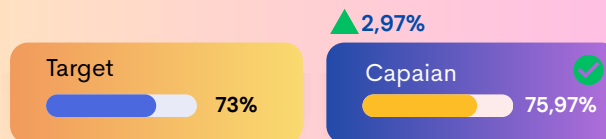


Capaian Kinerja

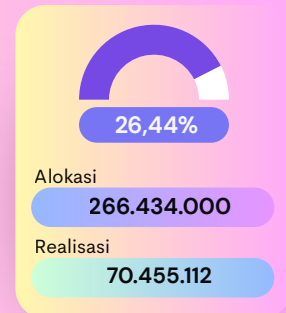
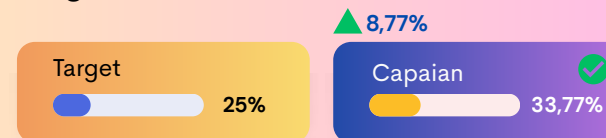
Realisasi Anggaran

[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.



[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

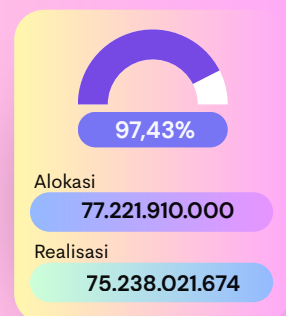


[SK 4.0]
**Meningkatnya tata
kelola LLDIKTI**

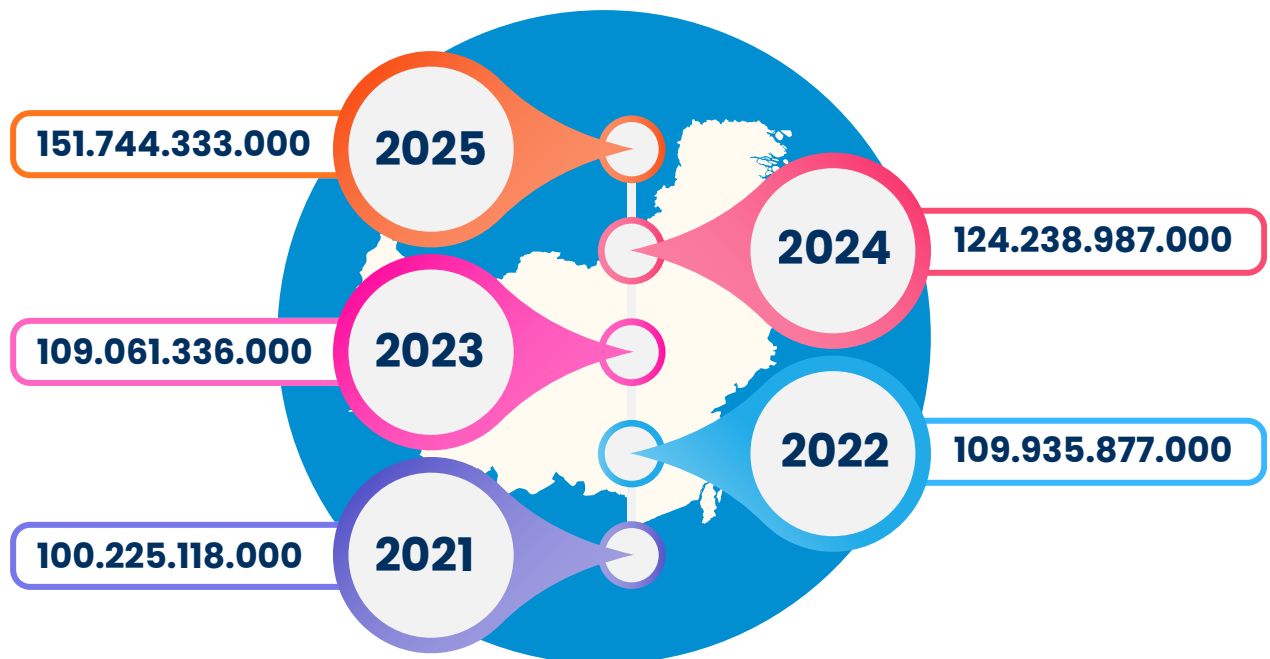
[IKK 4.1] Predikat SAKIP



[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L



Tren Anggaran Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2021 hingga 2025 rerata mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target output program pada LLDIKTI Wilayah XI. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dan 2025 dengan analisis sebagai berikut :

2023	2024	Kenaikan	
109.061.336.000	124.238.987.000	15.177.651.000	13,92%

Kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 13,92% pada tahun 2024 karena bertambahnya jumlah dosen PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar.

2024	2025	Kenaikan	
124.238.987.000	151.744.333.000	27.505.346.000	22,14%

Kenaikan anggaran pada tahun 2025 sebesar 22,14% dari tahun 2024 karena bertambahnya jumlah dosen PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, serta untuk memenuhi anggaran tunjangan kinerja pegawai yang menjadi beban DIPA LLDIKTI Wilayah XI dan tunjangan kinerja dosen PNS yang merupakan kebijakan baru pada tahun 2025.

Kendala / Permasalahan

► Kepuasan Pengguna Layanan

Tingginya ekspektasi pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XI

► PTS Terakreditasi

Keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi Swasta dalam pemenuhan syarat akreditasi prodi dan perguruan tinggi

► Kampus Berdampak

Keterbatasan sumber daya pada Perguruan Tinggi Swasta dalam mengejar target Kampus Berdampak

► Pencegahan Kekerasan pada Perguruan Tinggi

Perubahan kebijakan dari PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) menjadi PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi)

► Akuntabilitas Kinerja

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Peraturan tentang Indikator Kinerja Utama LLDIKTI yang sesuai dengan kebijakan kampus berdampak belum ditetapkan

Langkah Antisipasi dan Strategi

► Kepuasan Pengguna Layanan

Melaksanakan forum konsultasi publik berkala dan evaluasi terhadap standar pelayanan untuk disesuaikan dengan prosedur layanan yang terbaru

► PTS Terakreditasi

Melakukan kegiatan-kegiatan fasilitasi peningkatan mutu akreditasi Perguruan Tinggi Swasta dan Program Studi

► Kampus Berdampak

Selain menjadi pengawas secara administratif, LLDIKTI Wilayah XI juga menjadi fasilitator dan akselerator bagi Perguruan Tinggi Swasta dalam implementasi Kampus Berdampak

► Pencegahan Kekerasan pada Perguruan Tinggi

Melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

► Akuntabilitas Kinerja

Melaksanakan pembahasan terkait usulan rencana Indikator Kinerja Utama dengan seluruh LLDIKTI



1

PENDAHULUAN

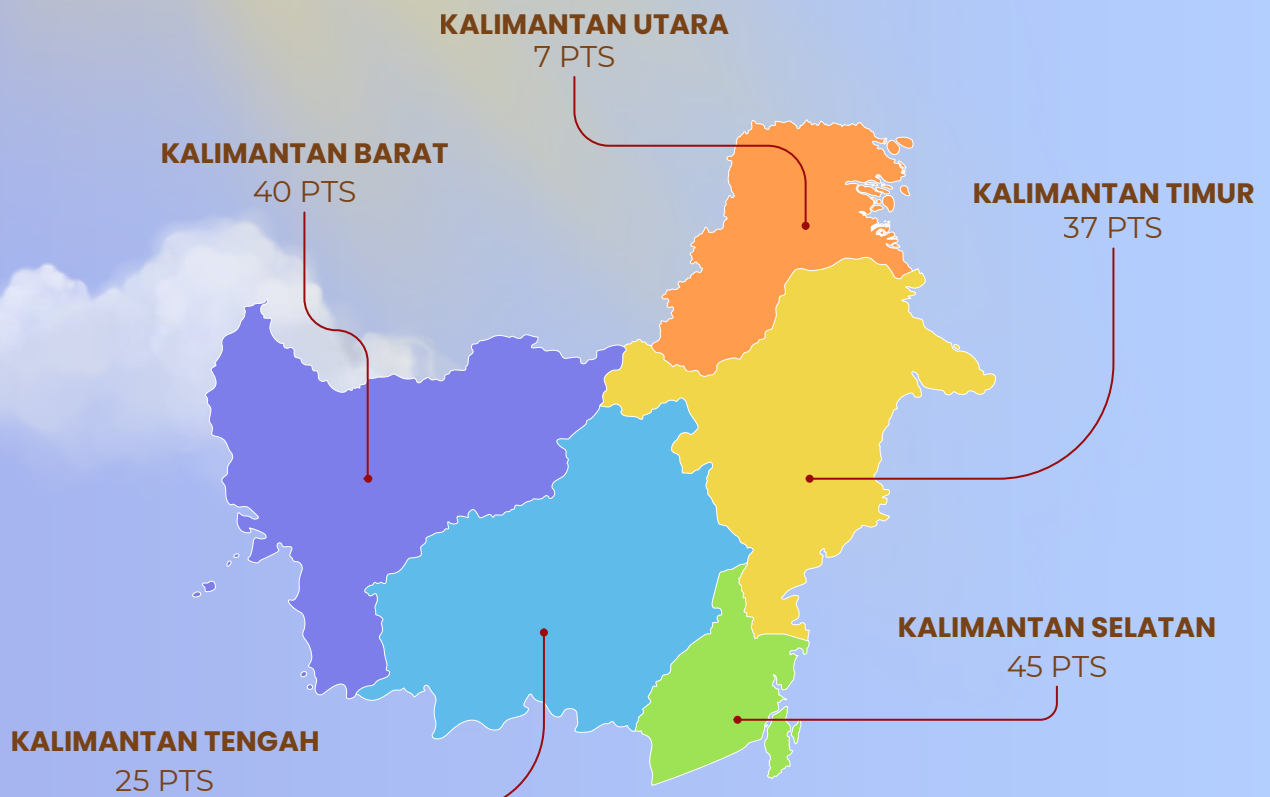


Gambaran Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang berperan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. LLDIKTI resmi terbentuk melalui pengundangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 April 2018.

Sebagai bentuk transformasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), lembaga ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian regulasi untuk memperkuat fungsinya, terakhir melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023, yang kini dalam masa transisi pengalihan wewenang ke struktur kementerian yang baru. Saat ini, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Adapun pembinaan secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di lingkungan Kemendiktisaintek.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI berkedudukan di kota Banjarmasin dan saat ini dipimpin oleh Muhammad Akbar. Dalam menjalankan fungsinya di seluruh regional Kalimantan pada tahun 2025, di bidang administrasi dan perkantoran LLDIKTI Wilayah XI didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari 56 Pegawai PNS, 8 Pegawai PPNPN, dan 16 Tenaga Outsourcing. Sedangkan dukungan sumber daya tenaga dosen terdiri dari 277 dosen PNS dan 6.976 dosen Non PNS yang ditempatkan pada berbagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Wilayah kerja LLDIKTI Wilayah XI mencakup lima provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Hingga saat ini, LLDIKTI Wilayah XI mengemban amanah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mutu terhadap 154 Perguruan Tinggi Swasta guna mewujudkan ekosistem Kampus Berdampak di wilayah Kalimantan.



Sebaran Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan

Kondisi Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan

Akreditasi Perguruan Tinggi

Total Perguruan Tinggi Swasta

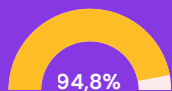
154 PTS

Desember 2025

PTS Terakreditasi

146 PTS

Desember 2025

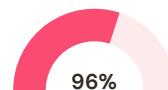


Akreditasi Program Studi

Total Program Studi

776 Prodi

Desember 2025



Terakreditasi

745 Prodi

Kedaluwarsa

30 Prodi

Tidak Terakreditasi

1 Prodi

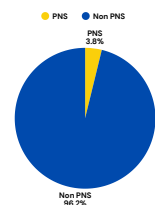
Tenaga Dosen

Dosen PNS

277 Orang

Dosen Tetap

6.976 Orang



Dasar Hukum

- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006**
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 - **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014**
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025**
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
 - **Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024**
tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 - **PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014**
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
 - **PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021**
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - **PermenPAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021**
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
 - **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024**
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 - **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025**
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029
 - **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2025**
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 - **Permendikbudristek Nomor 60 Tahun 2023**
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
 - **Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023**
tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, tugas dan fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin sebagai berikut :

TUGAS



Melaksanakan Fasilitas Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi



FUNGSI

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
4. Pelaksanaan fasilitas kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
5. Pelaksanaan fasilitas penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
6. Pelaksanaan fasilitas pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
7. Pelaksanaan kerja sama;
8. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitas peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
10. Pelaksanaan administrasi.



Struktur Organisasi



Dr. Drs. Muhammad Akbar, M.Si

Kepala



Surya Apriadi, SE

Kepala Bagian Umum



Kelompok Jabatan Fungsional



Isu Strategis Organisasi

01



Disparitas mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan

02



Keterbatasan kemampuan perguruan tinggi dalam pemenuhan syarat akreditasi

03



Peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder

04



Implementasi kebijakan Kampus Berdampak

05



Implementasi kebijakan penanganan kekerasan pada Perguruan Tinggi Swasta

06



Pemenuhan Kualifikasi SDM Dosen

07



Pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Peran Strategis Organisasi

01



Fasilitasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan

02



Fasilitasi pemberian hibah pendidikan tinggi oleh pemerintah daerah

03



Perbaikan sistem untuk pemberian layanan yang lebih baik dan berkeadilan

04



Fasilitasi pemahaman Implementasi kebijakan Kampus Berdampak pada Perguruan Tinggi Swasta

05



Fasilitasi implementasi kebijakan penanganan kekerasan pada Perguruan Tinggi Swasta

06



Pendampingan Karir Dosen yang Responsif

07



Percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



2

PERENCANAAN KINERJA

Visi dan Misi

VISI

LLDIKTI Wilayah XI ikut serta dalam upaya Kemendiktisaintek untuk mendukung Visi dan Misi Presiden untuk terwujudnya Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045

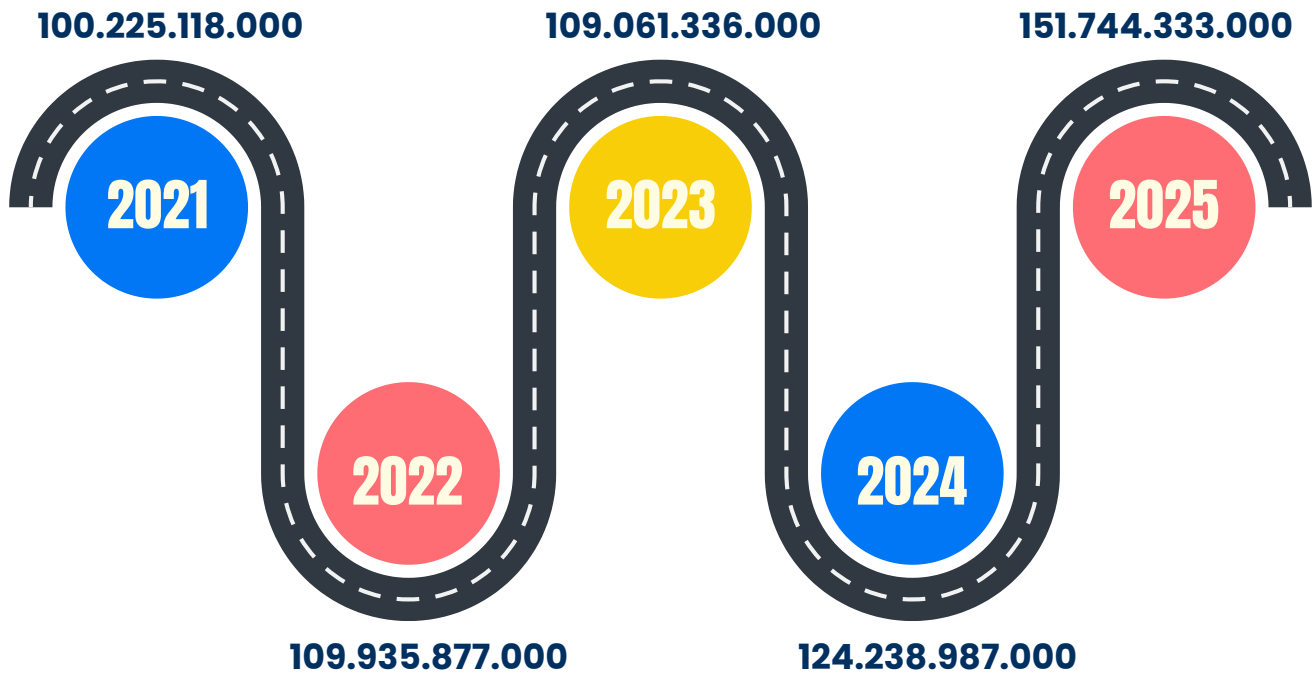
MISI

1. Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan riset, pengembangan sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat;
3. Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas.

Lima Tata Nilai Kemdiktisaintek



Sebagai pengguna anggaran, LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin menyusun rencana kerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Berikut alokasi anggaran selama 5 tahun terakhir pada LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin :



Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan anggaran pada LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin selama tahun 2021-2025 sebesar Rp. 51.519.215.000,-, hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah program pada masa Kemendikbudristek sampai Kemendiktisaintek, jumlah dosen penerima tunjangan profesi baik yang PNS maupun Non PNS, dan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai dan dosen PNS.



Data anggaran LLDIKTI Wilayah XI 5 tahun terakhir



Rencana kerja dan anggaran LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 :

No	Nomenklatur	Kode	Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen / Sumber Dana	Satuan	Volume	Alokasi
1	Satker	6932123	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANJARMASIN			151.744.333.000
2	Unit	03	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI			151.744.333.000
3	Program	139.03.DK	Program Pendidikan Tinggi			74.522.423.000
4	Kegiatan	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi			74.522.423.000
5	Sasaran	7733.01	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
6	Indikator	7733.01.01	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	91	
7	Indikator	7733.01.02	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	94	
8	Sasaran	7733.02	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
9	Indikator	7733.02.01	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	28.93	
10	Indikator	7733.02.02	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	3.26	
11	Indikator	7733.02.03	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	%	32	
12	Sasaran	7733.03	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
13	Indikator	7733.03.01	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	73	
14	Indikator	7733.03.02	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	25	
15	KRO	7733.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	161	4.937.739.000
16	RO	7733.BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	161	4.937.739.000
17	Komponen	7733.BDB.001-051	Pembinaan dan Evaluasi Lapangan Pengendalian Perguruan Tinggi			1.281.292.000
18	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			1.281.292.000
19	Komponen	7733.BDB.001-052	Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi			1.235.748.000
20	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			1.235.748.000
21	Komponen	7733.BDB.001-053	Peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi			161.531.000
22	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			161.531.000
23	Komponen	7733.BDB.001-054	Fasilitasi Layanan LLDikti			2.259.168.000
24	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			2.259.168.000
25	KRO	7733.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	1.824	69.584.684.000
26	RO	7733.BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1.824	69.584.684.000
27	Komponen	7733.BEJ.001-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			69.584.684.000
28	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			69.584.684.000

No	Nomenklatur	Kode	Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen / Sumber Dana	Satuan	Volume	Alokasi
29	Program	139.03.WA	Program Dukungan Manajemen			77.221.910.000
30	Kegiatan	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi			77.221.910.000
31	Sasaran	7735.01	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI			
32	Indikator	7735.01.01	Predikat SAKIP	Predikat	AA	
33	Indikator	7735.01.02	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	Nilai	97	
34	KRO	7735.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	3	77.221.910.000
35	RO	7735.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	10.000.000
36	Komponen	7735.EBA.956-051	Pengelolaan Barang Milik Negara Satker			10.000.000
37	RO	7735.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	489.586.000
38	Komponen	7735.EBA.962-051	Umum dan Rumah Tangga Satker			489.586.000
39	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			489.586.000
40	RO	7735.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	76.722.324.000
41	Komponen	7735.EBA.994-001	Gaji dan Tunjangan			72.592.445.000
42	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			72.592.445.000
43	Komponen	7735.EBA.994-002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4.129.879.000
44	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			4.129.879.000

2



**PROGRAM UTAMA
KEGIATAN**

LLDIKTI Wilayah XI
Tahun 2025

4



SASARAN KINERJA

LLDIKTI Wilayah XI
Tahun 2025

5



SASARAN OUTPUT

LLDIKTI Wilayah XI
Tahun 2025

9



INDIKATOR KINERJA

LLDIKTI Wilayah XI
Tahun 2025

Tujuan Strategis

1. Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu;
2. Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi;
3. Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing;
4. Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

No nklatu r	Sasaran/Indikator Kinerja	Sat	Target 2025		
			Renstra	PK	%
S	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
IK	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	Nilai	91	91	100
IK	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	94	94	100
S	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
IK	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	28,93	28,93	100
IK	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	3,26	3,26	100
IK	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	%	32	32	100
S	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
IK	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	73	73	100
IK	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	25	25	100
S	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI				
IK	Predikat SAKIP	Predikat	AA	AA	100
IK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97	97	100

Perbandingan target perjanjian kinerja tahun 2025 dengan rencana strategis

Perjanjian Kinerja Awal

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	Nilai	91
		Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	94
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	28,93
		Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	3,26
		Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	%	32
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	73
		Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	25
4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	Predikat	AA
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	77.404.296.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	53.911.451.000
Total			131.315.747.000

**Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 masih mengacu
Kepmendikbudristek 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama
pada PTN dan LLDIKTI**

Perjanjian Kinerja Akhir

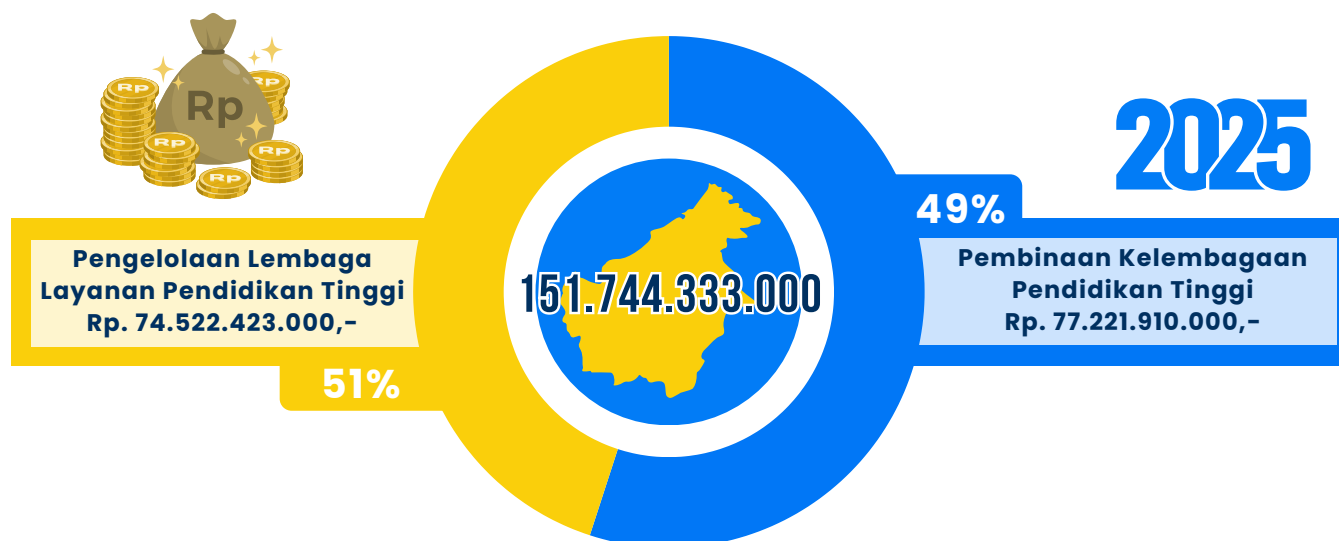
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	Nilai	91
		Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	94
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	28,93
		Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	3,26
		Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	%	32
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	73
		Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	25
4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	Predikat	AA
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	74.522.423.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	77.221.910.000
Total			151.744.333.000

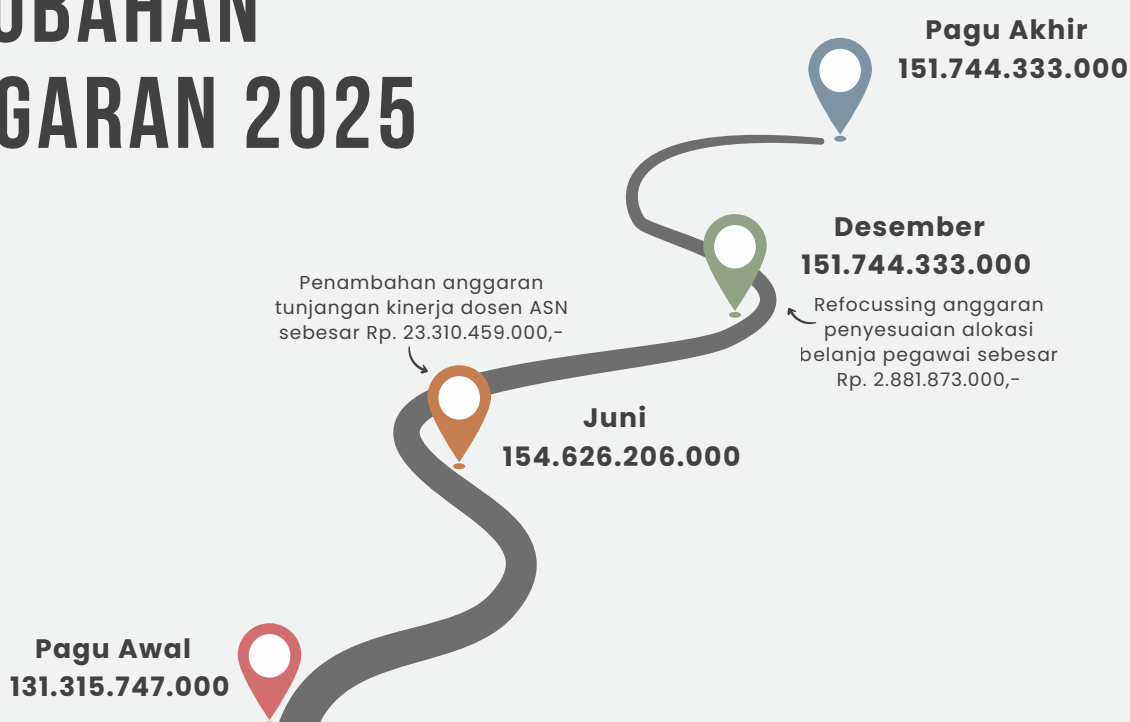
Pada tahun 2025, LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin melakukan penyesuaian anggaran pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan pagu dari Rp. 131.315.747.000,- menjadi Rp. 151.744.333.000 yang terdiri dari :

1. Penambahan alokasi tunjangan kinerja dosen ASN TA 2025 sebesar Rp. 23.310.459.000;
2. Penyesuaian (refocussing) alokasi belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp. 2.881.873.000,- untuk pemenuhan belanja pegawai satuan kerja lainnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025 tersebut, pada awal tahun LLDIKTI Wilayah XI mendapat Dana DIPA sebesar Rp. 131.315.747.000,- sebagai dukungan anggaran dari APBN. Kemudian dalam perjalanannya, terjadi 2 (dua) kali refocussing pengurangan anggaran dan 1 kali penambahan anggaran sehingga pada akhir tahun Dana DIPA yang dikelola oleh LLDIKTI Wilayah XI menjadi Rp. 151.744.333.000,-. Berikut rincian alokasi anggaran LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 :



PERUBAHAN ANGGARAN 2025

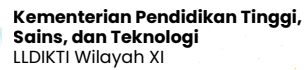


Selain dari dana pada DIPA LLDIKTI Wilayah XI, kegiatan LLDIKTI Wilayah XI juga mendapat dana transfer/titipan dari beberapa eselon I Kemendiksisaintek sebesar Rp. 29.320.165.000,- dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan crosscutting/collaborative. Berikut rincian dana yang diterima :

No	Nama Dana Transfer/Titipan	Sumber	Jumlah
1	PROGRAM PENELITIAN DIKTI	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	19.138.020.000
2	PROGRAM PENELITIAN BATCH II	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	958.810.000
3	PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	1.278.850.000
4	PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) VOKASI	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	5.600.000
5	PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIKTI	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	293.780.000
6	PROGRAM HILIRISASI RISET - PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE	Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	612.336.000
7	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	2.995.087.000
8	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BATCH II	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	603.287.000
9	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BATCH III	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	671.962.000
10	PROGRAM HILIRISASI RISET PRIORITAS	Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	248.375.000
11	PROGRAM INOVASI SENI NUSANTARA	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	209.978.000
12	PROGRAM KOSABANGSA	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	1.732.330.000
13	PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI PADA JURNAL BEREPUTASI	Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	440.000.000
14	PROGRAM INSENTIF ARTIKEL BERKUALITAS PADA JURNAL INTERNATIONAL	Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	131.750.000
TOTAL			29.320.165.000

Program Prioritas

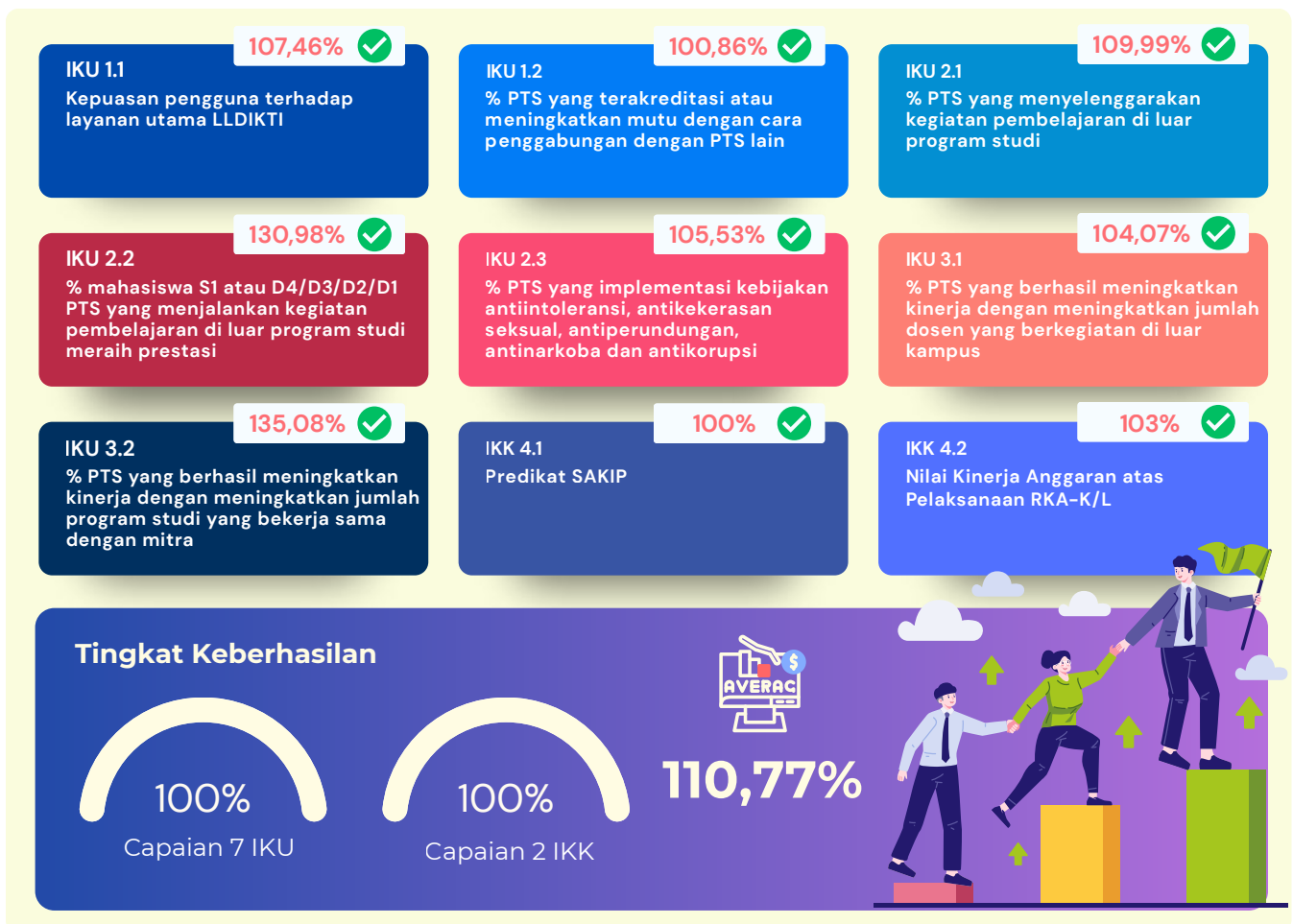
Pada tahun 2025, LLDIKTI Wilayah XI tidak mempunyai anggaran yang menjadi program prioritas namun LLDIKTI Wilayah XI membantu Kemendiksisaintek dalam melakukan fasilitasi program prioritas kementerian agar dapat diterapkan pada perguruan tinggi swasta di Kalimantan seperti Program Kampus Berdampak, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Perguruan Tinggi, dan KIP Kuliah.



AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi



Pengukuran tingkat capaian kinerja dirumuskan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, seluruh target kinerja yang ditetapkan LLDIKTI Wilayah XI telah tercapai atau dapat dinyatakan “berhasil” karena capaiannya sama atau di atas dari target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja keseluruhan sebesar 110,77%. Berikut adalah tabel tingkat ketercapaian kinerja tahun 2025 :

Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	97,79	107,46
	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	94,81	100,86
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28,93	31,82	109,99
	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3,26	4,27	130,98
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	32	33,77	105,53
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	75,97	104,07
	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	33,77	135,08
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	AA	AA	100
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	99,91	103

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2025

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023-2025 sesuai Kepmen IKU 210/M/2023 sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	Renstra	88	90	91
		PK	88	90	91
		Realisasi	88,48	90,03	97,79
	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	Renstra	78	80	94
		PK	78	80	94
		Realisasi	78,39	93,71	94,81
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	Renstra	13	20	28,93
		PK	13	20	28,93
		Realisasi	17,90	28,93	31,82
	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	Renstra	0,5	1,3	3,26
		PK	0,5	1,3	3,26
		Realisasi	1,20	3,26	4,27
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	Renstra	0,6	18	32
		PK	0,6	18	32
		Realisasi	0,62	21,38	33,77
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	Renstra	56	65	73
		PK	56	65	73
		Realisasi	60,49	69,81	75,97
	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	Renstra	7	14	25
		PK	7	14	25
		Realisasi	8,02	23,90	33,77

Sasaran	Indikator	Target	2023	2024	2025
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	Renstra	A	A	AA
		PK	A	AA	AA
		Realisasi	A	AA	AA
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Renstra	94	95	97
		PK	94	96,5	97
		Realisasi	96,02	99,79	99,81



ANALISA DAN PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Kinerja Utama I

Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Ketercapaian sasaran kinerja utama terkait dengan peningkatan kualitas LLDIKTI Wilayah XI ditandai dengan keberhasilan dalam survei kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI kepada stakeholder. Selain itu ketercapaiannya juga dilihat dari peningkatan Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain. Dimana, kedua hal tersebut dijadikan sebagai indikator kinerja utama untuk sasaran kinerja ini.

Sasaran kinerja utama ini dilaksanakan oleh seluruh lini bagian LLDIKTI Wilayah XI. Pada tahun 2025, sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017, LLDIKTI Wilayah XI telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 1.355 responden di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI dengan perolehan nilai kepuasan pengguna sebesar 97,79% atau 1.325 responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Perhitungan Kepuasan Pengguna menggunakan Kepmen IKU 210/M/2023 sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 dengan indeks capaian rerata 90,65. Kemudian, terdapat 94,81% atau 146 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah terakreditasi oleh BAN-PT. Adapun tingkat ketercapaian dari setiap indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91%	97,79%	107,46%
	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94%	94,81%	100,86%

Kemudian apabila dibandingkan dengan selama 3 tahun terakhir terdapat tren peningkatan yang baik pada seluruh indikator tersebut sesuai dengan data sebagai berikut :



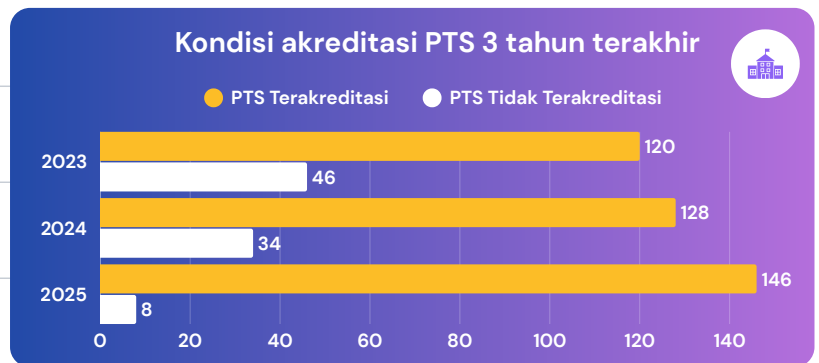
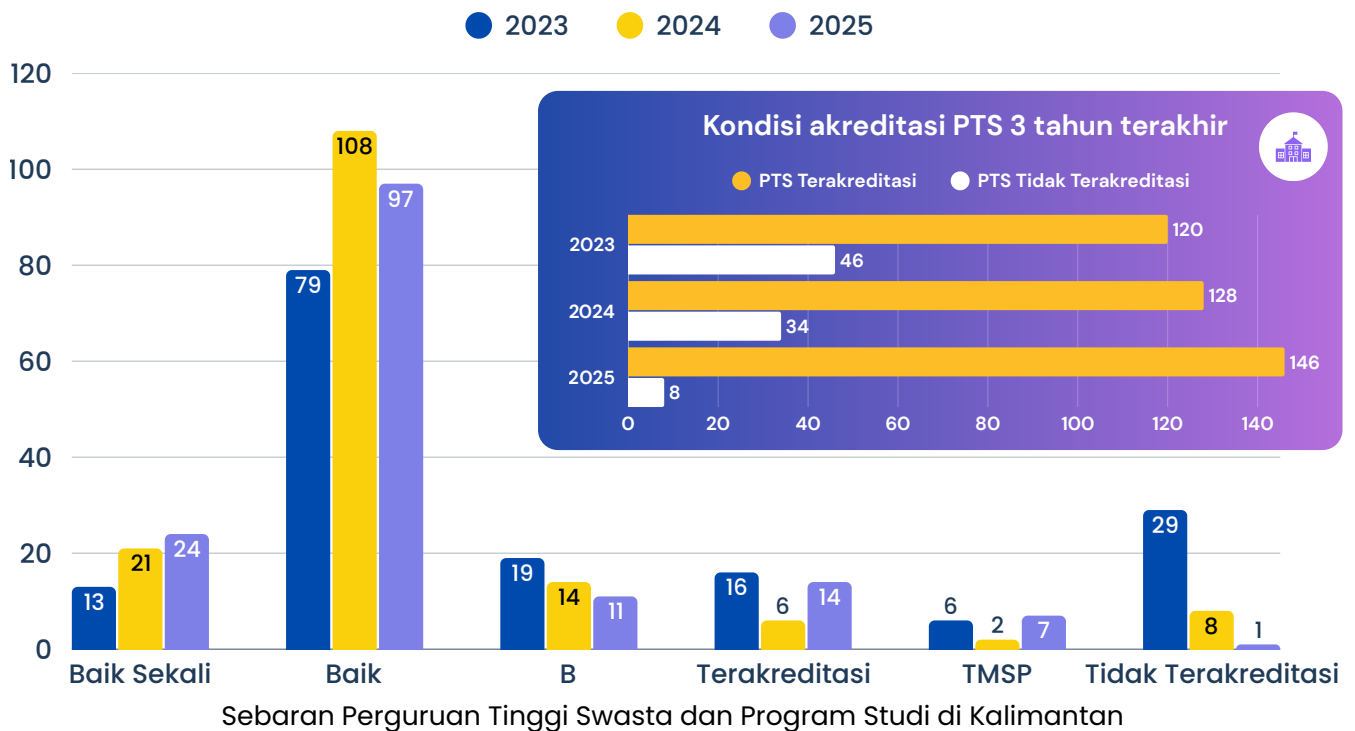
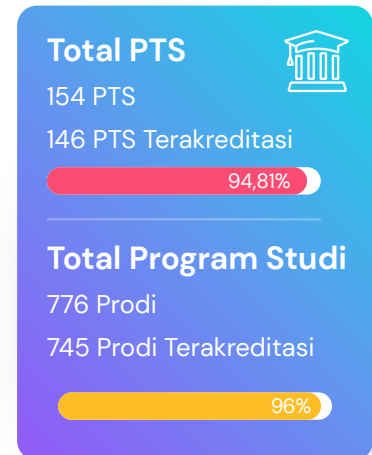
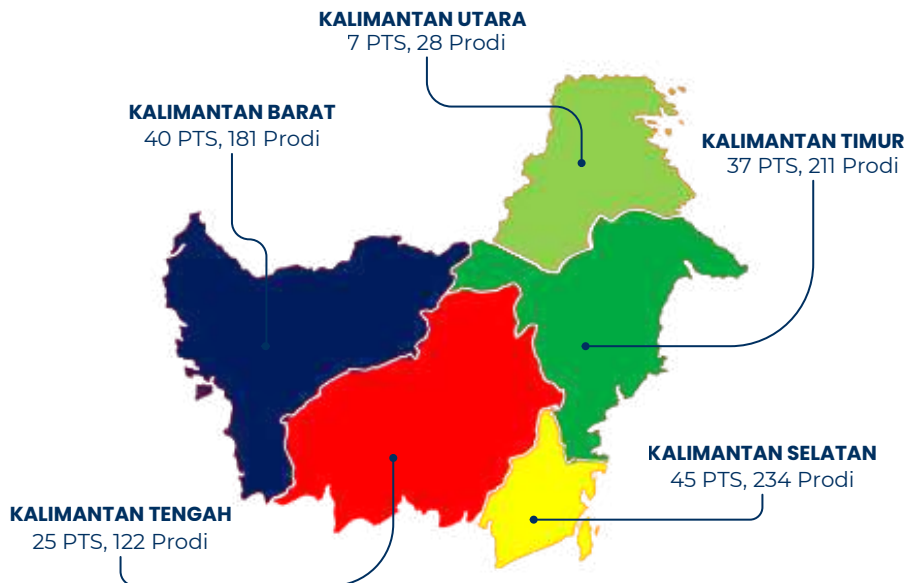
Berdasarkan grafik tersebut terjadi peningkatan kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Wilayah XI selama 3 tahun terakhir, hal itu merupakan hasil dari upaya LLDIKTI Wilayah XI yang terus mengembangkan inovasi yang telah dibangun serta didukung oleh SDM yang berkompeten. Inovasi utama LLDIKTI Wilayah XI dalam memberikan layanan kepada stakeholder adalah aplikasi ULT Online atau PINANDU (<https://pinandu-lldikti11.kemdiktisaintek.go.id>) yang telah di implementasikan sejak tahun 2023 untuk memudahkan stakeholder dalam menerima layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah XI. Selama 3 tahun terakhir aplikasi PINANDU terus dikembangkan dengan menambah beberapa fitur baru untuk lebih memudahkan stakeholder seperti fitur buku tamu digital, notifikasi whatsapp, live chat admin, dan informasi terkait zona integritas. Kemudian pada tahun 2025 pengukuran indeks kepuasan pengguna dapat langsung dilakukan oleh responden melalui aplikasi PINANDU sehingga validitas hasil pengukuran lebih terjamin. Makna dari kata PINANDU adalah istilah banjar yang artinya “Mengenali”.



Tampilan PINANDU saat rilis pertama tahun 2023



Tampilan PINANDU tahun 2025



Berdasarkan data diatas terjadi tren peningkatan yang sangat baik untuk akreditasi Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan selama 3 tahun terakhir. Perguruan Tinggi Swasta yang mendapatkan akreditasi BAIK SEKALI mengalami peningkatan yang signifikan sebaliknya yang tidak terakreditasi menurun drastis. Hal itu disebabkan karena LLDIKTI Wilayah XI yang selalu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap seluruh unsur peningkatan akreditasi Perguruan Tinggi. Jumlah Perguruan Tinggi juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penggabungan dan penutupan perguruan tinggi.



INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.1

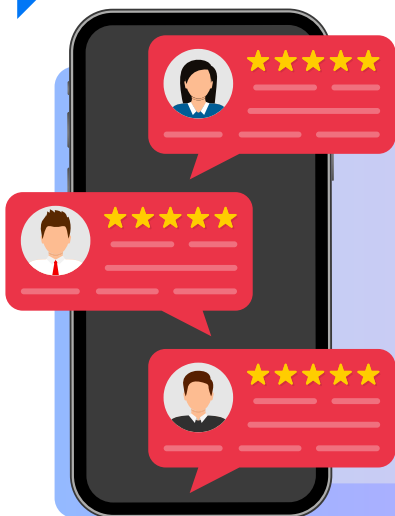
KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP LAYANAN UTAMA LLDIKTI

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka LLDIKTI Wilayah XI yang merupakan sebuah Lembaga mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan dalam memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal, LLDIKTI Wilayah XI telah menetapkan 52 standar layanan yang menjadi dasar dalam memberikan layanan kepada stakeholder. Dengan menetapkan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan tepat waktu kepada stakeholder. Dimana, pemberian layanan yang memuaskan dan tepat waktu ini juga dapat dijadikan tolak ukur peningkatan kualitas LLDIKTI dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 yang dilaksanakan setiap triwulan.

Formula Perhitungan Capaian Kinerja

➔ $\frac{n}{t} \times 100$

n = responden pengguna layanan LLDIKTI
yang puas terhadap hasil layanan
t = total jumlah responden pengguna layanan
LLDIKTI



Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 tahun 2017 yang dilaksanakan setiap triwulan melalui aplikasi PINANDU terhadap seluruh pengguna langsung layanan LLDIKTI Wilayah XI

Jangka Waktu pengukuran adalah selama 1 tahun kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 17, LLDIKTI Wilayah XI mempunyai kewajiban untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Terdapat 9 unsur penilaian yang dinilai dalam survei yaitu unsur persyaratan, unsur prosedur, unsur waktu pelayanan, unsur biaya/tarif, unsur produk layanan, unsur kompetensi pelaksana, unsur perilaku pelaksana, unsur penanganan pengaduan, dan unsur sarana dan prasarana. Setiap unsur kemudian dilakukan penilaian melalui survei kepuasan masyarakat dengan bobot penilaian sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan menteri PANRB nomor 14 tahun 17 sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06444 – 3,532	76,51 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Bobot penilaian survei kepuasan masyarakat

Survei yang dilakukan selama tahun 2025 diikuti oleh 1.355 responden. Berdasarkan perhitungan capaian sesuai dengan kepmen IKU 210/M jumlah responden yang puas terhadap layanan LLDIKTI adalah 1.325 responden dari 1.355 responden dengan persentase capaian nilai kepuasan pengguna 97,79%. Berikut hasil survei kepuasan pengguna yang dilaksanakan setiap triwulan pada tahun 2025 :

Triwulan I

Total Responden
270 Responden

Responden Puas
262 Responden

97,04%

Triwulan II

Total Responden
185 Responden

Responden Puas
181 Responden

97,84%

2025

Total Responden
1.355 Responden

Responden Puas
1.325 Responden

Target PK

91 %

Capaian

97,79 %

%

107,46 %

Triwulan III

Total Responden
415 Responden

Responden Puas
407 Responden

98,07%

Triwulan IV

Total Responden
485 Responden

Responden Puas
475 Responden

97,94%

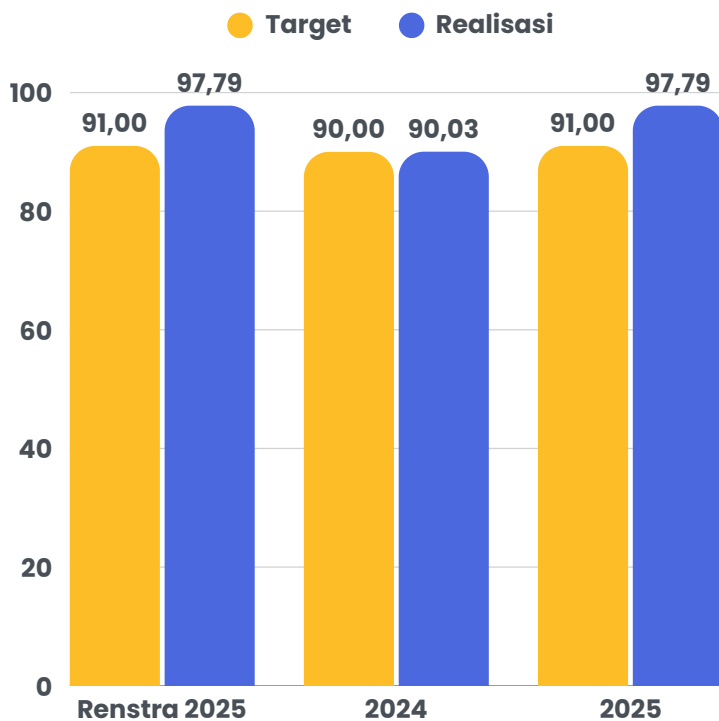
Formula Perhitungan
Capaian Kinerja



$$\frac{1.325}{1.355} \times 100 = 97,79\%$$

Berdasarkan hasil survey kepuasan yang dilaksanakan pada tahun 2025 kepada 1.355 responden, sebanyak 1.325 atau 97,79% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88.55 (sesuai dengan PermenpanRB no.14 tahun 2017). Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI dan target Rencana Strategis dengan keberhasilan capaian sebesar 107,46%. Hal tersebut membuktikan bahwa strategi yang digunakan LLDIKTI Wilayah XI dalam memberikan layanan kepada seluruh stakeholder dengan tantangan geografis yang sangat luas telah berhasil. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini dipengaruhi oleh LLDIKTI Wilayah XI yang selalu melakukan inovasi dan berupaya meningkatkan kualitas layanan baik dari segi pemenuhan sarana layanan dan peningkatan kualitas SDM pemberi layanan.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra



Dalam ekosistem pendidikan tinggi yang dinamis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memegang peran utama sebagai perpanjangan tangan Kementerian yang bertugas mengawal mutu dan memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya. Keberhasilan LLDIKTI dalam menjalankan mandat ini sangat bergantung pada satu faktor kunci yaitu kualitas layanan yang diberikan kepada para stakeholder. Stakeholder utama LLDIKTI meliputi perguruan tinggi sebagai mitra binaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, hingga Masyarakat Umum dan Dunia Usaha/Industri (DUDI) yang menjadi pengguna lulusan. Dengan luasnya cakupan perguruan tinggi binaan LLDIKTI Wilayah XI yang tersebar di 5 (lima) provinsi Kalimantan Selatan maka peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder ini bukan lagi menjadi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan pendidikan tinggi di Kalimantan. Pada akhirnya, peningkatan kualitas layanan LLDIKTI akan berujung pada penguatan daya saing lulusan dan perguruan tinggi secara keseluruhan. Perguruan tinggi yang terbantu oleh layanan prima akan lebih leluasa berinovasi, menghasilkan penelitian yang relevan, dan mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, komitmen LLDIKTI Wilayah XI untuk terus berinovasi, menyederhanakan prosedur, dan menempatkan stakeholder sebagai prioritas utama adalah investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan tinggi di Kalimantan yang lebih maju dan berdaya saing.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, transparan, dan adil, Lembaga LLDIKTI Wilayah XI telah mengambil langkah strategis dengan membangun Aplikasi Unit Layanan Terpadu Online (PINANDU). PINANDU adalah sebuah terobosan layanan berbasis website yang secara menyeluruh telah mengubah cara stakeholder berinteraksi dengan LLDIKTI Wilayah XI. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dan birokrasi, mengingat luasnya cakupan wilayah Kalimantan. Layanan yang sebelumnya tidak mudah diakses oleh stakeholder, saat ini dapat diakses dari mana saja dengan mudah. Pada tahun 2025 aplikasi PINANDU semakin dikembangkan untuk memenuhi keinginan stakeholder dan internal LLDIKTI Wilayah XI. Formula perhitungan kepuasan pengguna telah terintegrasi sepenuhnya dengan aplikasi PINANDU dimana stakeholder langsung dapat memberikan tanggapan setelah menerima layanan oleh LLDIKTI. LLDIKTI Wilayah XI juga aktif melaksanakan pertemuan rutin dengan stakeholder untuk membahas masalah peningkatan kualitas layanan. Beberapa sistem pendukung layanan yang dibangun oleh LLDIKTI Wilayah XI untuk memudahkan stakeholder diseluruh kalimantan sebagai berikut :

Sistem Pendukung Layanan LLDIKTI Wilayah XI

**PINANDU**

Aplikasi Unit Layanan Terpadu Online
Aplikasi yang mengintegrasikan seluruh layanan LLDIKTI Wilayah XI kepada stakeholder

**SIBEKEN**

Sistem Informasi Beban Kerja Dosen
Aplikasi pengumpulan data BKD sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi Dosen dan kehormatan guru besar



SINGKRON

Sistem Informasi Angka Kredit Online Dosen
Aplikasi penilaian angka kredit dosen yang digunakan sebagai dasar penetapan SK kenaikan jabatan fungsional Dosen PNS dan Non PNS



SURAT DARING

Aplikasi persuratan LLDIKTI
Wilayah XI dengan Perguruan
Tinggi Swasta



AKSI BERKAH

Aplikasi kehadiran (presensi, cuti, izin) dosen PNS sebagai dasar pengawasan disiplin dan pemberian uang makan

Akses Layanan Mudah

Implementasi Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas layanan tidak terlepas dari implementasi Reformasi Birokrasi pada LLDIKTI Wilayah XI yang keduanya berjalan dengan selaras. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada LLDIKTI Wilayah XI sudah berjalan dengan baik meskipun sampai tahun 2025 belum berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menpan RB. Bukti nyata adalah pada tahun 2024 LLDIKTI Wilayah XI berhasil meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan penilaian tim penilai internal (TPI) Kemendikbudristek dengan nilai **93,64** dan menjadi LLDIKTI dengan pelaksanaan Zona Integritas terbaik di Indonesia. Reformasi Birokrasi menjadi dasar pada pergeseran budaya kerja (*mindset dan culture set*) seluruh pegawai LLDIKTI Wilayah XI. Adapun pergeseran budaya kerja yang dimaksud seperti :

Budaya "Serapan" ke Budaya "Kinerja"

Dahulu keberhasilan kinerja instansi sering diukur dari seberapa habis anggaran diserap (*spending money*). Kini, fokus bergeser pada Value for Money. Dengan berubahnya pola pikir pegawai saat ini maka pegawai tidak lagi bangga hanya karena daya serap anggaran yang tinggi, tetapi bangga jika target kinerja tercapai melampaui ekspektasi dengan biaya yang minimal. Hal tersebut dibuktikan dengan efisiensi anggaran yang cukup baik sebesar 13,79% pada tahun 2025. Peningkatan predikat SAKIP (AA) dan Nilai Kinerja Anggaran (99,91) merupakan cerminan perubahan budaya kerja yang nyata dengan didorong oleh beberapa upaya berkelanjutan.

Budaya Melayani (*Service Excellence*)

Perubahan dari pola pikir "penguasa" menjadi "pelayan masyarakat". Pegawai mempunyai orientasi bahwa setiap pekerjaan adalah untuk kepuasan pemangku kepentingan (dosen, PTS, dan Masyarakat), yang ditandai dengan kemudahan akses dan kecepatan respon. Berdasarkan nilai capaian kinerja kepuasan pengguna (97,79%) menjadi bukti bahwa layanan LLDIKTI Wilayah XI telah mampu beradaptasi dengan semakin tingginya ekspektasi pengguna.

Budaya Inovatif

Pegawai didorong untuk terus mencari cara baru yang lebih simpel dan berdampak besar sehingga tidak terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Perubahan budaya inovatif tercermin dari layanan yang seluruhnya telah terdigitalisasi dengan sistem.

Kendala/Permasalahan :

1. Belum terpusatnya seluruh layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI. Banyaknya layanan sistem informasi yang dipegang oleh Perguruan Tinggi seperti halnya Sistem Informasi yang dimiliki oleh kementerian (PDDIKTI, SISTER, SIAGA), atau Sistem Informasi dari pihak lainnya seperti BAN PT (SAPTO), sehingga menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan layanan daring yang tidak single user. Memusatkan layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI memerlukan waktu, hal ini dikarenakan beberapa Layanan daring tidak satu *framework* dengan layanan daring lainnya, yang menyebabkan pihak pengembang mengalami kesulitan untuk menggabungkan layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI ataupun menjadikannya single sign on;
2. Forum Komunikasi Publik belum dilaksanakan secara rutin. Berdasarkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mendengarkan langsung masukan dan kritik dari pengguna layanan sebagai dasar rekomendasi pembenahan layanan yang sudah diberikan kepada pengguna layanan;
3. Belum efektifnya penggunaan kanal konsultasi layanan yang digunakan oleh LLDIKTI Wilayah XI. LLDIKTI Wilayah XI mempunyai kanal konsultasi baik secara luring (ULT) maupun secara daring (WA, Live chat). Konsultasi layanan yang dilakukan secara luring sangat berjalan efektif, hal ini dikarenakan pengguna layanan dapat langsung bertemu dengan petugas layanan. Akan tetapi, mengingat luasnya wilayah kerja LLDIKTI Wilayah XI yang melayani civitas akademika pada 5 provinsi di Kalimantan, Konsultasi secara daring harus diberikan secara khusus dan fokus. Kondisi saat ini, layanan konsultasi daring hanya dipegang oleh satu orang petugas front liner, belum adanya otomatisasi langsung ke petugas layanan inti sehingga frontliner memerlukan waktu untuk menyampaikan dan menanyakan kepada petugas layanan inti. Hal ini menyebabkan adanya *spend time* yang tinggi untuk memberikan respon kepada pengguna layanan yang ingin berkonsultasi;
4. Belum adanya kegiatan rutin penyampaian atau penjelasan standar pelayanan kepada stakeholder. Terdapat beberapa permasalahan dalam menterjemahkan waktu proses layanan tertentu. Waktu proses layanan menjadi tantangan bagi LLDIKTI Wilayah XI, karena pada unsur ini yang menjadi sorotan pengguna layanan.

Langkah Antisipasi dan Strategi :

1. Integrasi Aplikasi pada layanan Daring LLDIKTI Wilayah XI;
2. Update Standar Pelayanan sesuai prosedur yang terbaru;
3. Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala;
4. Melakukan Sosialisasi Standar Pelayanan kepada stakeholder atau civitas akademika dengan tujuan memberikan pemahaman khusus bagi layanan yang berdasarkan hasil evaluasi hasil survei.



Fasilitas pendukung Unit Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah XI



INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.2

PERSENTASE PTS YANG TERAKREDITASI ATAU MENINGKATKAN MUTU DENGAN CARA PENGGABUNGAN DENGAN PTS LAIN

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI yang sangat penting dalam transformasi pendidikan tinggi adalah Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu melalui penggabungan (merger) atau penyatuan. Indikator ini bertujuan untuk mengatasi masalah jumlah perguruan tinggi yang terlalu banyak namun memiliki skala kecil dan kualitas yang belum optimal. Pemerintah, melalui Kemdiktisaintek mendorong kebijakan ini karena beberapa alasan utama :

- **Efisiensi Sumber Daya** : Banyak PTS kecil kesulitan memenuhi standar sarana prasarana dan kecukupan dosen. Dengan bergabung, sumber daya dapat disatukan untuk mencapai skala ekonomi yang lebih baik;
- **Peningkatan Akreditasi** : PTS hasil penggabungan biasanya memiliki potensi lebih besar untuk meraih akreditasi "Unggul" atau "Baik Sekali" karena memiliki tata kelola yang lebih sehat;
- **Daya Saing** : Institusi yang lebih besar cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan mitra industri.

Bagi mahasiswa, IKU ini memberikan kepastian bahwa mereka berkuliah di institusi yang legal, sehat, dan terakreditasi. Mahasiswa dari PTS kecil yang bermerger biasanya akan mendapatkan akses ke fasilitas yang lebih lengkap dan ijazah dari institusi dengan reputasi yang lebih kuat.



Indikator kinerja ini diukur dengan memperhitungkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/penyatuan.

Kriteria 1



PTS yang terakreditasi

Akreditasi adalah sebuah peringkat yang akan diperoleh oleh Perguruan Tinggi yang berhasil memenuhi kriteria sesuai dengan aturan BAN-PT. Sumber data dilihat dari PDDIKTI.

Kriteria 2



PTS yang melakukan penggabungan/penyatuan

Penyatuan 1 atau lebih Perguruan Tinggi menjadi 1 Perguruan Tinggi baru atau penyatuan ke dalam 1 perguruan tinggi lain. Sumber data dari SK Penggabungan Perguruan Tinggi

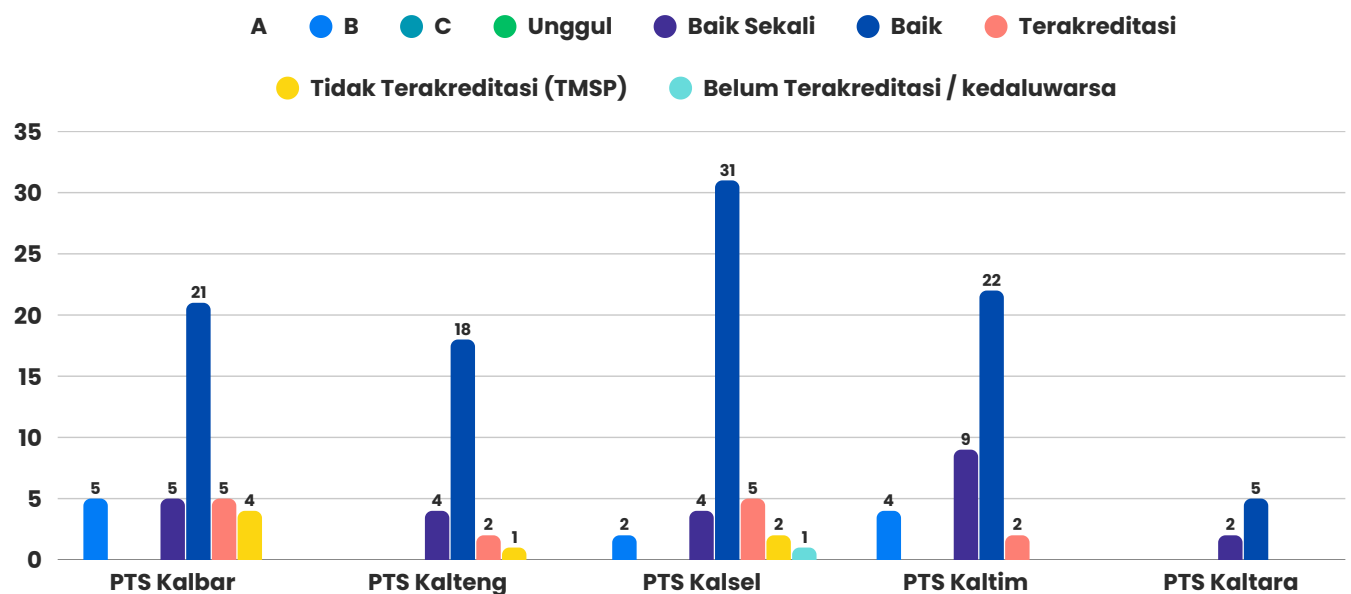
Formula Perhitungan Capaian Kinerja



$$\frac{a+b}{t} \times 100$$

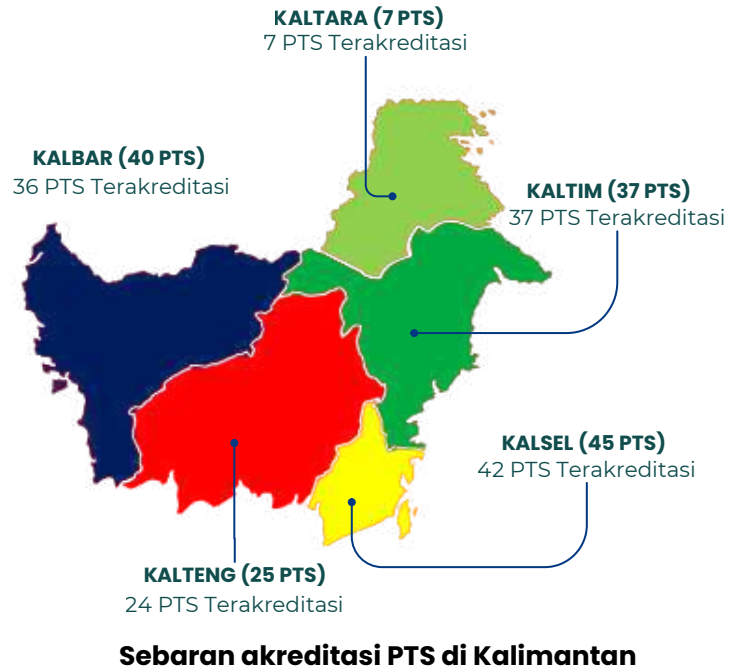
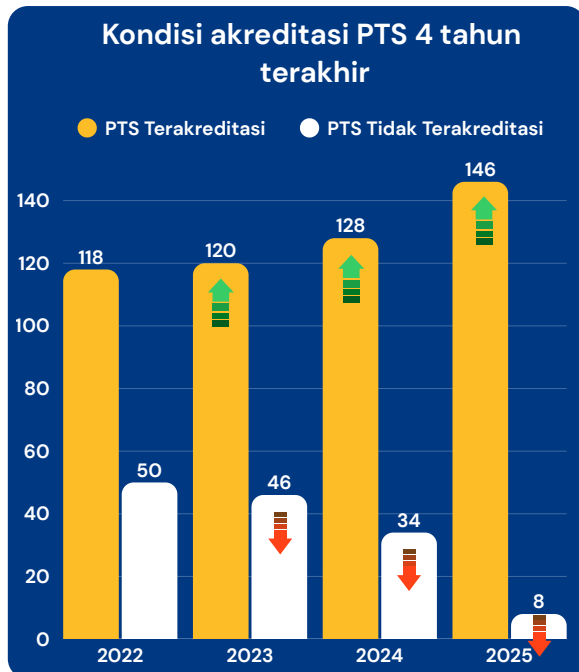
a = jumlah PTS yang terakreditasi
b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Adapun data akreditasi perguruan tinggi swasta per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :



Provinsi	Peringkat									Jumlah
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Terakreditasi	TMSP	Belum Terakreditasi	
Kalimantan Barat	0	5	0	0	5	21	5	4	0	40
Kalimantan Tengah	0	0	0	0	4	18	2	1	0	25
Kalimantan Selatan	0	2	0	0	4	31	5	2	1	45
Kalimantan Timur	0	4	0	0	9	22	2	0	0	37
Kalimantan Utara	0	0	0	0	2	5	0	0	0	7
Total	0	11	0	0	24	97	14	7	1	154

Sebaran akreditasi perguruan tinggi di Kalimantan



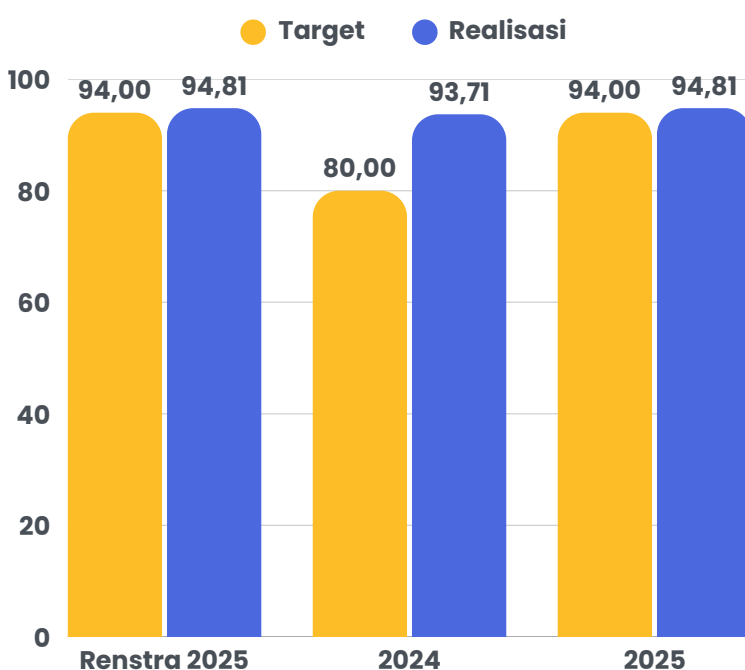
Dari informasi tersebut diketahui dari 154 PTS yang ada di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI sebanyak 146 PTS telah terakreditasi sudah termasuk dengan PTS hasil penyatuan/penggabungan sebelumnya. PTS hasil penggabungan otomatis memperoleh akreditasi minimum. Pada tahun 2025, dari 7 (tujuh) PTS yang sedang berproses konsolidasi/penggabungan belum ada statusnya yang selesai sehingga proses penggabungan masih dilanjutkan pada tahun 2026. Berdasarkan data akreditasi 4 (empat) tahun terakhir jumlah PTS terakreditasi meningkat secara signifikan, sebaliknya dengan PTS tidak terakreditasi mengalami penurunan yang sangat drastis dari 50 PTS menjadi 8 PTS pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan akreditasi perguruan tinggi oleh LLDIKTI Wilayah XI berhasil dalam meningkatkan mutu PTS di Kalimantan.



Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada tahun 2025 adalah 94,81% atau 146 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah memenuhi target perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 94% dengan capaian keberhasilan sebesar 100,86%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Terdapat 8 (delapan) PTS yang Tidak terakreditasi/Kedaluwarsa tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. PTS tersebut akan menjadi fokus utama pendampingan akreditasi oleh LLDIKTI Wilayah XI pada tahun 2026. Beberapa poin yang dapat menjadi kesimpulan dari data tersebut adalah :

- **Tingkat Kepercayaan Tinggi** : Dengan hanya menyisakan 8 PTS (sekitar 5%) yang belum terakreditasi, masyarakat Kalimantan kini memiliki pilihan yang sangat luas untuk menempuh pendidikan di institusi yang legal dan bermutu;
- **Efektivitas LLDIKTI Wilayah XI** : Pencapaian ini merupakan cerminan keberhasilan pendampingan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI dalam mendorong PTS memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- **Kesiapan SDM** : Akreditasi yang merata ini menjadi modal kuat bagi Kalimantan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membutuhkan pasokan lulusan lokal yang kompeten dan diakui secara nasional.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra



Daftar Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan :

NO	NAMA PTS	NOMOR SK AKREDITASI	MASA BERLAKU	AKREDITASI
1	Universitas Achmad Yani Banjarmasin	1969/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2024	2029-08-21	B
2	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin	2229/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2025	2030-05-11	Baik Sekali
3	Universitas Panca Bhakti	2556/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2025	9999-01-01 *akreditasi sementara	Terakreditasi
4	Universitas Balikpapan	235/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023	2027-09-13	B
5	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	238/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023	2027-11-08	Baik Sekali
6	Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong	412/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2021	2026-05-11	Baik Sekali
7	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	194/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023	2027-11-01	Baik Sekali
8	Universitas Kristen Palangka Raya	1389/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022	2026-02-13	Baik
9	Universitas Muhammadiyah Pontianak	1104/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021	2026-12-28	B
10	Universitas Kapuas	2584/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2025	9999-01-01 *akreditasi sementara	Terakreditasi
11	Universitas PGRI Palangka Raya	12/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/I/2024	2028-12-13	Baik
12	Universitas Antakusuma	313/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2023	2028-04-26	Baik
13	Universitas Darwan Ali	211/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021	2026-03-16	Baik
14	Universitas Kaltara	2107/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024	2029-11-19	Baik Sekali
15	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur	391/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2023	2028-05-30	Baik
16	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	279/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2023	2028-04-18	Baik
17	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat	1350/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024	2029-07-15	Baik Sekali
18	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	107/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021	2026-02-23	Baik Sekali
19	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	499/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2024	2029-04-10	Baik Sekali
20	Universitas Sari Mulia	452/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2021	2026-05-18	Baik
21	Universitas Mulia	2142/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/IV/2025	9999-01-01 *akreditasi sementara	Baik
22	Universitas Widya Dharma Pontianak	87/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2022	2027-02-22	Baik
23	Universitas Oso	2106/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024	2029-11-19	Baik
24	Universitas Cahaya Bangsa	712/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023	2028-10-10	Baik
25	Universitas Muhammadiyah Berau	948/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2023	2028-11-21	Baik Sekali
26	Universitas Borneo Lestari	502/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2024	2025-12-15	Baik
27	Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo	239/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/III/2023	2026-12-08	Baik
28	Universitas Muhammadiyah Sampit	2241/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2024	2029-12-15	Baik Sekali
29	Universitas PGRI Kalimantan	1928/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/X/2024	2029-10-15	B
30	Universitas PGRI Pontianak	2298/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2025	2028-12-05	B
31	Universitas Sapta Mandiri	2655/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2025	2026-08-18	Baik
32	Universitas Eka Harap	229/B/0/2025	2027-08-04	Terakreditasi
33	IKIP PGRI Kaltim	339/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2021	2026-04-16	B
34	Institut Shanti Bhuana	801/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023	2028-10-24	Baik Sekali
35	Institut Teknologi Keling Kumang	1824/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024	2029-10-03	Baik
36	Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia	2355/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2025	2030-06-14	Baik
37	Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan	2304/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2025	2030-05-27	Baik



NO	NAMA PTS	NOMOR SK AKREDITASI	MASA BERLAKU	AKREDITASI
38	Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan	2589/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2025	2030-08-19	Baik
39	Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia	1956/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024	2029-10-19	Baik
40	Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat	461/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024	2029-04-20	B
41	Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan	2750/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2025	2029-02-27	Baik Sekali
42	Institut Kesehatan Suaka Insan	506/B/O/2025	2027-03-06	Terakreditasi
43	STIMI Banjarmasin	2053/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2024	2029-02-27	Baik Sekali
44	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam	Menunggu penerbitan SK	9999-01-01 *akreditasi sementara	Lolos Pantau BAN-PT
45	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin	1192/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-22	Baik
46	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafoeddin	2350/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2025	2030-06-14	Baik
47	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo	311/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021	2026-04-13	Baik
48	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	1020/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-02	Baik Sekali
49	STMIK Samarinda	1668/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VIII/2024	2026-08-18	Baik
50	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya	314/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021	2026-04-13	Baik
51	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai	1179/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-22	Baik
52	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit	116/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021	2026-02-23	Baik
53	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit	2460/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2025	2030-07-08	Baik Sekali
54	STIMI Samarinda	1104/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-15	Baik
55	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia	637/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2023	2028-09-19	Baik Sekali
56	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan	1992/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024	2029-11-05	Baik
57	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda	1535/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VIII/2024	2026-08-13	Baik
58	STMIK Pontianak	2280/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/V/2025	2030-05-14	Baik
59	STMIK Widya Cipta Dharma	2361/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VI/2025	2030-06-14	B
60	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda	522/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023	2028-08-08	Baik
61	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak	1043/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-08	Baik
62	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	2356/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2025	2030-06-14	Baik Sekali
63	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh	1132/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-16	Baik
64	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang	315/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021	2026-04-13	Baik
65	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanu Buntok	2392/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/VII/2025	9999-01-01 *akreditasi sementara	Baik
66	Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur	418/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2021	2026-05-11	Baik
67	STMIK Banjarbaru	887/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2020	9999-01-01 *akreditasi sementara	Baik
68	Sekolah Tinggi Teknologi Migas	836/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023	2027-09-06	B
69	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau	655/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021	2026-07-14	Baik
70	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai	2742/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2025	2030-04-20	Baik
71	STMIK Indonesia Banjarmasin	1876/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2022	2027-08-16	Baik
72	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang	2541/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/2.0/PT/IX/2025	2030-05-10	Terakreditasi
73	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	881/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022	2026-06-11	Baik
74	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara	Menunggu penerbitan SK	9999-01-01 *akreditasi sementara	Lolos Pantau BAN-PT
75	STIE YBPK Palangka Raya	226/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2023	2028-03-28	Baik
76	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja	1939/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XI/2022	2027-05-10	Baik
77	STKIP Persada Khatulistiwa	930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022	2026-02-13	Baik
78	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang	1160/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022	2026-12-28	Baik





NO	NAMA PTS	NOMOR SK AKREDITASI	MASA BERLAKU	AKREDITASI
79	STMIK Palangka Raya	922/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020	2025-11-10	Baik
80	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi	2573/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2025	9999-01-01 *akreditasi sementara	Terakreditasi
81	STIKES Husada Borneo	2576/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2025	9999-01-01 *akreditasi sementara	Terakreditasi
82	STIKES Darul Azhar Batulicin	299/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022	2027-06-28	Baik
83	STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati	1458/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024	2026-08-07	Baik
84	STIE Madani Balikpapan	2515/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/2.0/PT/VIII/2025	2033-08-23	Baik
85	STMIK Borneo Internasional	319/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021	2026-04-13	Baik
86	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	1115/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-15	Baik
87	STKIP Paris Barantai	936/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020	2025-11-11	Baik
88	STIKES Kapuas Raya	301/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022	2027-06-28	Baik
89	STIKES Yarsi Pontianak	898/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020	9999-01-01 *akreditasi sementara	Baik
90	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak	971/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2021	2026-11-09	Baik
91	STIKES Borneo Cendekia Medika	227/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024	2029-03-05	Baik Sekali
92	Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama	1349/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024	2029-07-15	Baik Sekali
93	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long	1024/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2021	2026-12-15	Baik Sekali
94	STKIP Islam Sabial Muhtadin Banjarmasin	2129/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024	2029-11-26	Baik
95	STIKES Dirgahayu Samarinda	1147/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-22	Baik Sekali
96	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda	1194/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/XII/2023	2028-10-26	Baik
97	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas	513/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023	2028-08-01	Baik
98	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura	693/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021	2026-07-27	Baik
99	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda	1197/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/XII/2023	2028-08-02	Baik
100	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin	245/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024	2029-03-19	Baik
101	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura	2119/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024	2029-11-26	Baik
102	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin	1801/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2024	2029-09-17	Baik
103	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Nusantara	1592/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VIII/2024	2026-08-14	Baik
104	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak	2553/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2025	9999-01-01 *akreditasi sementara	Terakreditasi
105	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Indonesia Balikpapan	728/B/O/2025	2027-08-25	Terakreditasi
106	Akademi Keuangan Dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak	2560/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2025	9999-01-01 *akreditasi sementara	Terakreditasi
107	Akademi Sekretari Dan Manajemen Indonesia Pontianak	333/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021	2026-04-14	Baik
108	Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin	510/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2021	2026-06-02	Baik
109	Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin	Menunggu penerbitan SK	9999-01-01 *akreditasi sementara	Lolos Pantau BAN-PT
110	Akademi Keperawatan Bethesda Serukam	1495/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022	2026-12-28	Baik
111	Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang	249/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2023	2028-04-11	Baik
112	Akademi Kebidanan Singkawang	1731/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022	2027-09-13	Baik
113	Akademi Kebidanan Betang Asi Raya	352/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021	2026-04-20	Baik
114	Akademi Farmasi Yarsi Pontianak	2182/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2025	2029-04-24	Baik Sekali
115	Akademi Kebidanan Banua Bina Husada	1551/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024	2026-08-14	Baik
116	Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda	297/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2023	2028-04-26	Baik Sekali
117	Institut Sains Dan Bisnis Internasional Singkawang	1820/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2024	2025-11-10	Baik Sekali
118	Akademi Kebidanan Murung Raya	2112/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2024	2026-11-19	Baik
119	Akademi kebidanan Darussalam Martapura	235/d/o/2026	2026-04-09	Terakreditasi



NO	NAMA PTS	NOMOR SK AKREDITASI	MASA BERLAKU	AKREDITASI
120	Politeknik Tenggara Equator Pontianak	1034/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020	2025-12-08	Baik Sekali
121	Politeknik Kotabaru	1196/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022	2026-12-28	Baik
122	Politeknik Sendawar	1279/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VI/2024	2026-06-26	Baik
123	Politeknik Muara Teweh	1855/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024	2029-10-08	Baik
124	Politeknik Malinau	1519/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2022	2027-09-27	Baik
125	Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau	1567/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024	2026-08-14	Baik
126	Politeknik Hasnur	115/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021	2026-02-23	Baik
127	Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan	2435/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2025	2030-07-01	Baik
128	Politeknik Unggulan Kalimantan	701/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021	2026-07-28	Baik
129	Politeknik Batulicin	2260/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2025	2030-05-14	Baik
130	Politeknik Sinar Mas Berau Coal	346/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021	2026-04-20	Baik
131	Politeknik Lamandau	152/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024	2029-02-27	Baik
132	Politeknik Bisnis Kaltara	2844/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2025	2030-10-15	Baik
133	Politeknik Aisyiyah Pontianak	2720/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2025	2030-09-16	Baik Sekali
134	Politeknik Sampit	774/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023	2028-10-17	Baik
135	Politeknik Seruyan	713/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023	2028-10-10	Baik
136	Politeknik Kaltara	412/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2022	2027-08-02	Baik
137	Politeknik Kesdam VI Banjarmasin	2028/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024	2029-11-05	Baik
138	Politeknik Nusantara Balikpapan	2382/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VI/2025	2027-06-14	Baik
139	Politeknik Borneo Medistra	1334/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VII/2024	2026-07-09	Baik
140	Politeknik Indonesia Banjarmasin	1515/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024	2026-08-13	Baik
141	Politeknik Alkon Kalimantan	2746/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2025	2026-06-30	Baik
142	Politeknik Kesehatan Borneo Citra Medika	119/D/O/2024	2026-04-02	Terakreditasi
143	Politeknik Murakata	275/D/O/2024	2026-06-21	Terakreditasi
144	Politeknik Bisnis LPP Quantum	361/B/O/2025	2027-12-05	Terakreditasi
145	Akademi Komunitas Peternakan Jorong	1605/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024	2026-08-18	Baik
146	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	1842/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024	2028-10-10	Baik Sekali

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

Faktor Internal :

1. Perumusan target IKU yang tepat (Relevan dan Realistis);
2. Sistem manajemen yang efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian (monev), untuk memastikan pencapaian target IKU yang dilakukan per triwulan;
3. Terdapatnya kebijakan Insentif dari DIKTI terhadap Pengusul dalam usulan Penggabungan atau Penyatuan PTS yang mendorong stakeholder dalam melakukan pengusulan.

Faktor Eksternal / Stakeholder :

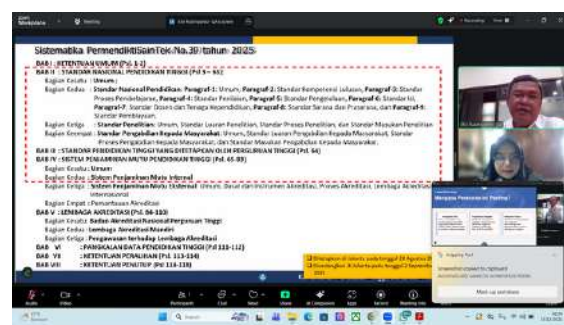
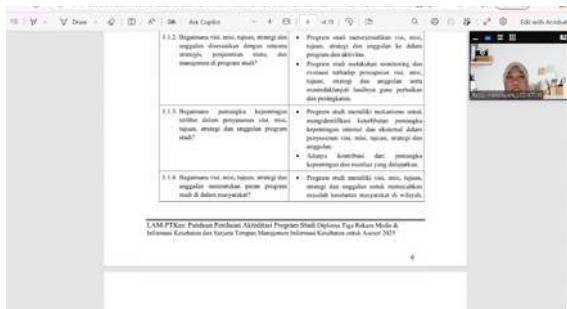
1. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan (PTS) terkait pentingnya Akreditasi Perguruan Tinggi;
2. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan (Yayasan) terkait dampak positif dari penggabungan atau penyatuan PTS yang diselenggarakannya;
3. Feedback dari pemangku kepentingan yang responsif terhadap berbagai kegiatan fasilitasi yang dilakukan LLDIKTI XI dalam rangka pencapaian target IKU tersebut.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja :

1. Melaksanakan sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0 bekerjasama dengan BAN-PT tanggal 14 Juli 2025;
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi;
4. Menyebarkan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi;
5. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0;
6. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT) kepada PT yang belum terakreditasi;
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTS baru / PTS Hasil Perubahan Bentuk, Penggabungan, atau Penyatuan;
8. Melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi Legalitas Badan Penyelenggara PTS;
9. Melaksanakan kegiatan fasilitasi unsur penunjang penguatan akreditasi perguruan tinggi seperti Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dan lainnya;
10. Pendampingan terhadap Badan Penyelenggara/Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan.



Dokumentasi pendampingan akreditasi Perguruan Tinggi oleh tim Fasilitator LLDIKTI Wilayah XI

Kendala/Permasalahan :

1. Minimnya sarana dan prasarana : Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa;
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia : Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, dan jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi;
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat : Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar;
4. Pencapaian Tridharma : Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat;
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.

Langkah Antisipasi dan Strategi :

1. Melakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana;
2. Melakukan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen;
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan;
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0;
5. Melakukan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi dan SPMI;
6. Pemantauan proses 7 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang berproses.

Sasaran Kinerja Utama II

Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Ketercapaian sasaran kinerja utama "Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi" ditandai dengan terlaksananya kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (sebelum Kemdiktisaintek). Seperti implementasi PTS terhadap kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (sekarang menjadi kampus berdampak) dan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi. Kebijakan pendidikan tersebut dijadikan sebagai indikator kinerja utama untuk sasaran ini. Kebijakan ini masih diukur berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 karena regulasi terbaru tentang Indikator Kinerja Utama LLDIKTI belum ditetapkan.

Sasaran kinerja utama ini dilaksanakan oleh Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan dibantu oleh Tim Kerja Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah XI. Pada tahun 2025, berdasarkan data pelaporan PDDIKTI diketahui sebanyak 31,82% atau 49 PTS yang ada dilingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi, sebesar 4,27% bobot mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 pada PTS di LLDIKTI Wilayah XI telah menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi, dan sebanyak 33,77% atau 52 PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.	28,93%	31,82%	109,99%
	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; meraih prestasi.	3,26%	4,27%	130,98%
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi.	32%	33,77%	105,53%



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.1

PERSENTASE PTS YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

Indikator ini dirancang untuk mengukur sejauh mana efektivitas sosialisasi dan implementasi kebijakan "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah LLDIKTI Wilayah XI (sekarang dikenal dengan nama program Kampus Berdampak). Program ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi hingga 1 semester (setara dengan 20 SKS) di perguruan tinggi yang sama, atau hingga 2 semester (setara dengan 40 SKS) di perguruan tinggi berbeda. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, seperti magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, proyek independen, serta membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T). Tujuan utama program ini adalah untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka secara langsung di lapangan untuk menghasilkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Demi kemajuan pendidikan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk dapat terlibat dalam kebijakan ini mahasiswa dimaksud harus berasal dari program studi yang terakreditasi, dan aktif yang terdaftar pada PDDikti.



Adapun kriteria dan formula perhitungan capaian dari indikator ini adalah :

Kriteria 1



Mahasiswa S1/D4/D3

Batas minimal yang dapat diakui adalah mahasiswa paling sedikit 10 (sepuluh) SKS telah melaksanakan kegiatan pembelajaran diluar program studi (Program MBKM). Sumber data dari pelaporan PDDIKTI.

Kriteria 2



Mahasiswa D1 dan D2

Batas minimal yang dapat diakui adalah mahasiswa paling sedikit 5 (lima) SKS telah melaksanakan kegiatan pembelajaran diluar program studi (Program MBKM). Sumber data dari pelaporan PDDIKTI.

Formula Perhitungan Capaian Kinerja



$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

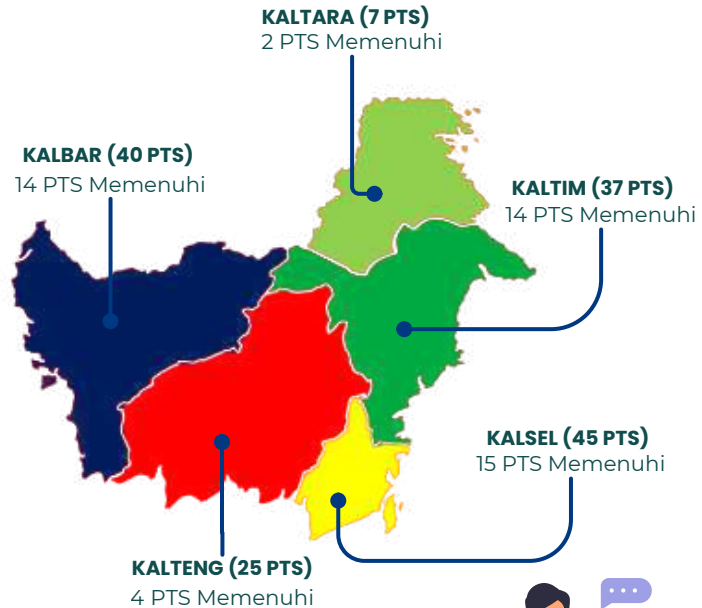


Capaian kinerja dari indikator ini diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025. Pelaksanaan magang dimulai sejak 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025, bekerjasama dengan para mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. LLDIKTI Wilayah XI telah memperkenalkan Program Magang Berdampak 2025 sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep "Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada Program Magang Berdampak ada 397 lowongan dari Instansi, Industri mitra, dan bidang usaha yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Inisiatif ini memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar lingkup perkuliahan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh melalui pelaporan PDDIKTI sampai dengan 31 Desember 2025, telah terdapat 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan dengan total 8.071 Mahasiswa telah memenuhi kriteria indikator kinerja Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

Pembelajaran diluar program studi :

1. Magang/Praktik Kerja
2. Proyek di Desa
3. Mengajar di Sekolah
4. Pertukaran Pelajar
5. Penelitian atau riset
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independen
8. Proyek Kemanusiaan
9. Bela Negara



Formula Perhitungan
Capaian Kinerja

$$\frac{49}{154} \times 100 = 31,82\%$$



Target PK

28,93%



Capaian

31,82%

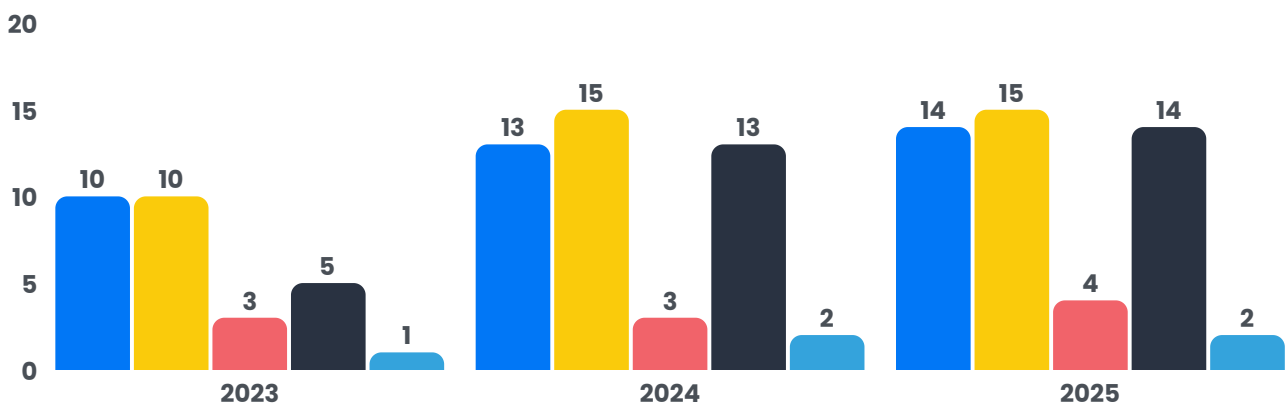


%

109,99%

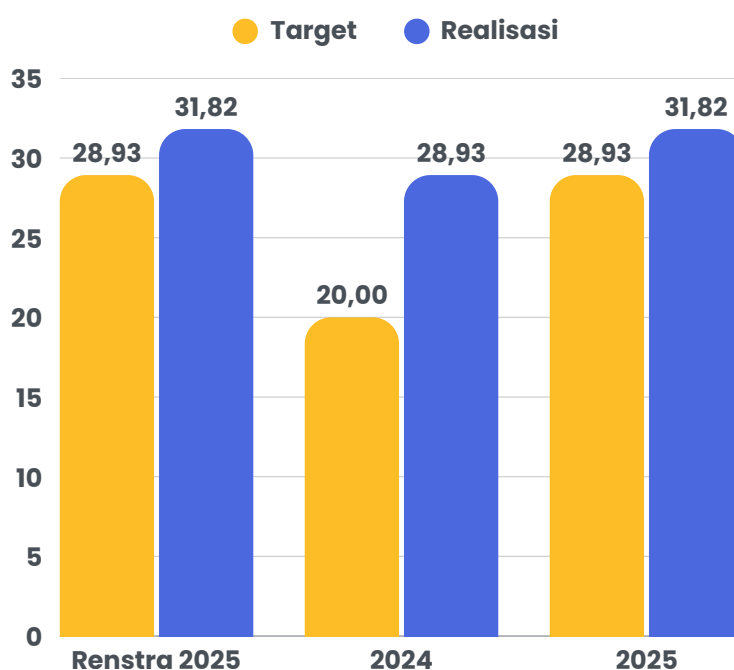
Implementasi pembelajaran diluar program studi pada PTS di Kalimantan 3 tahun terakhir

● Kalimantan Barat ● Kalimantan Selatan ● Kalimantan Tengah
● Kalimantan Timur ● Kalimantan Utara



Dari hasil pengukuran diketahui capaian target indikator Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi tahun 2025 adalah sebesar 31,82%, capaian ini apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 28,93% dapat dikatakan sudah berhasil dengan tingkat capaian 109,99%. Dan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025, capaian ini telah berhasil mencapai target Renstra 2025 sebesar 28,93% dengan tingkat keberhasilan 109,99%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk intensifikasi sosialisasi kebijakan pembelajaran diluar program studi kepada PTS dan mahasiswa, penguatan kerja sama dengan mitra strategis, serta dukungan dalam bentuk bimbingan teknis dan fasilitasi pelaporan data di PDDIKTI. Meski demikian, capaian ini juga mengungkapkan adanya tantangan yang memerlukan perhatian lebih untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan program di masa mendatang.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra

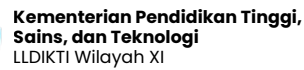


Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Ketersediaan data pelaporan pembelajaran di luar program studi pada PDDIKTI memungkinkan pengukuran capaian indikator kinerja tahun 2025;
2. Sebagian PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah memenuhi kriteria indikator berdasarkan data PDDIKTI; dan
3. Indikator tetap dapat diukur karena struktur pelaporan pembelajaran di luar program studi masih tersedia dalam sistem PDDIKTI.

Daftar PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi :

NO	Nama PTS	Mahasiswa Memenuhi Kriteria
1	Universitas PGRI Pontianak	683
2	Institut Sains Dan Bisnis Internasional Singkawang	118
3	Institut Shanti Bhuana	210
4	Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat	58
5	Politeknik Aisyiyah Pontianak	28
6	Politeknik Hasnur	72
7	Politeknik Tonggak Equator Pontianak	458
8	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	271
9	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	24
10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	3
11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia	11
12	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara	1
13	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai	248
14	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang	2
15	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang	2
16	STIMI Banjarmasin	20
17	STKIP Persada Khatulistiwa	206
18	STMIK Banjarbaru	61
19	STMIK Palangka Raya	37
20	STMIK Widya Cipta Dharma	90
21	Universitas Darwan Ali	540



NO	Nama PTS	Mahasiswa Memenuhi Kriteria
22	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin	1778
23	Universitas Kaltara	20
24	Universitas Kapuas	487
25	Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo	26
26	Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong	11
27	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	207
28	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	922
29	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	158
30	Universitas Muhammadiyah Pontianak	375
31	Universitas Mulia	33
32	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	12
33	Universitas Oso	74
34	Universitas Panca Bhakti	270
35	Universitas Sari Mulia	199
36	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	51
37	Politeknik Bisnis Kaltara	11
38	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	196
39	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin	15
40	Sekolah Tinggi Teknologi Migas	3
41	STIKES Suaka Insan	6
42	STKIP Paris Barantai	30
43	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	13
44	Universitas Achmad Yani Banjarmasin	16

NO	Nama PTS	Mahasiswa Memenuhi Kriteria
45	Universitas Balikpapan	7
46	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat	4
47	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo	1
48	Universitas Antakusuma	1
49	Universitas Muhammadiyah Berau	2
	TOTAL	8.071

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja :

1. Pendampingan PTS terkait pelaporan pembelajaran diluar program studi pada PDDIKTI, LLDIKTI Wilayah XI memberikan pendampingan teknis agar operator PDDIKTI di setiap PTS dapat melaporkan aktivitas pembelajaran diluar prodi mahasiswa (seperti magang, proyek desa, atau pertukaran pelajar) dengan benar agar diakui secara administratif dan menambah tingkat capaian kinerja;
2. Memfasilitasi kerjasama PTS dengan dunia usaha dan industri.

Kendala/Permasalahan :

1. Pengukuran indikator sepenuhnya berbasis data PDDIKTI sehingga perkembangan pelaksanaan di tingkat perguruan tinggi tidak dapat dipantau secara langsung;
2. Masih terdapat perbedaan tingkat ketepatan dan kelengkapan pelaporan aktivitas pembelajaran di luar program studi oleh PTS pada PDDIKTI; dan
3. Adanya jeda waktu pemutakhiran data PDDIKTI mempengaruhi keterbacaan capaian indikator.

Langkah Antisipasi dan Strategi :

- 1.Mendorong peningkatan ketepatan dan kelengkapan pelaporan PTS terhadap aktivitas pembelajaran di luar program studi pada PDDIKTI;
- 2.Melakukan analisis dan pemetaan PTS berdasarkan kontribusi data PDDIKTI terhadap capaian indikator; dan
- 3.Memanfaatkan hasil analisis data PDDIKTI sebagai dasar pembinaan dan pendampingan PTS.



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.1

PERSENTASE MAHASISWA S1 ATAU D4/D3/D2/D1 PTS YANG MENJALANKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI ATAU MERAHAI PRESTASI

Sama dengan indikator sebelumnya, indikator ini juga digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan sosialisasi efektif terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" yang menjadi program prioritas Kemendikbudristek sebelum berubah menjadi program kampus berdampak oleh Kemdiktisaintek berdasarkan persentase dari jumlah mahasiswa. Kriteria yang dipersyaratkan untuk memenuhi indikator ini adalah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau mahasiswa yang berhasil meraih prestasi. Akumulasi jumlah mahasiswa dikonversi melalui sistem pembobotan sesuai dengan formula pada Kepmendikbudristek 210/M/2023 sebagai berikut :

Matriks Bobot SKS

1

SKS $\geq$ 20 Bobot : **1.00**

2

$10 \leq \text{SKS} < 20$ Bobot : 0.50



Matriks Bobot Prestasi

1

INTERNASIONAL Bobot : **0.75**

2

NASIONAL Bobot : **0.50**

3

PROVINSI Bobot : **0.25**

”Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti Pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1 ”

Adapun kriteria dan formula perhitungan capaian dari indikator ini adalah :

Kriteria 1



Mahasiswa S1/D4/D3

Batas minimal yang dapat diakui adalah mahasiswa paling sedikit 10 (sepuluh) SKS telah melaksanakan kegiatan pembelajaran diluar program studi (Program MBKM). Sumber data dari pelaporan PDDIKTI.

Kriteria 2



Mahasiswa D1 dan D2

Batas minimal yang dapat diakui adalah mahasiswa paling sedikit 5 (lima) SKS telah melaksanakan kegiatan pembelajaran diluar program studi (Program MBKM). Sumber data dari pelaporan PDDIKTI.

Kriteria 3



Prestasi

- Juara I - III pada kompetensi atau lomba tingkat Internasional, Nasional, dan Provinsi;
- Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, industri, dan masyarakat;
- Mendapatkan sertifikat Kompetensi Internasional. Sumber data dari PDDIKTI

Formula Perhitungan
Capaian Kinerja



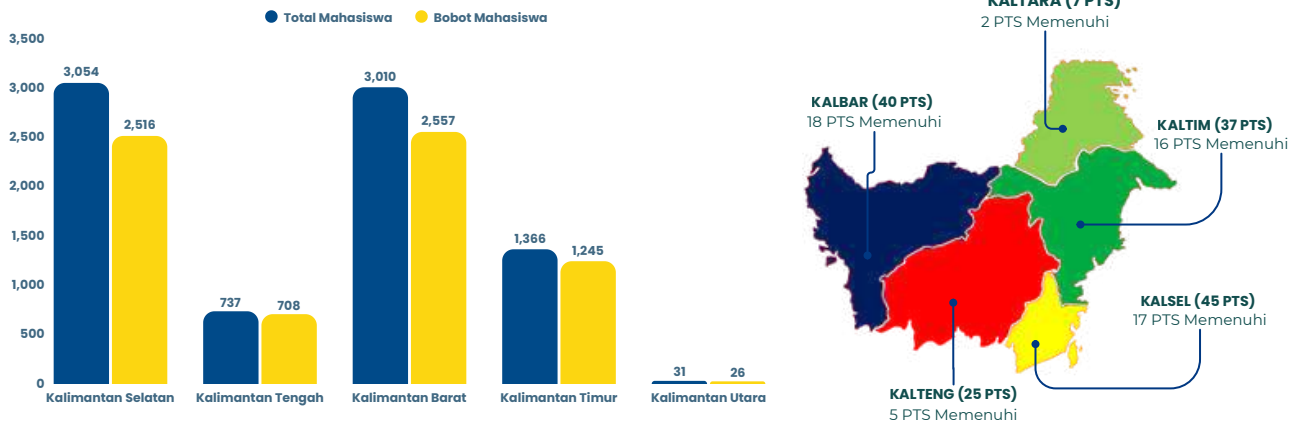
$$\frac{\sum_{i=1}^i nk_i}{t} \times 100$$

n = jumlah mahasiswa PTS di LLDIKTI yang memenuhi kriteria
k = Pembobotan permahasiswa
t = total jumlah mahasiswa di wilayah kerja LLDIKTI

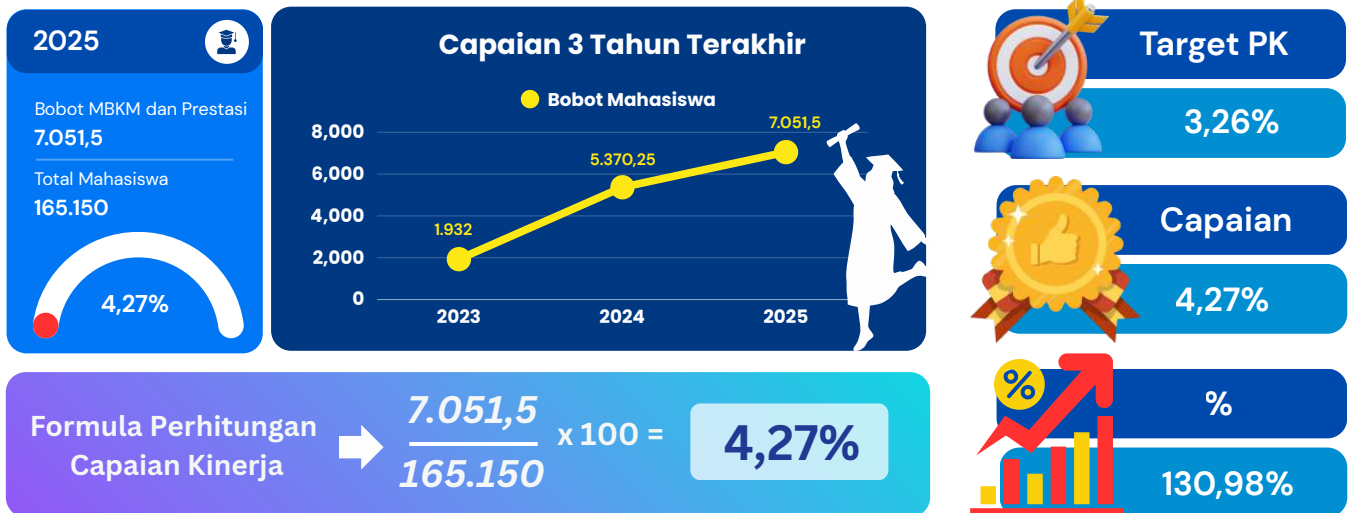
Kebijakan Kampus Berdampak merupakan penyempurnaan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sebelumnya diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Transisi ini mulai ditekankan secara masif oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada tahun 2025. Mahasiswa tidak lagi sekadar "magang untuk belajar," tetapi "magang untuk berkontribusi." Kurikulum diarahkan agar berbasis proyek (Project-Based Learning) yang menjawab tantangan riil di lapangan. Evaluasi MBKM menunjukkan banyak mahasiswa mendapatkan pengalaman, namun dampaknya terhadap pembangunan nasional masih perlu diperkuat secara sistematis yang disempurnakan melalui program kampus berdampak. Namun regulasi terkait pengukuran program kampus berdampak belum ditetapkan sehingga pengukuran indikator kinerja masih mengacu kepada Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023.

Berdasarkan dari data yang diperoleh melalui pelaporan PDDIKTI sampai dengan 31 Desember 2025, telah terdapat 4,27% atau 7.051,5 bobot mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator kinerja Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; meraih prestasi.

Capaian Pembelajaran diluar Program Studi dan Prestasi Mahasiswa



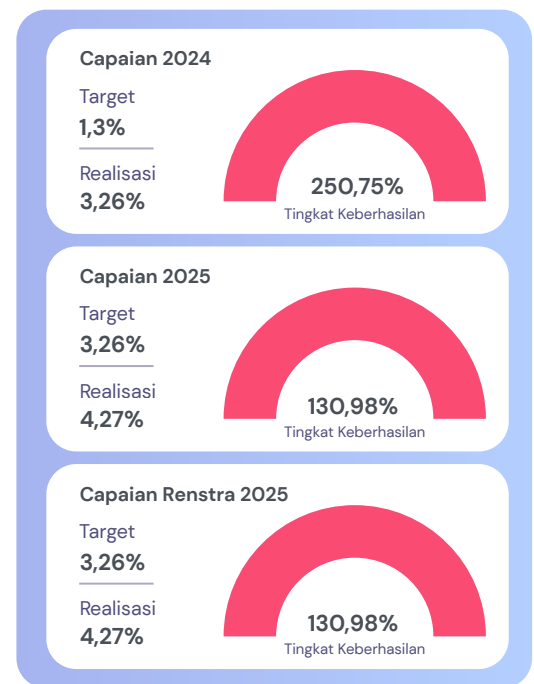
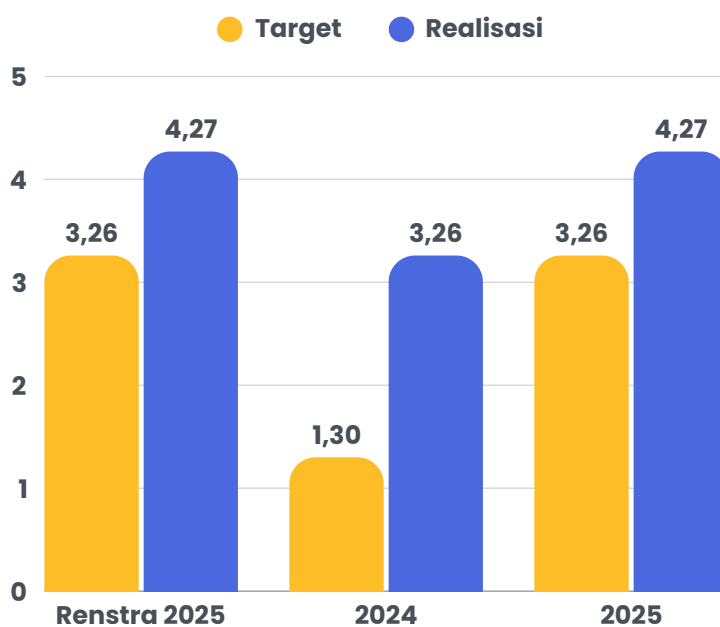
Sebaran capaian Pembelajaran diluar program studi dan Prestasi Mahasiswa di Kalimantan



Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi tahun 2025 adalah 4.27% atau 7.051,5 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 3.26% dengan tingkat capaian 130,98%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi.

Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra



Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Pelaporan data capaian pada PDDIKTI tersedia sehingga capaian indikator dapat diukur melalui aplikasi eSAKIP;
2. Sebagian mahasiswa PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah tercatat memenuhi kriteria indikator berdasarkan pelaporan kegiatan dan prestasi mahasiswa pada PDDIKTI; dan
3. Pendampingan berkala pelaporan data mahasiswa oleh LLDIKTI Wilayah XI.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja :

1. Pendampingan PTS terkait pelaporan pembelajaran diluar program studi pada PDDIKTI;
2. Memfasilitasi kerjasama PTS dengan dunia usaha dan industri;
3. Melaksanakan kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi.

Daftar PTS yang memenuhi kriteria capaian IKU :

NO	NAMA PTS	MAHASISWA MEMENUHI KRITERIA	BOBOT CAPAIAN
1	Universitas PGRI Pontianak	436	224,5
2	Institut Sains Dan Bisnis Internasional Singkawang	122	97,75
3	Institut Shanti Bhuana	210	195
4	Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat	58	58
5	Politeknik Aisyiyah Pontianak	39	31,75
6	Politeknik Hasnur	73	64,75
7	Politeknik Tonggak Equator Pontianak	458	454,5
8	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	284	185,75
9	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	24	14,5
10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	7	4
11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia	13	10,5
12	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong	1	1
13	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai	254	244,75
14	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang	2	1
15	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang	2	2
16	STIMI Banjarmasin	21	19,75
17	STKIP Persada Khatulistiwa	209	181,5
18	STMIK Banjarbaru	69	55,5
19	STMIK Palangka Raya	37	30,5
20	STMIK Widya Cipta Dharma	96	93
21	Universitas Darwan Ali	540	531
22	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin	1778	1467,5
23	Universitas Kaltara	20	15
24	Universitas Kapuas	487	457
25	Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo	26	20
26	Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong	11	9,5
27	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	207	183
28	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	921	850,5
29	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	158	145,5
30	Universitas Muhammadiyah Pontianak	375	328,5
31	Universitas Mulia	33	32
32	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	12	9
33	Universitas Oso	75	60
34	Universitas Panca Bhakti	270	266
35	Universitas Sari Mulia	219	190,75
36	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	51	44
37	Politeknik Bisnis Kaltara	11	11

NO	NAMA PTS	MAHASISWA MEMENUHI KRITERIA	BOBOT CAPAIAN
38	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	196	179,5
39	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin	28	20,5
40	Sekolah Tinggi Teknologi Migas	5	2,5
41	Institut Kesehatan Suaka Insan	9	6,5
42	STKIP Paris Barantai	38	32
43	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	13	9
44	Universitas Achmad Yani Banjarmasin	16	8,5
45	Universitas Balikpapan	20	12,5
46	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat	4	4
47	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo	1	0,5
48	Universitas Antakusuma	1	0,5
49	Universitas Muhammadiyah Berau	3	2,5
50	Akademi Farmasi Yarsi Pontianak	6	2,75
51	Universitas PGRI Pontianak	205	165,5
52	STMIK Pontianak	1	0,25
53	STIKES Yarsi Pontianak	28	9,25
54	STIKES Darul Azhar Batulicin	2	0,5
55	Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan	7	2,25
56	Politeknik Sampit	1	0,25
57	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda	1	0,5
56	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau	4	1,5
	TOTAL	8.198	7.051,5

Kendala/Permasalahan :

1. Capaian indikator sangat bergantung pada ketepatan dan kelengkapan pelaporan data mahasiswa pada PDDIKTI;
2. Belum seluruh kegiatan dan prestasi mahasiswa dilaporkan secara optimal oleh PTS; dan
3. Adanya perbedaan pemahaman PTS terhadap kriteria dan pembobotan prestasi mahasiswa yang mempengaruhi keterbacaan data indikator.

Langkah Antisipasi dan Strategi :

1. Melakukan pemetaan PTS berdasarkan besaran kontribusi data mahasiswa terhadap capaian indikator;
2. Mendorong peningkatan ketepatan dan kelengkapan pelaporan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan prestasi mahasiswa pada PDDIKTI; dan
3. Memanfaatkan hasil pemilihan mahasiswa berprestasi sebagai dasar pembinaan PTS dalam peningkatan pelaporan prestasi mahasiswa.



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.3

PERSENTASE PTS YANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTIINTOLERANSI, ANTIKEKERASAN SEKSUAL, ANTIPERUNDUNGAN, ANTINARKOBA DAN ANTIKORUPSI

Indikator ini mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan sosialisasi efektif terkait dengan implementasi penanganan kekerasan pada perguruan tinggi. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang menggantikan dan memperluas cakupan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (tentang PPKS) istilah PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) diubah menjadi PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) yang merupakan langkah evolusioner dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman secara menyeluruh.

Tujuan utama perubahan ini adalah:

1. **Integrasi Penanganan** : Agar kampus tidak perlu membentuk banyak kepanitiaan terpisah untuk setiap jenis kekerasan.
2. **Kepastian Hukum** : Memberikan payung hukum yang kuat untuk menindak pelaku perundungan atau intoleransi yang selama ini mungkin hanya dijatuhi sanksi etik ringan.
3. **Budaya Kampus yang Inklusif** : Menjamin bahwa kampus adalah ruang yang merdeka dari segala bentuk intimidasi, bukan hanya intimidasi seksual.

Sebagai upaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mendukung implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) secara resmi meluncurkan aplikasi SAHABAT sebagai portal pengelolaan PPKPT pada setiap perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah XI telah memberikan Bimbingan Teknis kepada seluruh PTS terkait tata cara penggunaan aplikasi tersebut.

Dengan adanya PPKPT, mahasiswa dan staf memiliki alur pelaporan yang lebih luas. Jika terdapat adanya praktik senioritas yang berlebihan (perundungan) atau diskriminasi berbasis SARA (intoleransi), Satgas PPKPT memiliki kewenangan resmi untuk memproses laporan tersebut, sama seriusnya dengan laporan kekerasan seksual.

Langkah awal yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam implementasi indikator ini adalah pembentukan Satgas PPKPT. Satgas ini adalah "garda terdepan" di dalam kampus yang memiliki mandat resmi dari negara (melalui Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024) untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apa pun di kampus baik itu kekerasan seksual, perundungan (bullying), maupun intoleransi.

Adapun kriteria dan formula perhitungan capaian dari indikator ini adalah :

Kriteria 1

Antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan

PTS telah menerapkan :

- Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran yang ditetapkan melalui Learning Management System;
- Menerapkan paling sedikit 1 bentuk kebijakan Antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan sesuai Kepmendikbudristek 210/M/2023.



Kriterija 2



Anti Narkoba

PTS setidaknya menerapkan 1 (satu) kebijakan antinarkoba :

- memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau
- melakukan sosialisasi antinarkoba.

Kriterija 3



Anti Korupsi

PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan antikorupsi terikut:

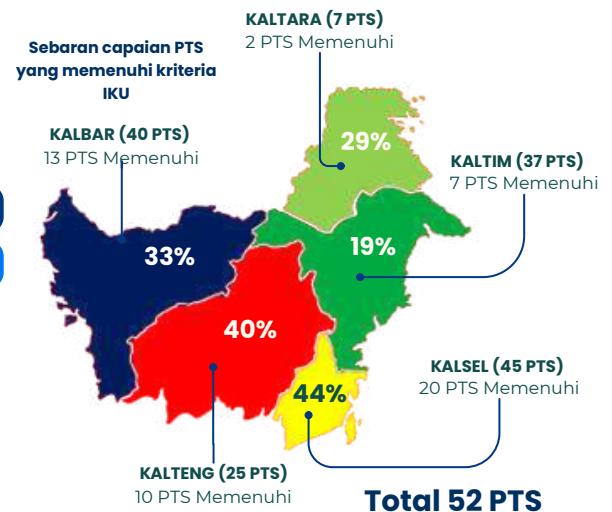
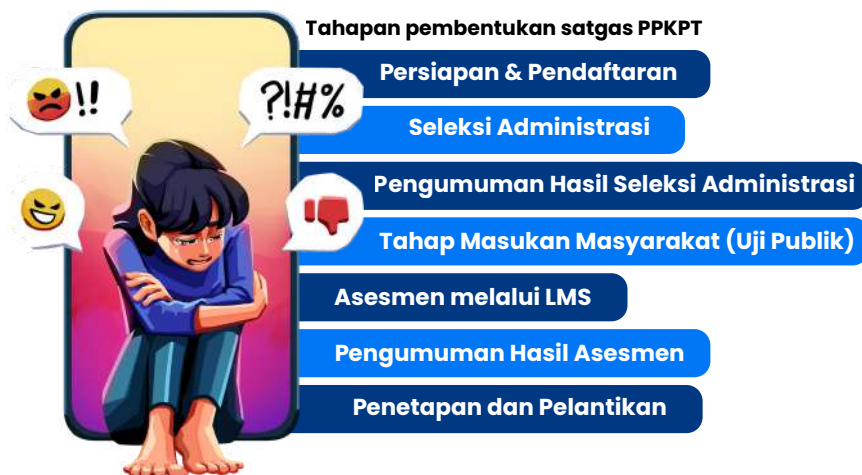
- menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi;
- memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
- memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
- mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/atau
- memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).

Formula Perhitungan
Capaian Kinerja

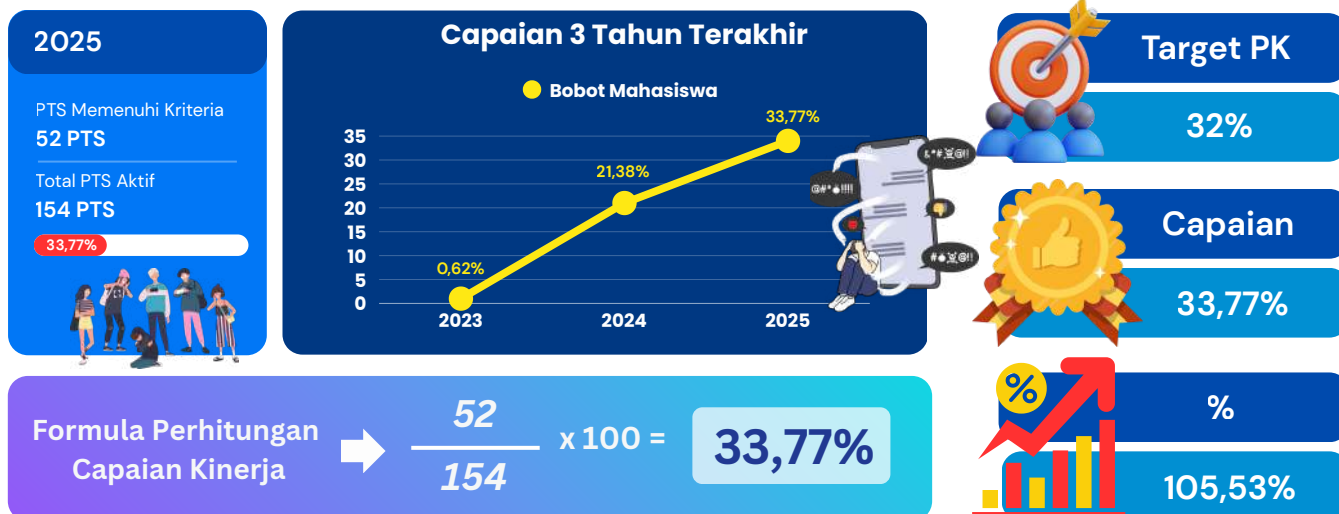
$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan
antiintoleransi, antikekerasan seksual,
antiperundungan, antinarkoba, dan
antikorupsi
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, mekanisme pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) kini telah disederhanakan dibandingkan aturan sebelumnya (Satgas PPKS). Salah satu perubahan paling signifikan adalah dihapuskannya tahapan Panitia Seleksi (Pansel). Kini, Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab langsung atas rekrutmen dengan dukungan tim sekretariat. Berikut adalah tahapan pembentukan Satgas PPKPT sesuai aturan terbaru :

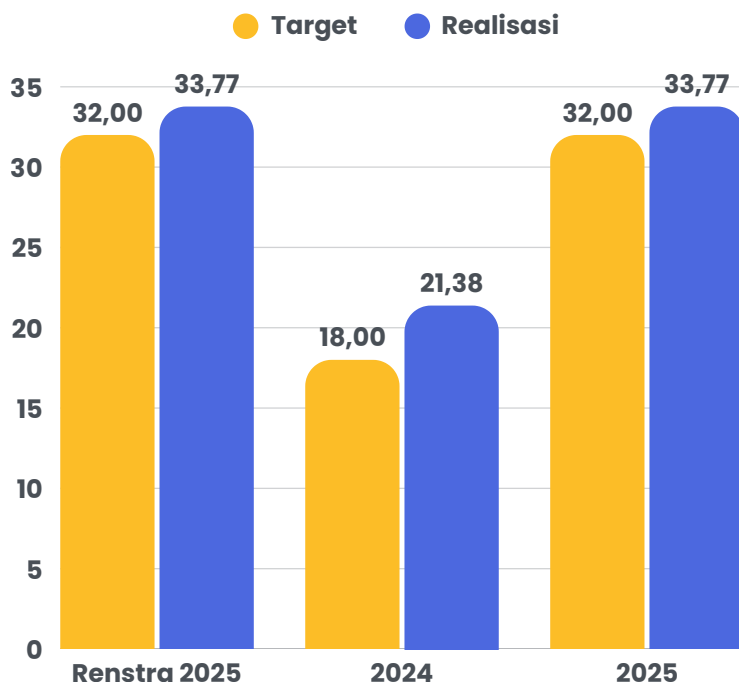


Berdasarkan data tersebut dari total 154 PTS yang ada di Kalimantan, sebanyak 52 PTS telah membentuk satuan tugas dan mengimplementasikan kebijakan anti narkoba serta anti korupsi sesuai dengan Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023. Dari data sebaran di Kalimantan terlihat bahwa secara persentase PTS pada Provinsi Kalimantan Timur (19%) paling kecil dalam penerapan kebijakan ini. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena pemahaman PTS yang belum optimal terhadap kriteria yang dipersyaratkan. Pemenuhan kriteria IKU ini bukan sekadar masalah dokumen, melainkan pembuktian adanya kebijakan nyata dan tindakan preventif. PTS dengan jumlah mahasiswa besar seperti di Kalimantan Timur mungkin menghadapi tantangan lebih berat dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut pada bulan Desember 2025 kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sahabat dilaksanakan secara hybrid bertempat di PTS Provinsi Kalimantan Timur.



Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada tahun 2025 adalah 33,77% atau 52 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 32% dengan tingkat capaian keberhasilan 105,53%. Selama 3 tahun terakhir jumlah PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan ini meningkat secara signifikan. Capaian ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran dan komitmen pimpinan PTS terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai integritas dan keamanan kampus. Sebagian besar PTS yang baru melaporkan telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual dan intoleransi. Beberapa kampus juga mulai memasukkan materi antikorupsi dan antinarkoba dalam kegiatan orientasi mahasiswa serta penguatan karakter di lingkungan akademik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah PTS yang memerlukan pendampingan lanjutan untuk penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal. Penerapan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi di Kalimantan melalui LLDIKTI Wilayah XI menghadapi PTS yang sangat luas, perubahan aturan dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menjadi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 menuntut adaptasi cepat oleh PTS, dan SDM pada PTS yang terbatas. Kemudian LLDIKTI Wilayah XI juga harus memberikan pemahaman untuk mengubah stigma kampus bahwa melaporkan kekerasan adalah "aib" bagi institusi melainkan sebuah keharusan untuk menjaga lingkungan kampus yang aman dan nyaman kepada seluruh civitas akademika.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra



Tampilan dashboard aplikasi sahabat <https://sahabat.kemdiktisaintek.go.id>



Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Adanya kebijakan nasional melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memperluas cakupan PPKS menjadi PPKPT sebagai dasar implementasi kebijakan di perguruan tinggi;
2. Sebagian PTS telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan Satgas PPKPT, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan; dan
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis oleh LLDIKTI Wilayah XI, termasuk pemanfaatan aplikasi SAHABAT, mendorong peningkatan pelaporan dan keterpenuhan indikator.

Daftar PTS yang telah menerapkan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi :

NO	NAMA PTS	PROVINSI
1	STKIP Persada Khatulistiwa	Kalimantan Barat
2	STIE Madani Balikpapan	Kalimantan Timur
3	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long	Kalimantan Timur
4	Politeknik Unggulan Kalimantan	Kalimantan Selatan
5	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin	Kalimantan Selatan
6	Politeknik Kesdam VI Banjarmasin	Kalimantan Selatan
7	Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
8	STIE YBPK Palangka Raya	Kalimantan Tengah
9	STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati	Kalimantan Utara
10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin	Kalimantan Selatan
11	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	Kalimantan Selatan
12	Universitas Oso	Kalimantan Barat
13	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia	Kalimantan Selatan
14	Universitas PGRI Palangka Raya	Kalimantan Tengah
15	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh	Kalimantan Tengah
16	Universitas Borneo Lestari	Kalimantan Selatan
17	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	Kalimantan Tengah
18	Institut Teknologi Keling Kumang	Kalimantan Barat
19	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura	Kalimantan Selatan
20	IKIP PGRI Kaltim	Kalimantan Timur
21	Universitas PGRI Pontianak	Kalimantan Barat
22	Politeknik Hasnur	Kalimantan Selatan
23	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin	Kalimantan Selatan
24	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	Kalimantan Timur
25	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit	Kalimantan Tengah
26	Universitas Cahaya Bangsa	Kalimantan Selatan
27	Universitas Mulia	Kalimantan Timur
28	STMIK Pontianak	Kalimantan Barat
29	STIMI Banjarmasin	Kalimantan Selatan
30	STIKES Husada Borneo	Kalimantan Selatan
31	Politeknik Kaltara	Kalimantan Utara
32	STIKES Eka Harap	Kalimantan Tengah
33	Politeknik Indonesia Banjarmasin	Kalimantan Selatan
34	Universitas Achmad Yani Banjarmasin	Kalimantan Selatan



Dokumentasi kegiatan pendampingan implementasi kebijakan PPKPT pada PTS

Kendala/Permasalahan :

1. Belum seluruh PTS menyelesaikan pembentukan Satgas PPKPT dan penyusunan regulasi internal sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024;
2. Masih terdapat PTS yang mengalami kendala dalam penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal implementasi kebijakan; dan
3. Perbedaan tingkat kesiapan sumber daya manusia PTS dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan PPKPT secara menyeluruh.

Langkah Antisipasi dan Strategi :

1. Melanjutkan pendampingan dan pembinaan kepada PTS yang belum memenuhi kriteria indikator, khususnya terkait pembentukan Satgas PPKPT dan penyusunan regulasi internal;
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan PPKPT melalui pemanfaatan aplikasi SAHABAT; dan
3. Mendorong peningkatan kualitas dan ketertiban pelaporan implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.

Sasaran Kinerja Utama III

Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan

"Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan" juga merupakan sasaran kinerja utama dari LLDIKTI terkait dengan fungsinya sebagai fasilitator dalam peningkatan mutu PTS yang ada dalam wilayah kerjanya. Salah satu ciri meningkatnya inovasi perguruan tinggi adalah dengan banyaknya dosen perguruan tinggi yang berkegiatan di luar kampus dan program studi yang bekerja sama dengan mitra. maka dengan demikian, indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran ini terdiri dari dua indikator yaitu persentase jumlah dosen yang melakukan kegiatan diluar kampus dan persentase jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Pada Kepmendikbud 3/M/2021 indikator ini merupakan indikator yang beririsan (Link and Match PTS) sehingga PTS harus memenuhi syarat kriteria dari dua indikator tersebut untuk dapat mencapai kinerja, namun pada Kepmendikbudristek 210/M/2023 indikator ini dipisah menjadi dua indikator yang pencapaiannya tidak lagi secara beririsan.

Sasaran kinerja utama ini dilaksanakan oleh Tim Kerja Sumber Daya untuk indikator jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus dan Tim Kerja Kerjasama untuk jumlah prodi yang bekerja sama dengan mitra. Sampai akhir tahun 2025, terhitung 75,97% atau 117 PTS yang ada di Kalimantan telah mencapai kinerja dengan lebih dari 20% dosennya yang berkegiatan di luar kampus, dan 33,77% atau 52 PTS yang ada di Kalimantan telah mencapai kinerja dengan lebih dari 20% yang program studinya bekerja sama dengan mitra. Kerjasama dengan mitra merupakan salah satu pilar utama dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Dalam instrumen akreditasi 9 Kriteria, aspek kerjasama merupakan komponen inti yang menjadi unsur berbagai standar penilaian. Adapun tingkat ketercapaian indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73%	75,97%	104,07%
	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25%	33,77%	135,08%



INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.1

PERSENTASE PTS YANG BERHASIL MENINGKATKAN KINERJA DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH DOSEN YANG BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

Indikator ini mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan LLDIKTI Wilayah XI dalam meningkatkan PTS yang ada di Kalimantan untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan mutunya yaitu dengan peningkatan jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus atau sering disebut dengan tridarma dosen diluar kampus. Dosen yang berkegiatan di luar kampus adalah implementasi nyata dari sebuah kerjasama Perguruan Tinggi. Terdapat batas minimal yang harus dipenuhi yaitu lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria yang ada pada Kepmendikbudristek 210/M/2023. Adapun kriteria dan formula perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut :

Syarat dan kriteria dosen berkegiatan di luar kampus

- Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi;
 - Kriteria kegiatan tridarma di perguruan tinggi lain;
 - Kriteria bekerja sebagai praktisi;
 - Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
- 

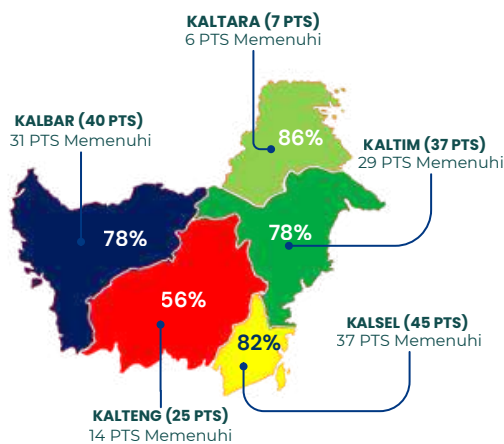
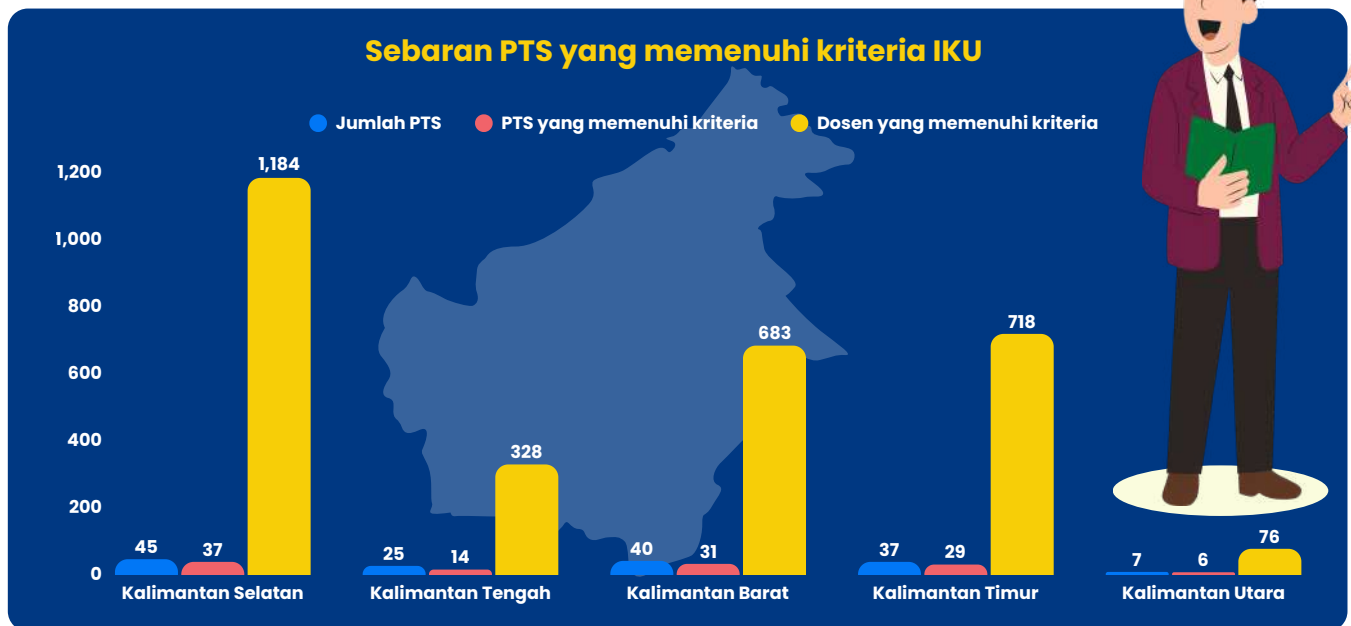
Penjelasan kriteria pada Kepmendikbudristek 210/M/2023



Formula Perhitungan Capaian Kinerja

➡ $\frac{n}{t} \times 100$

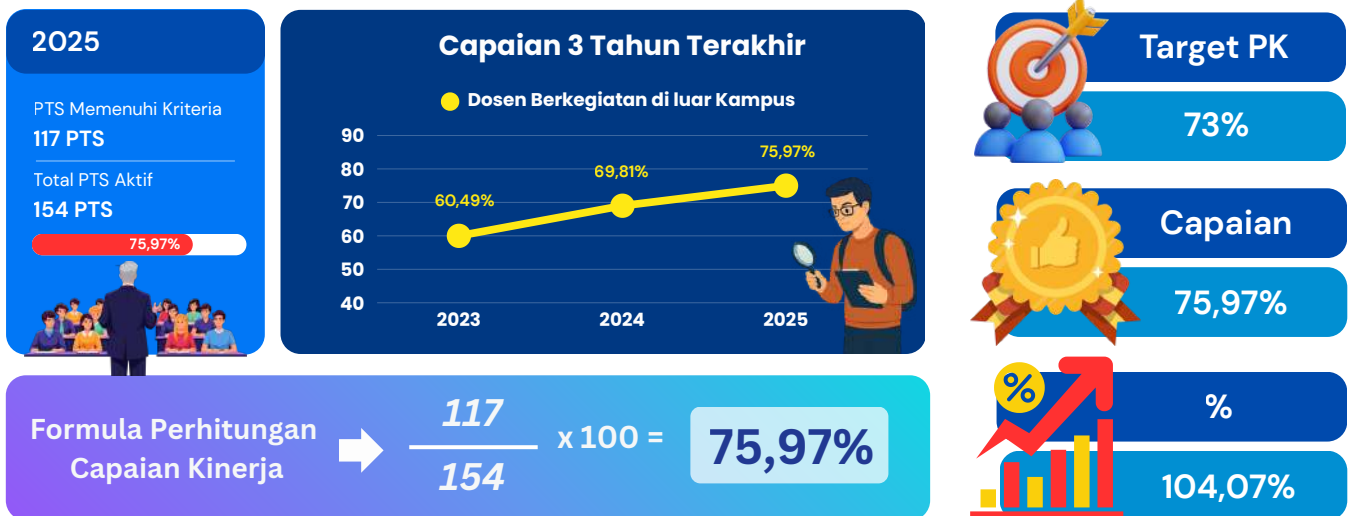
n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan diluar kampus sesuai kriteria minimal
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI



Provinsi	Total PTS	PTS Memenuhi Kriteria	Persentase Capaian
Kalimantan Utara	7	6	86%
Kalimantan Selatan	45	37	82%
Kalimantan Timur	37	29	78%
Kalimantan Barat	40	31	78%
Kalimantan Tengah	25	14	56%
TOTAL	154	117	75,97%

Berdasarkan data tersebut capaian kinerja dosen berkegiatan diluar kampus pada provinsi Kalimantan Tengah (56%) berada dibawah rerata kalimantan (75,97%). Beberapa faktor penyebab rendahnya capaian pada provinsi Kalimantan Tengah :

- **Ketersediaan Mitra Industri dan Institusi Praktisi** : Dibandingkan Kaltim (pusat energi/tambang) atau Kalsel (pusat perdagangan/jasa), keragaman industri di Kalteng mungkin lebih terbatas pada sektor tertentu (seperti perkebunan), sehingga peluang bagi dosen dari berbagai program studi untuk berkegiatan sebagai praktisi menjadi lebih sempit.
- **Kendala Administrasi dan Pencatatan (Pangkalan Data)** : IKU 3 sangat ketat dalam hal administrasi. Banyak dosen di Kalteng mungkin sudah berkegiatan di luar, namun tidak didukung dengan surat tugas resmi atau perjanjian kerjasama (MoA/IA) yang valid di mata sistem penilaian kementerian.
- **Sebaran PTS yang jauh** : PTS pada provinsi kalimantan tengah banyak tersebar di Kabupaten yang sangat jauh dari ibukota sehingga menyulitkan pendampingan langsung oleh LLDIKTI Wilayah XI.



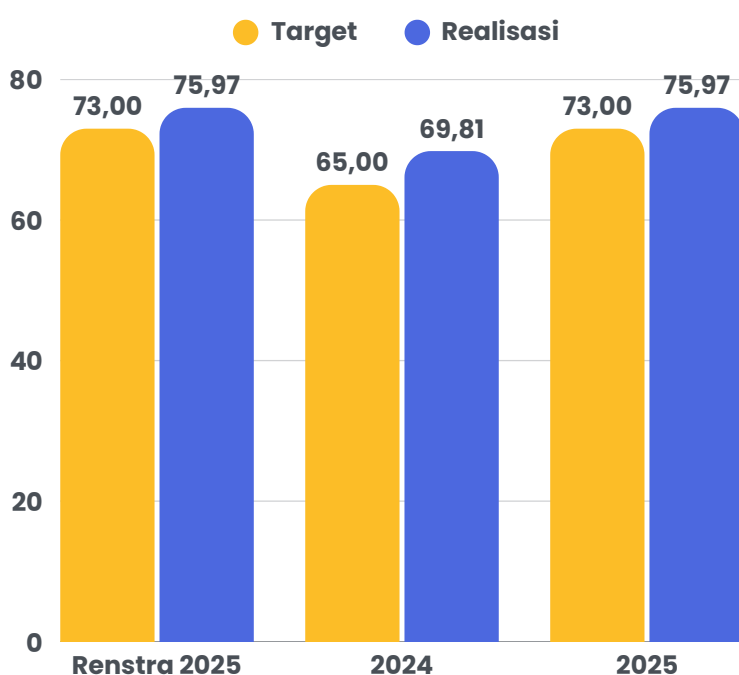
Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada tahun 2025 adalah 75.97% atau 117 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 73 % dengan tingkat capaian keberhasilan sebesar 104,07%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus.

Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar PTS telah menunjukkan kinerja yang selaras dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Peningkatan kinerja yang dimaksud tidak hanya tercermin dari aspek kuantitatif berupa persentase capaian, tetapi juga dari perubahan pola pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang semakin terbuka terhadap keterlibatan eksternal. Kegiatan di luar kampus mencakup aktivitas akademik dan profesional yang relevan dengan bidang keilmuan dosen, seperti penelitian kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan mitra, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri.

Dibandingkan dengan sebelumnya, terjadi penambahan jumlah PTS yang memenuhi kriteria indikator. Kondisi ini menunjukkan adanya tren perbaikan kinerja yang berkelanjutan, sekaligus mencerminkan meningkatnya kemampuan institusi dalam menyesuaikan kebijakan internal dengan arah kebijakan kinerja nasional. PTS yang sebelumnya belum memenuhi indikator mulai melakukan penyesuaian pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dosen diluar kampus sehingga mampu mencapai ambang batas yang ditetapkan.

Capaian ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran institusional terhadap pentingnya kegiatan dosen di luar kampus sebagai bagian dari pengembangan mutu dosen dan peningkatan relevansi perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dalam kegiatan eksternal memberikan dampak positif terhadap pengayaan keilmuan, peningkatan jejaring profesional, serta penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian, capaian IKU tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan target administratif, tetapi juga sebagai indikator kemajuan tata kelola akademik.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra



Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara langsung memungkinkan LLDIKTI memperoleh informasi yang lebih faktual, melakukan pembinaan langsung kepada pimpinan dan dosen, serta meningkatkan pemahaman PTS terkait indikator dan mekanisme pelaporan IKU;
2. Meningkatnya Komitmen Pimpinan PTS terhadap Kebijakan IKU dalam menyesuaikan kebijakan internal, termasuk pemberian izin dan pengakuan terhadap kegiatan dosen di luar kampus, mendorong peningkatan partisipasi dan pelaporan kegiatan dosen;
3. Meningkatnya kemampuan PTS dalam menyajikan bukti dukung kegiatan secara lengkap, valid, dan terdokumentasi dengan baik berkontribusi terhadap meningkatnya akurasi perhitungan capaian persentase IKU.

Daftar PTS yang memenuhi kriteria indikator Dosen Berkegiatan di Luar Kampus :

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH DOSEN	DOSEN BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS	PERSENTASE
1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit	12	11	91.67 %
2	Universitas Sapta Mandiri	18	8	44.44 %
3	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafoeddin	7	5	71.43 %
4	Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan	44	36	81.82 %
5	Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur	47	28	59.57 %
6	Universitas Oso	15	7	46.67 %
7	ASMI Citra Nusantara	18	6	33.33 %
8	Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan	17	7	41.18 %
9	STIE YBPK Palangka Raya	10	6	60 %
10	Universitas Kristen Palangka Raya	46	10	21.74 %
11	Universitas Borneo Lestari	59	32	54.24 %
12	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	20	14	70 %
13	Politeknik Tonggak Equator Pontianak	33	27	81.82 %
14	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin	416	333	80.05 %
15	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	40	40	100 %
16	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang	26	16	61.54 %
17	STIE Madani Balikpapan	19	6	31.58 %
18	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai	26	13	50 %
19	STIKES Darul Azhar Batulicin	20	4	20 %
20	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long	20	7	35 %
21	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long	20	7	35 %
22	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak	14	12	85.71 %

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH DOSEN	DOSEN BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS	PERSENTASE
23	Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia	18	18	100 %
24	STMIK Borneo Internasional	11	8	72.73 %
25	Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama	10	7	70 %
26	Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang	44	44	100 %
27	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok	13	9	69.23 %
28	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	156	82	52.56 %
29	Politeknik Indonesia Banjarmasin	6	6	100 %
30	Institut Shanti Bhuna	31	25	80.65 %
31	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur	68	20	29.41 %
32	Akademi Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang	9	8	88.89 %
33	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin	12	12	100 %
34	Politeknik Kaltara	17	8	47.06 %
35	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	79	30	37.97 %
36	Politeknik Sinar Mas Berau Coal	19	6	31.58 %
37	STMIK Widya Cipta Dharma	30	29	96.67 %
38	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja	24	12	50 %
39	STIKES Yarsi Pontianak	22	16	72.73 %
40	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda	20	8	40 %
41	Universitas PGRI Kalimantan	70	30	42.86 %
42	STMIK Pontianak	42	21	50 %
43	Politeknik Bisnis Kaltara	17	6	35.29 %
44	STIKES Kapuas Raya	19	15	78.95 %
45	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura	28	26	92.86 %
46	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat	71	28	39.44 %

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH DOSEN	DOSEN BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS	PERSENTASE
47	STIKES Dirgahayu Samarinda	32	16	50 %
48	Sekolah Tinggi Teknologi Migas	67	14	20.9 %
49	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi	43	25	58.14 %
50	STIKES Eka Harap	42	33	78.57 %
51	Akademi Keperawatan Bethesda Serukam	10	3	30 %
52	Politeknik Kesdam VI Banjarmasin	10	2	20 %
53	Politeknik Muara Teweh	19	13	68.42 %
54	STIKES Suaka Insan	21	21	100 %
55	STIMI Samarinda	12	10	83.33 %
56	Politeknik Borneo Medistra	5	5	100 %
57	Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjarbaru	12	5	41.67 %
58	STIMI Banjarmasin	26	7	26.92 %
59	Universitas Muhammadiyah Berau	85	37	43.53 %
60	Universitas Mulia	117	31	26.5 %
61	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin	18	17	94.44 %
62	STKIP Paris Barantai	23	12	52.17 %
63	Universitas Kaltara	52	33	63.46 %
64	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia	108	32	29.63 %
65	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak	18	13	72.22 %
66	Akademi Keuangan Dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak	10	4	40 %
67	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	120	103	85.83 %
68	Universitas Sari Mulia	106	101	95.28 %
69	Politeknik Aisyiyah Pontianak	29	19	65.52 %
70	STMIK Indonesia Banjarmasin	28	15	53.57 %

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH DOSEN	DOSEN BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS	PERSENTASE
71	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	169	116	68.64 %
72	Universitas Darwan Ali	38	38	100 %
73	Politeknik Unggulan Kalimantan	26	26	100 %
74	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda	17	5	29.41 %
75	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	226	79	34.96 %
76	Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong	120	52	43.33 %
77	STKIP Persada Khatulistiwa	75	75	100 %
78	Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau	10	6	60 %
79	STIA Bina Banua Banjarmasin	23	6	26.09 %
80	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak	13	10	76.92 %
81	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin	14	14	100 %
82	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	48	12	25 %
83	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh	21	16	76.19 %
84	Universitas Achmad Yani Banjarmasin	93	81	87.1 %
85	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang	17	14	82.35 %
86	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan	14	12	85.71 %
87	STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati	19	10	52.63 %
88	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	166	154	92.77 %
89	STMIK Banjarbaru	44	21	47.73 %
90	STKIP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin	15	10	66.67 %
91	Akademi Farmasi Yarsi Pontianak	19	18	94.74 %
92	STIKES Husada Borneo	13	13	100 %
93	Politeknik Alkon Kalimantan	5	5	100 %

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH DOSEN	DOSEN BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS	PERSENTASE
94	Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat	34	31	91.18 %
95	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai	15	8	53.33 %
96	Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia	35	10	28.57 %
97	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam	22	11	50 %
98	STMIK Palangka Raya	35	21	60 %
99	Akademi Kebidanan Singkawang	6	6	100 %
100	Politeknik Kotabaru	23	19	82.61 %
101	Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan	6	2	33.33 %
102	Universitas PGRI Pontianak	213	55	25.82 %
103	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo	11	4	36.36 %
104	Universitas Panca Bhakti	102	55	53.92 %
105	Universitas Antakusuma	64	18	28.13 %
106	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara	7	4	57.14 %
107	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Nusantara	15	10	66.67 %
108	Universitas Cahaya Bangsa	38	10	26.32 %
109	Universitas Widya Dharma Pontianak	108	42	38.89 %
110	Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo	74	18	24.32 %
111	IKIP PGRI Kaltim	30	12	40 %
112	Politeknik Nusantara Balikpapan	18	4	22.22 %
113	Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan	15	9	60 %
114	Universitas PGRI Palangka Raya	58	20	34.48 %
115	Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda	54	12	22.22 %

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH DOSEN	DOSEN BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS	PERSENTASE
116	Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin	12	3	25 %
117	Universitas Muhammadiyah Pontianak	145	46	31.72 %

Kendala/Permasalahan :

1. Pemahaman sebagian Perguruan Tinggi Swasta terhadap indikator dan jenis kegiatan dosen di luar kampus yang dapat diakui sebagai capaian IKU belum merata;
2. Tata kelola serta kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan dosen diluar kampus belum optimal;
3. Kapasitas SDM pengelola kinerja di tingkat Perguruan Tinggi Swasta masih terbatas;
4. Dukungan kebijakan internal Perguruan Tinggi Swasta belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan IKU;
5. Jejaring kerja sama dengan mitra eksternal masih terbatas;
6. Kendala teknis dalam proses pelaporan dan verifikasi data kinerja;
7. Dinamika kebijakan dan keterbatasan pendanaan mempengaruhi kesiapan Perguruan Tinggi Swasta.

Langkah Antisipasi dan Strategi :

1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan terkait indikator IKU dan kegiatan dosen di luar kampus;
2. Melakukan pendampingan penguatan tata kelola serta standarisasi administrasi dan dokumentasi kegiatan;
3. Meningkatkan kapasitas pengelola kinerja Perguruan Tinggi Swasta melalui bimbingan teknis dan pendampingan;
4. Mendorong penyesuaian kebijakan internal Perguruan Tinggi Swasta agar selaras dengan kebijakan IKU;
5. Memfasilitasi penguatan jejaring kerja sama Perguruan Tinggi Swasta dengan mitra eksternal;
6. Memperkuat monitoring, evaluasi, dan pendampingan teknis pelaporan data kinerja;
7. Menyesuaikan strategi pembinaan dengan dinamika kebijakan dan optimalisasi sumber pendanaan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.2

PERSENTASE PTS YANG BERHASIL MENINGKATKAN KINERJA DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH PROGRAM STUDI YANG BEKERJA SAMA DENGAN MITRA

Indikator ini mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan LLDIKTI Wilayah XI dalam meningkatkan PTS yang ada di Kalimantan untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan mutunya yaitu dengan peningkatan jumlah Program Studi yang bekerjasama dengan mitra. Sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS pada aplikasi Laporan Kerma <https://laporankerma.kemdiktisaintek.go.id> dengan jenis kerja sama PTS pada level program studi. Berdasarkan Kepmendikbudristek 210/M/2023, kriteria pengukuran capaian Kemitraan program studi adalah minimal 20% program studi pada PTS telah melakukan kerjasama dengan mitra. Hubungan antara akreditasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan kerjasama Program Studi merupakan keterkaitan yang sangat erat. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia (seperti LAM atau BAN-PT), kerjasama program studi merupakan unsur instrumen penilaian vital untuk meraih nilai akreditasi yang unggul.



Kriteria Kerjasama Perguruan Tinggi : 20% prodinya telah melakukan kerjasama dengan mitra

► **Kriteria Kemitraan**

Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan Hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran), menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL), program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; kesempatan kerja bagi lulusan; mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; resource sharing sarana dan prasarana; menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; menyelenggarakan program double degree atau joint degree; melakukan kemitraan penelitian.

► **Kriteria Mitra**

Perusahaan multinasional; perusahaan nasional berstandar tinggi; perusahaan teknologi global; perusahaan rintisan (startup company) teknologi; organisasi nirlaba kelas dunia; institusi/organisasi multilateral; perguruan tinggi yang masuk dalam daftar berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; rumah sakit; UMKM; lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.

Adapun kriteria dan formula dari indikator ini adalah :

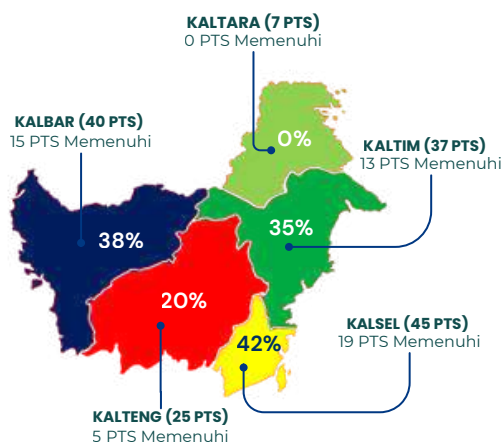
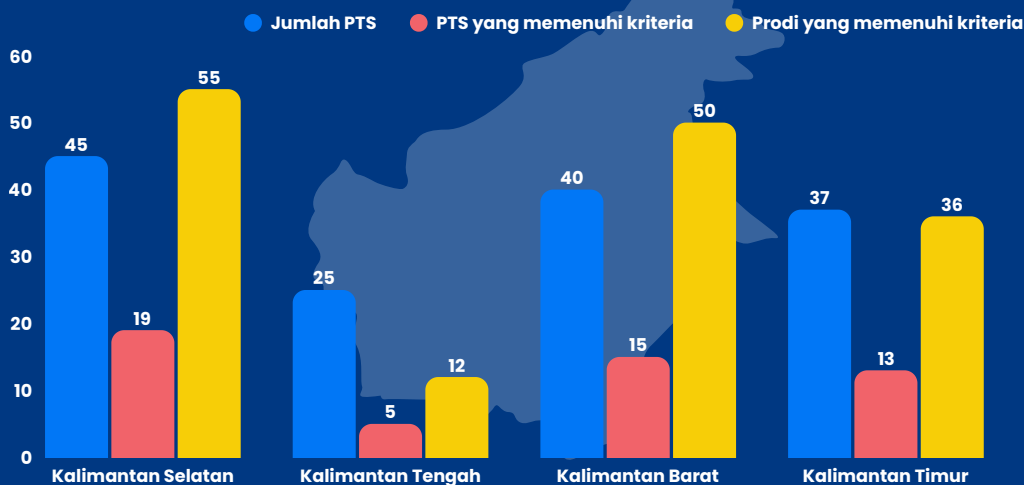
Formula Perhitungan
Capaian Kinerja



$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Sebaran PTS yang memenuhi kriteria IKU



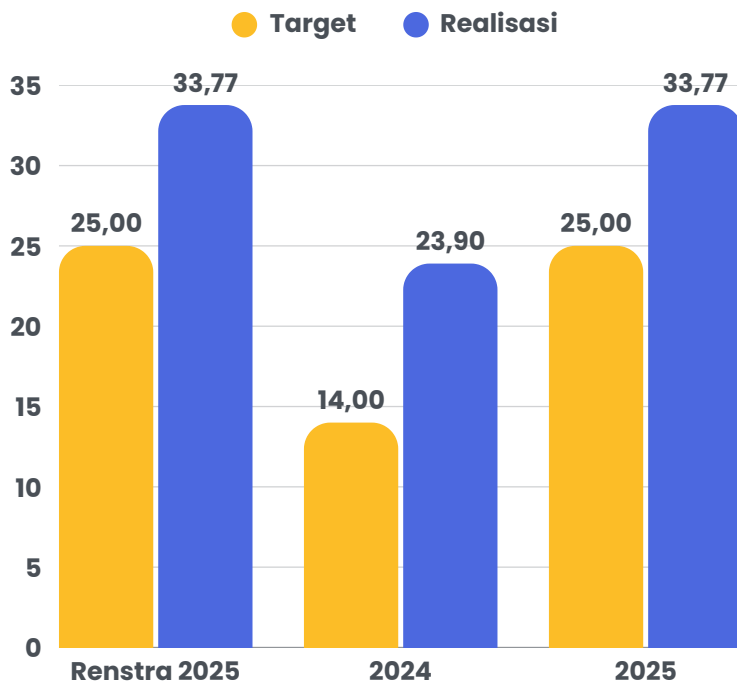
Provinsi	Total PTS	PTS Memenuhi Kriteria	Persentase Capaian
Kalimantan Selatan	45	19	42%
Kalimantan Barat	40	15	38%
Kalimantan Timur	37	13	35%
Kalimantan Tengah	25	5	20%
Kalimantan Utara	7	0	0%
TOTAL	154	52	33,70%

Berdasarkan data tersebut capaian kinerja PTS yang prodinya bekerjasama dengan mitra pada provinsi Kalimantan Utara (0%) dan provinsi Kalimantan Tengah (20%) berada dibawah rerata kalimantan (33,70%). Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah Keterbatasan Ekosistem Industri dan Mitra, apalagi provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Kalimantan. Kemudian tingkat pemahaman sebagian PTS yang masih rendah terhadap dokumen administrasi kerjasama juga menjadi salah satu faktor rendahnya capaian.



Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada tahun 2025 adalah 33,77% atau 52 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 25% dengan tingkat keberhasilan capaian sebesar 135,08%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama yang mengukur Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan PTS dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Kenaikan capaian kinerja dalam 3 tahun terakhir menandakan bahwa kesadaran PTS terhadap pentingnya kerjasama prodi dengan mitra semakin bertambah, kemudian program pembinaan dan pendampingan intensif oleh LLDIKTI untuk memastikan kerjasama perguruan tinggi sudah sejalan dan selaras dengan yang diharapkan oleh Kemdiktisaintek telah berhasil. Pada tahun 2026 LLDIKTI Wilayah XI akan memfokuskan kegiatan kepada provinsi yang secara rerata masih rendah dalam pencapaian target kinerja seperti pada provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Salah satu langkah strategis yang akan dilaksanakan adalah membuka jalan kerjasama PTS dengan mitra yang sudah berskala nasional bahkan internasional seperti yang sudah dilaksanakan LLDIKTI Wilayah XI pada tahun 2025. Namun secara keseluruhan di Kalimantan dengan rerata (33.7%) PTS yang mampu memenuhi standar IKU kerjasama prodi ini menunjukkan bahwa tantangan kerjasama merupakan tantangan regional bagi PTS maupun LLDIKTI Wilayah XI sendiri.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra



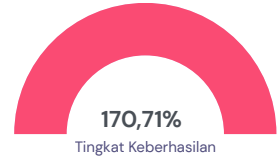
Capaian 2024

Target

14%

Realisasi

23,90%



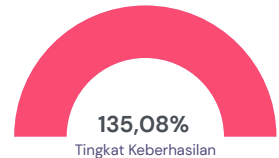
Capaian 2025

Target

25%

Realisasi

33,77%



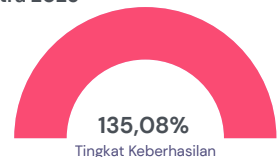
Capaian Renstra 2025

Target

25%

Realisasi

33,77%



Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Pendampingan dan evaluasi secara berkala oleh tim kerja sama di berbagai wilayah Kalimantan sehingga PTS mendapatkan bimbingan langsung terkait pelaporan dan substansi kerja sama;
2. Komitmen pimpinan PTS yang mulai menjadikan kerja sama sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi, sehingga mendorong prodi aktif mencari mitra yang relevan;
3. Fasilitasi dan pengembangan kerja sama secara oleh LLDIKTI Wilayah XI dengan menghadirkan mitra.



Dokumentasi Pendampingan dan Evaluasi Capaian Kerjasama

Daftar PTS yang memenuhi kriteria indikator Prodi yang Bekerjasama dengan Mitra

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH PRODI	PRODI KERJASAMA	PERSENTASE
1	Universitas Kapuas Sintang	7	2	28.57 %
2	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang	2	2	100 %
3	Universitas Cahaya Bangsa	5	5	100 %
4	Universitas Balikpapan	14	4	28.57 %
5	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia	2	2	100 %
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin	2	2	100 %
7	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau	2	2	100 %
8	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda	4	2	50 %
9	Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo	8	2	25 %
10	Universitas Widya Dharma Pontianak	8	6	75 %
11	Universitas Antakusuma	10	5	50 %
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda	3	1	33.33 %
13	Institut Shanti Bhuana	4	3	75 %
14	Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan	3	3	100 %
15	Akademi Kebidanan Betang Asi Raya	1	1	100 %
16	Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan	1	1	100 %
17	Sekolah Tinggi Teknologi Migas	5	5	100 %
18	Politeknik Aisyiyah Pontianak	4	3	75 %
19	Politeknik Tonggak Equator Pontianak	3	2	66.67 %
20	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai	2	2	100 %

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH PRODI	PRODI KERJASAMA	PERSENTASE
21	STIKES Yarsi Pontianak	2	2	100 %
22	STMIK Pontianak	2	2	100 %
23	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh	1	1	100 %
24	Akademi Kebidanan Singkawang	1	1	100 %
25	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	18	4	22.22 %
26	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak	2	1	50 %
27	Universitas Borneo Lestari	9	5	55.56 %
28	STIKES Kapuas Raya	4	3	75 %
29	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin	2	1	50 %
30	Politeknik Kesdam VI Banjarmasin	3	3	100 %
31	STMIK Palangka Raya	3	2	66.67 %
32	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	2	1	50 %
33	Universitas PGRI Kalimantan	11	7	63.64 %
34	Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat	4	2	50 %
35	STMIK Banjarbaru	2	2	100 %
36	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	10	4	40 %
37	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	21	10	47.62 %
38	Politeknik Sinar Mas Berau Coal	3	1	33.33 %
39	STIKES Suaka Insan	2	2	100 %
40	Universitas Darwan Ali	5	3	60 %
41	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	2	2	100 %

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH PRODI	PRODI KERJASAMA	PERSENTASE
42	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura	5	2	40 %
43	Akademi Farmasi Yarsi Pontianak	1	1	100 %
44	Universitas Sari Mulia	12	6	50 %
45	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam	1	1	100 %
46	STMIK Widyia Cipta Dharma	3	2	66.67 %
47	Politeknik Nusantara Balikpapan	3	1	33.33 %
48	Politeknik Batulicin	4	3	75 %
49	Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin	2	1	50 %
50	Universitas Oso	5	4	80 %
51	STIKES Darul Azhar Batulicin	3	2	66.67 %
52	Universitas PGRI Pontianak	16	16	100 %

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja :

Pada Tahun 2025, Tim Kerja Sama telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap capaian kerja sama yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perguruan Tinggi Swasta melalui laman laporankerma.kemdiktisaintek.go.id. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelaporan kerja sama di lingkungan PTS, serta memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan sejalan dengan arah kebijakan dan tujuan strategis pendidikan tinggi di Indonesia. Pendampingan dilaksanakan di berbagai wilayah di Kalimantan, meliputi Kota Palangka Raya, Sampit, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Samarinda, dan Balikpapan. Setiap lokasi pendampingan melibatkan perwakilan dari PTS setempat yang telah melaporkan atau sedang dalam proses pelaporan kerja sama. Dalam kegiatan ini, Tim Kerja Sama tidak hanya memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporan kerja sama melalui sistem daring, tetapi juga melakukan evaluasi langsung terhadap kualitas isi laporan, kesesuaian dokumen pendukung, serta efektivitas pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan.

Tujuan utama dari kegiatan pendampingan dan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun yang berpotensi muncul di kemudian hari, agar dapat diambil tindakan korektif dan preventif sedini mungkin. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu kerja sama perguruan tinggi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pendampingan yang dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan yang meliputi kota dan kabupaten dengan karakteristik PTS yang beragam memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi faktual implementasi kerja sama di lapangan. Dari hasil evaluasi, masih ditemukan variasi tingkat pemahaman PTS terhadap mekanisme pelaporan, kelengkapan dokumen pendukung, serta keterkaitan kerja sama dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan berkelanjutan masih sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan kualitas substansi kerja sama, bukan hanya kuantitas laporan yang diunggah. Di sisi lain, kegiatan ini juga menghasilkan temuan positif, di mana beberapa PTS telah mampu mengelola dan melaporkan kerja sama secara tertib, sistematis, dan relevan dengan IKU. PTS yang memenuhi capaian IKU pada aspek kerja sama mencerminkan adanya komitmen institusi dalam menjadikan kerja sama sebagai bagian integral dari strategi pengembangan institusi. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi PTS lainnya. Secara keseluruhan, pendampingan dan evaluasi pada Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah perbaikan ke depan, baik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan mekanisme monitoring, maupun peningkatan kualitas implementasi kerja sama agar lebih berorientasi pada hasil dan keberlanjutan. Selain melalui pendampingan, LLDIKTI Wilayah XI juga melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan Kerjasama secara daring sebanyak 2 kali dengan menghadirkan pembicara dari dunia usaha atau industri yang berskala nasional dan internasional untuk membuka akses Kerjasama PTS dengan dunia usaha yang sesuai dengan kriteria sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini.



Dokumentasi Pendampingan dan Evaluasi Capaian Kerjasama

Kendala/Permasalahan :

1. Tindak lanjut kerja sama kurang optimal, sehingga beberapa kerja sama hanya berhenti pada penandatanganan dokumen tanpa implementasi nyata;
2. Variasi tingkat pemahaman PTS terhadap mekanisme pelaporan dan kriteria IKU, sehingga kualitas laporan tidak seragam;
3. Laporan pelaksanaan kerja sama tidak dibuat atau tidak diunggah secara lengkap ke sistem daring.

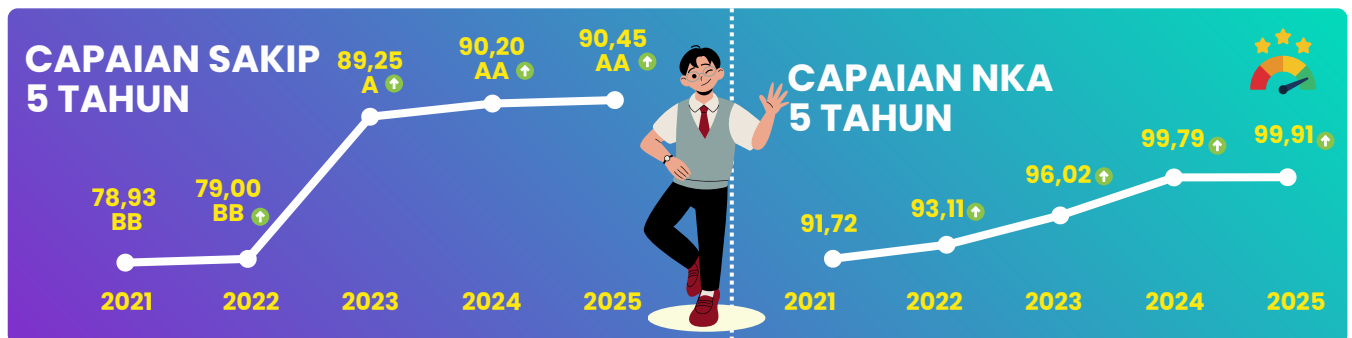
Langkah Antisipasi dan Strategi :

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola kerja sama melalui pelatihan khusus, workshop, dan klinik kerja sama;
2. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis daring untuk memantau tindak lanjut dan implementasi kerja sama secara periodik;
3. Memperbanyak kegiatan fasilitasi yang mempertemukan PTS dengan dunia usaha, industri, dan mitra internasional agar kerja sama lebih relevan, berdampak, dan berkelanjutan;
4. Melanjutkan dan memperluas program pendampingan secara terjadwal dengan fokus pada peningkatan kualitas substansi kerja sama, bukan hanya jumlah kerja sama.

Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI

Ketercapaian Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI XI" diukur dengan peningkatan nilai/predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas pelaksanaan anggaran RKA-KL LLDIKTI. Kedua poin tersebut dijadikan sebagai indikator keberhasilan atas sasaran kegiatan ini. Pada tahun 2025, LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai SAKIP 90,45 dengan predikat AA dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas pelaksanaan anggaran RKA-KL LLDIKTI XI 99,91. Pada tahun 2023 LLDIKTI Wilayah XI membuat inovasi untuk meningkatkan kualitas SAKIP dengan membangun aplikasi eSAKIP yang dapat mengakomodir proses perencanaan dan pengukuran kinerja dari Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah XI dan selama tahun 2025 pengembangan berkelanjutan selalu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan implementasi eSAKIP. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan signifikan terhadap nilai SAKIP selama 5 tahun terakhir. Begitupun dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas pelaksanaan anggaran RKA-KL LLDIKTI XI juga mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2025 untuk meningkatkan transparansi keuangan, seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan telah dibuat dalam bentuk digital dan akan diintegrasikan dengan sistem sebagai rencana program kerja tim pengelola keuangan pada tahun 2026.



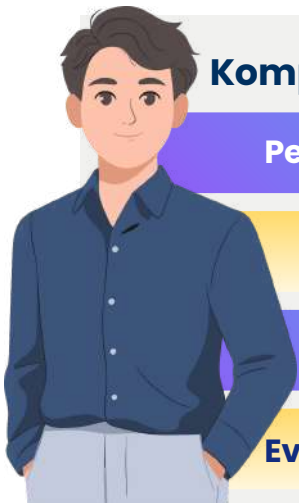
Sasaran kegiatan ini dilaksanakan tim perencanaan dan tim pengelola keuangan yang berada dibawah bagian umum LLDIKTI Wilayah XI. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja yang diukur sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	AA	AA	100%
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	99,91	103%



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4.1 PREDIKAT SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki dan menetapkan kebijakan serta mendorong instansi pemerintah melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Evaluasi SAKIP ini dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.



Komponen Evaluasi SAKIP

Perencanaan Kinerja

Bobot

30%

Pengukuran Kinerja

30%

Pelaporan Kinerja

15%

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

25%

Predikat

AA = >90-100
Sangat Memuaskan

100

A = >80-90

Memuaskan

BB = 70-80

BB = >70-80

Sangat Baik

B = >60-70

Baik

CC = >50-60

CC = 350-600
Cukup

Cukup

C = >30-50

Kurang

D = 20-30

D = 30-39

Adapun sumber data capaian indikator ini adalah :

Capaian Predikat SAKIP ditetapkan dari Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk tahun kinerja yang diukur

Hasil evaluasi SAKIP LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27.6
2	Pengukuran Kinerja	30%	27.6
3	Pelaporan Kinerja	15%	14.25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21
Predikat		AA	90.45

Hasil predikat SAKIP ditetapkan pada akhir periode Kinerja yang diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Predikat SAKIP LLDIKTI Wilayah XI telah mencapai target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu predikat AA (sangat memuaskan) dengan nilai 90,45. Capaian ini apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu AA dapat dikatakan sudah berhasil dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini dipengaruhi oleh LLDIKTI Wilayah XI yang selalu berkomitmen dan mengembangkan inovasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP. Walaupun kenaikan sebesar 0,25 terlihat kecil secara angka, pada rentang nilai di atas 90 (Predikat AA), kenaikan tersebut sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah XI telah melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek yang lebih detail dan konsisten dalam menjaga kualitas budaya kinerja yang berkelanjutan.

Rekomendasi evaluasi SAKIP LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025

Perencanaan Kinerja

Memperkuat cascading kinerja antara RENSTRA, RKT, Perjanjian Kinerja hingga kinerja individu agar ketercapaian sasaran strategis lebih terukur dan konsisten di seluruh level organisasi.

Pengukuran Kinerja

Melakukan revaluasi berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) agar semakin SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) serta benar-benar mencerminkan outcome, bukan hanya output.

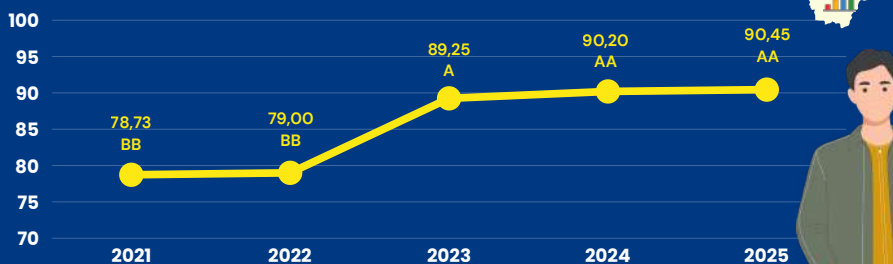
Pelaporan Kinerja

Mendorong penyajian analisis kinerja yang lebih mendalam dalam LAKIN, khususnya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan tindak lanjut perbaikan (lesson learned), bukan hanya deskripsi capaian angka.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Meningkatkan peran evaluasi internal tidak hanya sebagai kegiatan penilaian, tetapi sebagai sarana pembelajaran organisasi (organizational learning) melalui rekomendasi yang operasional dan dapat ditindaklanjuti.
- Melanjutkan dan memperluas pelatihan/diklat SAKIP bagi pegawai terkait, termasuk penyusunan kinerja berbasis outcome dan analisis kinerja, agar kualitas perencanaan hingga evaluasi semakin meningkat.

Capaian SAKIP 5 Tahun Terakhir



Target PK

AA



Capaian

AA



%

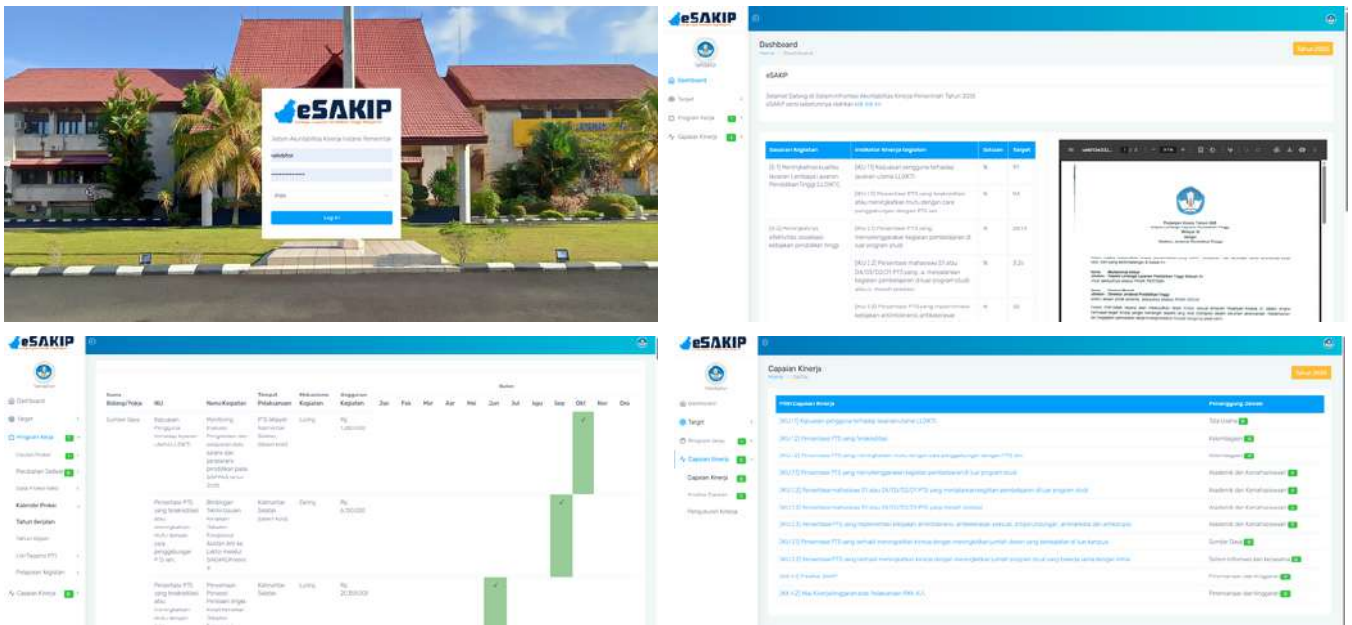
100%

Formula Perhitungan
Capaian Kinerja

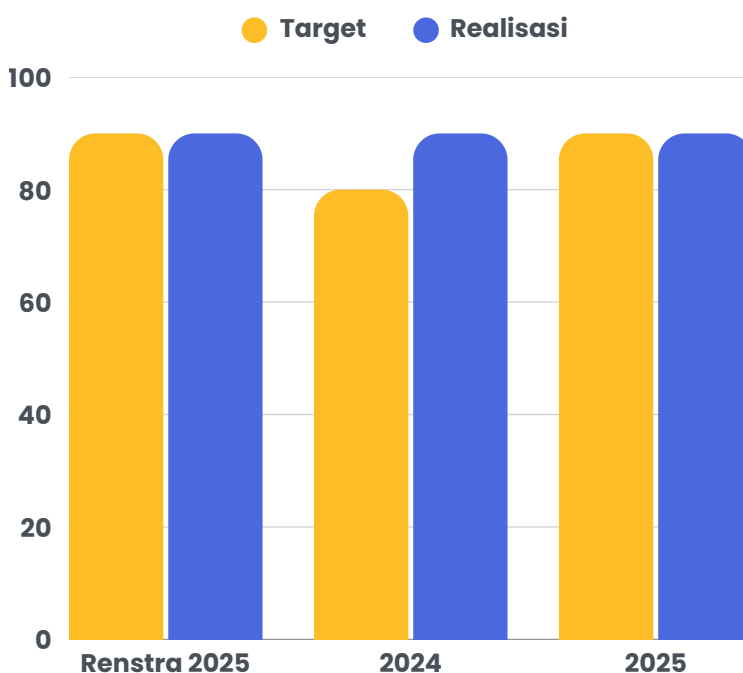
➡ Nilai seluruh aspek dijumlahkan
 $27,6+27,6+14,25+21 = 90,45 \text{ (AA)}$

Capaian Predikat SAKIP LLDIKTI Wilayah XI menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan sangat baik dan efisien serta berorientasi pada pencapaian hasil. Capaian ini meningkat sebesar 0,25 dari tahun sebelumnya karena upaya perbaikan dalam pengelolaan SAKIP yang terus dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI dengan menindaklanjuti catatan pada LHE tahun sebelumnya seperti penetapan target kinerja berdasarkan pertimbangan capaian pada tahun sebelumnya, memastikan partisipasi seluruh pegawai PNS dan Non PNS (OB dan Security) dalam penyusunan laporan kinerja, dan memberikan gambaran perubahan budaya kerja yang terjadi karena pengelolaan SAKIP yang semakin baik. LLDIKTI Wilayah XI juga selalu mendukung peningkatan kompetensi SDM SAKIP melalui pelatihan dan kegiatan lainnya.

Untuk mendukung digitalisasi pengelolaan SAKIP, LLDIKTI Wilayah telah membangun aplikasi eSAKIP sebagai bagian dari pendukung aplikasi SPEKTA Kemdiktisaintek. Pada tahun 2025 aplikasi eSAKIP sudah dapat mengakomodir seluruh proses pelaksanaan SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk kedepannya aplikasi eSAKIP akan disesuaikan kembali mengikuti regulasi tentang Indikator Kinerja Utama LLDIKTI. Hal ini akan memastikan bahwa data yang dihasilkan tetap relevan dan mendukung pengambilan keputusan strategis pada tingkat kementerian dan LLDIKTI Wilayah XI sendiri.



Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra



Capaian 2024

Target

A

Realisasi

AA

100%

Tingkat Keberhasilan

Capaian 2025

Target

AA

Realisasi

AA

100%

Tingkat Keberhasilan

Capaian Renstra 2025

Target

AA

Realisasi

AA

100%

Tingkat Keberhasilan

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Menindaklanjuti catatan LHE tahun sebelumnya secara konsisten;
2. Menciptakan budaya kerja inklusif dengan melibatkan seluruh lini pegawai, termasuk PNS dan Non-PNS (OB dan Security), dalam penyusunan laporan kinerja. Hal ini menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) dan bertanggungjawab terhadap capaian target organisasi;
3. Digitalisasi pengelolaan SAKIP internal melalui aplikasi eSAKIP yang telah mencakup seluruh siklus SAKIP (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan) sebagai aplikasi pendukung SPEKTA Kemdiktisaintek;
4. Dukungan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan SAKIP pada LLDIKTI Wilayah XI.



Dokumentasi Pemberian Reward Capaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja :

1. Menyusun laporan kinerja tahun 2024;
2. Menyusun draft Rencana Strategis tahun 2025-2029;
3. Menyusun perjanjian kinerja tahun 2025;
4. Menyusun rencana aksi kinerja tahun 2025;
5. Menyusun tindak lanjut rekomendasi LHE tahun 2024;
6. Menyusun laporan kinerja setiap triwulan tahun 2025;
7. Melakukan evaluasi mandiri pelaksanaan SAKIP tahun 2025;
8. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan SAKIP setiap triwulan;
9. Mengikutsertakan SDM pada pelatihan SAKIP;
10. Melakukan pengembangan pada aplikasi eSAKIP;
11. Melaksanakan pemberian reward kinerja atas capaian tahun 2024.



Dokumentasi Pemberian Reward Capaian Kinerja

Kendala/Permasalahan :

1. Pengukuran kinerja masih menggunakan regulasi lama yaitu Kepmendikbudri 210 tahun 2023 karena regulasi tentang Indikator Kinerja Utama LLDIKTI yang terbaru belum ditetapkan;
2. Aplikasi eSAKIP belum terintegrasi dengan SPEKTA Kemdiktisaintek;
3. Siklus SAKIP sempat terhenti karena perjanjian kinerja ditetapkan pada bulan Mei tahun 2025 (seharusnya diawal tahun). Hal tersebut membuat program kerja pendukung IKU baru efektif dilaksanakan pada triwulan III;
4. Rencana strategis eselon I dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap rencana strategis LLDIKTI Wilayah XI.

Langkah Antisipasi dan Strategi :

1. LLDIKTI seluruh Indonesia secara rutin telah melakukan serangkaian kegiatan pembahasan terkait rencana IKU beserta dengan pengumpulan baseline dan rencana target tahun 2026, saat ini sedang menunggu persetujuan dari kementerian;
2. Setelah regulasi terkait IKU terbaru ditetapkan maka akan dilanjutkan dengan integrasi eSAKIP dan SPEKTA. Sebelumnya rencana integrasi sudah dikoordinasikan dengan tim pengembang SPEKTA untuk mengetahui langkah awal yang harus dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XI dalam integrasi data tersebut;
3. Penyusunan program kerja difokuskan pada kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XI khususnya terkait peningkatan kualitas layanan dan kegiatan krusial lainnya sambil menunggu penetapan regulasi IKU LLDIKTI yang terbaru;
4. Segera menetapkan dokumen rencana strategis 2025-2029 setelah renstra Ditjen Dikti Kemendiktisaintek terbit.



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4.2

NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ini berkaitan dengan prestasi kerja terkait dengan pelaksanaan anggaran kerja, capaian keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berdasarkan PMK Nomor 62 tahun 2023 menyebutkan bahwa Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung dari penggabungan dari 50% Nilai IKPA dan 50% Nilai EKA. Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada satuan kerja. Terdapat 2 (dua) komponen yang menjadi unsur penilaian pada nilai kinerja anggaran. Formula pengukuran dari setiap komponen sebagai berikut :

Komponen Pelaksanaan		Komponen Perencanaan	
Revisi DIPA	10	Capaian RO	75
Deviasi halaman III DIPA	15	Penggunaan SBK	10
Penyerapan Anggaran	20	Efisiensi SBK	15
Belanja Kontraktual	10	Nilai Kinerja Anggaran Nilai Pelaksanaan 50% + Nilai Perencanaan 50%	
Penyelesaian Tagihan	10		
Pengelolaan UP dan TUP	10	PMK Nomor 62 tahun 2023	
Capaian Output	25		

Adapun sumber data capaian indikator ini adalah :

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari OMSPAN
(<https://spanint.kemenkeu.go.id>)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari Monev Kemenkeu
(<https://monev.kemenkeu.go.id>)

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANGKALAMASIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

Download Excel

Tampilkan 25 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	135.01.000113	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANGKALAMASIN	100,00	99,81	99,91

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Selanjutnya

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Disipasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	045	139	693213	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANGKALAMASIN	Nilai	100,00	100,00	99,07	100,00	100,00	100,00	100,00	99,81	100%	0,00	99,81
						Bobot	10	15	20	25	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	15,00	19,81	10,00	10,00	10,00	25,00				
						Nilai Aspek	100,00			99,77			100,00				

Nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	135.01.000113	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANGKALAMASIN	100,00	100,00	100,00	100,00

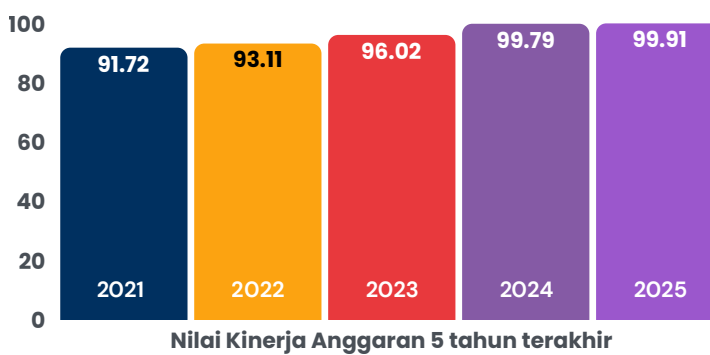
Nilai Perencanaan Anggaran (EKA)

NKA

Nilai Pelaksanaan
99,81
Sumber OMSPAN Kemenkeu

Nilai Perencanaan
100
Sumber Monev Kemenkeu

NKA
99,91
Sumber Monev Kemenkeu



Nilai Kinerja Anggaran 5 tahun terakhir

Formula Perhitungan Capaian Kinerja

(50%*Nilai Pelaksanaan) + (50%*Nilai Perencanaan) = 49,91 + 50 = **99,91** Sangat Baik

Target PK
97

Capaian
99,91

%
103%

Pada komponen nilai pelaksanaan anggaran (IKPA) terdapat indikator yang belum optimal yaitu penyerapan anggaran dengan nilai 99,07. Capaian tersebut sudah sangat baik namun menjadi tantangan LLDIKTI Wilayah XI untuk tahun yang akan datang dalam menyusun strategi penyerapan anggaran agar memenuhi target nasional pada setiap triwulan.

Nilai kinerja anggaran LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 berdasarkan sumber dari OMSPAN dan MONEV KEMENKEU adalah 99,91. Capaian ini apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 97 dapat dikatakan sudah berhasil dengan tingkat capaian 103%. Hal ini merupakan hasil dari komitmen pengelola keuangan LLDIKTI Wilayah XI untuk selalu berbenah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kedepannya. Berdasarkan data pada monev kemenkeu nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 100 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 99,81. Berikut analisis berdasarkan dari aspek penunjang nilai kinerja anggaran tersebut :

► Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Berdasarkan pada Monev Kemenkeu, LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin berhasil meraih pencapaian yang luar biasa dengan nilai sempurna pada seluruh indikator perencanaan tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut :

Indikator	Nilai	Kategori
Capaian RO (Efektivitas)	100	Sempurna
Penggunaan SBK	100	Sempurna
Efisiensi SBK	100	Sempurna

Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran tahun 2025

Analisis setiap indikator :

- **Capaian RO (100)** : Capaian Rincian Output (RO) sebesar 100 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja fisik yang direncanakan telah tercapai sepenuhnya. Perencanaan anggaran yang dibuat terbukti realistis dan dapat dieksekusi dengan tepat sasaran.
- **Penggunaan & Efisiensi SBK (100)** : Nilai 100 pada Efisiensi SBK (Standar Biaya Keluaran) menandakan bahwa LLDIKTI Wilayah XI berhasil menghasilkan output dengan biaya yang optimal dan tidak melebihi standar biaya yang ditetapkan pemerintah. Adanya sinkronisasi yang baik antara penyerapan anggaran dengan pencapaian fisik output

Pencapaian nilai 100 ini mengindikasikan bahwa LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin telah menerapkan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan negara. LLDIKTI Wilayah XI mampu merencanakan anggaran dengan tepat, mengeksekusi dengan efektif, dan menjaga efisiensi biaya.

► Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan data dari OMSPAN, Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin periode Desember 2025 sebesar 99,81 adalah capaian yang sangat baik. Capaian tersebut tidak mencapai nilai sempurna (100) dikarenakan satu indikator, yaitu Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Aspek IKPA	Nilai Aspek	Status
Kualitas Perencanaan Anggaran	100	Sempurna
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99.77	Sangat Baik
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100	Sempurna

Capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025

Analisis Penyerapan Anggaran

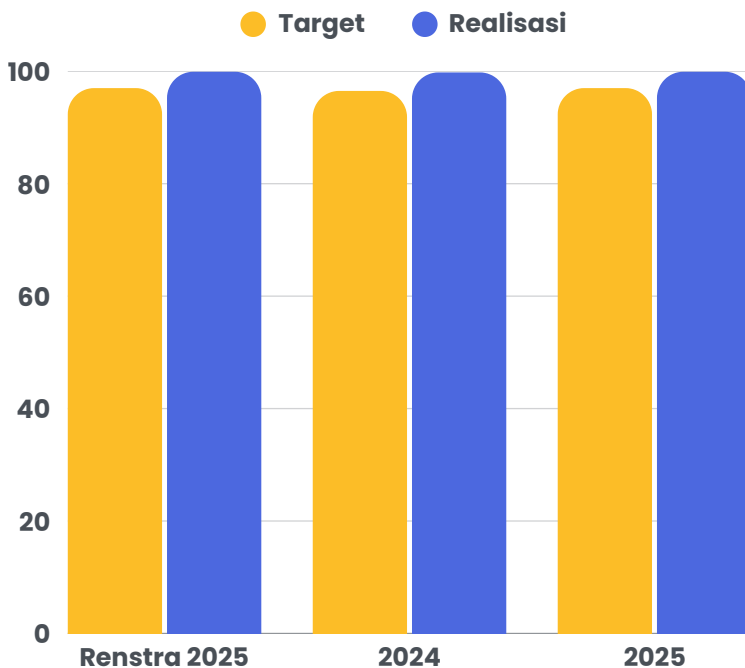
Indikator Penyerapan Anggaran memiliki nilai 99,07 dengan bobot tertinggi kedua (20%). Ini adalah satu-satunya komponen yang tidak bernilai 100. Dampak pada Nilai Akhir dengan nilai 99,07 maka kontribusi nilai yang didapat adalah 19,81 dari total bobot 20. Artinya, ada kehilangan poin sebesar 0,19.

Nilai penyerapan anggaran yang tidak optimal menunjukkan bahwa rerata realisasi belanja hingga akhir Desember sedikit meleset dari target penyerapan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan analisis yang lebih mendalam penyerapan anggaran tidak optimal sejak triwulan ke II karena beberapa kebijakan seperti efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang ada di LLDIKTI Wilayah XI dan penetapan perjanjian kinerja yang terlambat sehingga pelaksanaan program kerja berjalan dengan efektif pada triwulan III. Secara keseluruhan, kinerja keuangan LLDIKTI Wilayah XI sangat baik. Kehilangan 0,19 poin pada penyerapan anggaran adalah hal yang sangat teknis karena beberapa kebijakan yang menyebabkan daya serap anggaran tidak dapat optimal sesuai dengan target nasional.

Langkah antisipasi yang harus dilaksanakan pada tahun 2026 :

- Akselerasi Belanja Kontraktual : Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk belanja modal dan belanja kontraktual, dengan memulai tender dan penandatanganan kontrak sedini mungkin, idealnya di triwulan I tahun anggaran;
- Disiplin Penyerapan Anggaran : Memastikan penyerapan anggaran dilakukan secara merata setiap bulan, tidak menumpuk di akhir tahun (bulan November-Desember), sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra



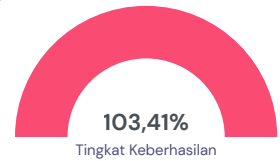
Capaian 2024

Target

96,50

Realisasi

99,79



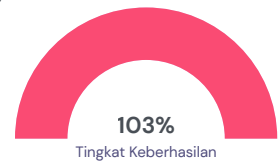
Capaian 2025

Target

97

Realisasi

99,81



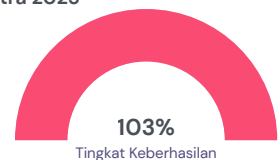
Capaian Renstra 2025

Target

97

Realisasi

99,81



Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Akurasi Perencanaan yang tinggi dengan meminimalisir revisi anggaran dan pengendalian deviasi halaman III DIPA yang optimal;
2. Kedisiplinan Administrasi Perbendaharaan yang menunjang indikator ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP/TUP;
3. Manajemen Pengadaan yang baik sehingga nilai pada indikator belanja kontraktual dapat optimal;
4. Anggaran berorientasi pada hasil sehingga seluruh target fisik dapat dicapai 100%;
5. Efisiensi anggaran telah di implementasikan dengan baik;
6. Koordinasi antara tim perencanaan dengan pengelola keuangan berjalan dengan sangat baik.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja :

1. Melakukan assessment capaian nilai anggaran setiap bulan;
2. Meningkatkan pengetahuan SDM tim pengelola keuangan dan perencanaan;
3. Menjaga koordinasi antara tim perencanaan dengan pengelola keuangan dalam setiap pertanggungjawaban anggaran;
4. Melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala;
5. Mengoptimalkan pembayaran secara cashless dan penggunaan kartu kredit pemerintah;
6. Digitalisasi pertanggungjawaban keuangan untuk menjaga transparansi.



Kendala/Permasalahan :

1. Optimalisasi Penyerapan Anggaran belum dapat dilaksanakan pada triwulan pertama karena beberapa faktor eksternal seperti adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun yang membuat LLDIKTI Wilayah XI harus menyusun kembali seluruh program kerja dan penetapan target perjanjian kinerja yang baru dilakukan pada triwulan kedua sehingga program kerja baru berjalan optimal pada triwulan ketiga setelah perjanjian kinerja ditetapkan;
2. Meskipun Deviasi Halaman III DIPA mendapat nilai 100 namun penyusunan rencana penarikan pada halaman III DIPA menjadi suatu tantangan tersendiri bagi LLDIKTI Wilayah XI karena dinamisnya waktu pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan dengan arahan/kebijakan dari pusat;
3. Dilema Antara Efisiensi dan Penyerapan anggaran, Ketika lembaga berhasil menjalankan program secara efisien (menggunakan biaya lebih rendah dari standar), hal ini secara otomatis menyisakan anggaran yang tidak terpakai. Dalam sistem penilaian IKPA, sisa anggaran ini justru menurunkan nilai indikator Penyerapan anggaran meskipun secara kinerja fisik sudah mencapai 100. Hal tersebut menjadi tantangan untuk bagaimana dapat mendapatkan nilai yang optimal tanpa harus menurunkan kinerja di salah satu indikator.

Langkah Antisipasi dan Strategi :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait capaian nilai kinerja anggaran untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran di lapangan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini membantu mendeteksi secara dini jika terjadi deviasi atau pergeseran target yang akan menjadi dasar kebijakan pimpinan sebelum tahun anggaran berakhir;
2. Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan dan pengelola keuangan;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan dengan melakukan digitalisasi dan integrasi sistem pengelolaan keuangan internal.

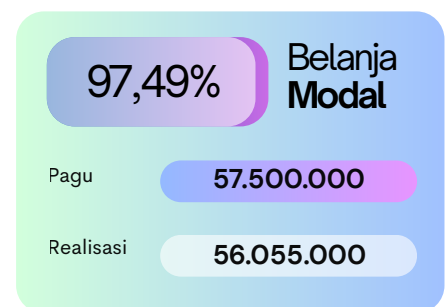
REALISASI ANGGARAN

Capaian Anggaran

Pagu anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Xi Banjarmasin dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp. 151.744.333.000,- Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 147.158.438.967,- dengan persentase daya serap sebesar 96,98%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja :

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
PAGU	142.177.129.000	9.509.704.000	57.500.000	151.744.333.000
REALISASI	140.951.700.697	6.150.683.270	56.055.000	147.158.438.967
PERSENTASE	99,14%	64,68%	97,49%	96,98%
SISA	1.225.428.303	3.359.020.730	1.445.000	4.585.894.033
BLOKIR	0	2.773.869.000	0	2.773.869.000

Realisasi Anggaran tahun 2025 Per Jenis Belanja



Berikut rincian penyerapan anggaran LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 pada setiap sasaran dan dukungan manajemen :

Sasaran	Anggaran	Realisasi	%	Blokir
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTl)	73.467.942.000	71.685.519.680	97,57%	1.680.578.000
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	788.047.000	164.442.501	20,87%	598.519.000
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	266.434.000	70.455.112	26,44%	189.772.000
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	77.221.910.000	75.238.021.674	97,43%	304.999.000
TOTAL	151.744.333.000	147.158.438.967	96,98%	2.773.868.000

Realisasi Anggaran tahun 2025 Per Sasaran Kinerja

Dukungan Manajemen	Anggaran	Realisasi	%	Blokir
Pembayaran Gaji dan Tunjangan	72.592.445.000	71.370.813.997	98,32%	0
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.129.879.000	3.544.792.676	85,83%	139.900.000
Layanan Umum	10.000.000	825.000	8,25%	0
Layanan BMN	489.586.000	321.590.001	65,69%	165.099.000
TOTAL	77.221.910.000	75.238.021.674	97,43%	304.999.000

Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen tahun 2025

Efisiensi

Secara umum nilai efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi output terhadap realisasi anggaran. Nilai efisiensi dianggap baik apabila menghasilkan angka yang positif. Efisiensi pada LLDIKTI Wilayah XI dihitung berdasarkan perbandingan terhadap capaian sasaran kinerja dan capaian output. Berikut data efisiensi anggaran pada LLDIKTI Wilayah XI :

Sasaran Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	104,16%	97,57%	+6,59%	Efisien
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	115,50%	20,87%	+94,63%	Sangat Efisien
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	119,57%	26,44%	+93,13%	Sangat Efisien
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	101,50%	97,43%	+4,07%	Efisien
TOTAL	110,77%	96,98%	13,79%	Efisien

Efisiensi anggaran tahun 2025 per sasaran kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, terdapat dua sasaran kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, yaitu:

- **Sasaran Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi (Efisiensi: 94,63%)** : Efisiensi yang sangat tinggi ini disebabkan oleh blokir anggaran sebesar Rp. 598.519.000,- sehingga LLDIKTI Wilayah XI harus melakukan optimalisasi penggunaan media digital dan platform pertemuan daring (online) dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini memangkas biaya perjalanan dinas, sewa tempat, dan konsumsi tanpa mengurangi jangkauan serta efektivitas penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.
- **Sasaran Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Efisiensi: 93,13%)** : Pada sasaran ini juga terdapat blokir anggaran sebesar 189.772.000,- sehingga LLDIKTI Wilayah XI harus melakukan optimalisasi anggaran pada beberapa kegiatan. Tingginya nilai efisiensi karena banyak proses pendampingan PTS dilakukan melalui media daring sehingga alokasi anggaran yang semula direncanakan untuk pendampingan luring dapat dihemat secara signifikan. Hal tersebut juga memangkas biaya perjalanan dinas, sewa tempat, dan konsumsi kegiatan.

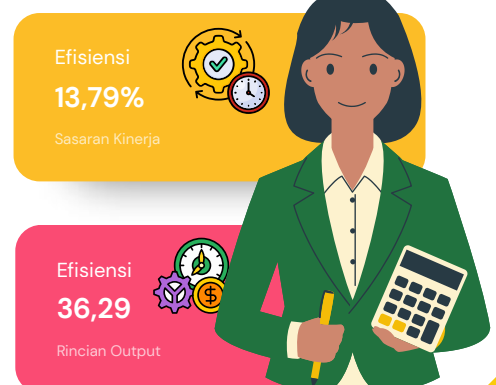
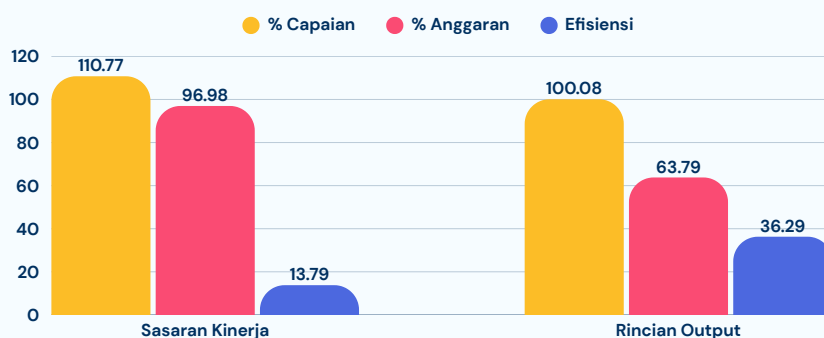
Secara keseluruhan, LLDIKTI Wilayah XI berhasil mencapai rerata kinerja sebesar 110,77% dengan total penyerapan anggaran sebesar 96,98%, sehingga menghasilkan nilai efisiensi total sebesar 13,79%. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah menjalankan prinsip value for money dengan mencapai target melebihi harapan melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Sedangkan efisiensi berdasarkan rincian output sebagai berikut :

Rincian Output	% Capaian Output	% Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi	Keterangan
Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	100%	47,38%	+52,62%	Sangat Efisien
Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	100,38%	99,88%	+0,50%	Efisien
Layanan BMN	100%	8,25%	+91,75%	Sangat Efisien
Layanan Umum	100%	65,69%	+34,31%	Efisien
Layanan Perkantoran	100%	97,75%	+2,25%	Efisien
TOTAL	100,08%	63,79%	36,29%	Efisien

Efisiensi anggaran tahun 2025 per rincian output

Berdasarkan data dari tabel tersebut, efisiensi tertinggi ada pada rincian output **Layanan BMN (91,75%)**, hal tersebut karena perubahan program kerja dan optimalisasi penggunaan media daring dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memangkas anggaran. Kemudian efisiensi terendah ada pada rincian output **Dosen Non PNS yang menerima tunjangan profesi (0,50%)**, hal tersebut wajar karena sifatnya adalah pembayaran hak kepada dosen (fixed cost). Capaian 100,38% menunjukkan ada realisasi yang sedikit melampaui target orang, namun tetap di bawah pagu anggaran. Efisiensi yang kecil tersebut juga dipengaruhi oleh penyesuaian pagu alokasi pada akhir tahun anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai pada satuan kerja lainnya dibawah Kemdiktisaintek.

Efisiensi LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025



INOVASI

Inovasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin pada tahun 2025 adalah peningkatan transparansi tata kelola keuangan dan perbaikan berkelanjutan pada sistem yang sudah dibangun sebelumnya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Beberapa inovasi tahun 2025 sebagai berikut :

► Pengembangan Unit Layanan Terpadu (PINANDU)

Aplikasi Unit Layanan Terpadu (PINANDU) adalah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh layanan LLDIKTI Wilayah XI sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan aplikasi ini stakeholder dapat mengakses semua layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah XI dengan mudah dan tanpa biaya. Aplikasi PINANDU telah resmi di implementasikan pada bulan September tahun 2023. Pada tahun 2025 telah dilakukan penambahan beberapa fitur baru pada aplikasi PINANDU untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan ketajaman data survey kepuasan pengguna, seperti :

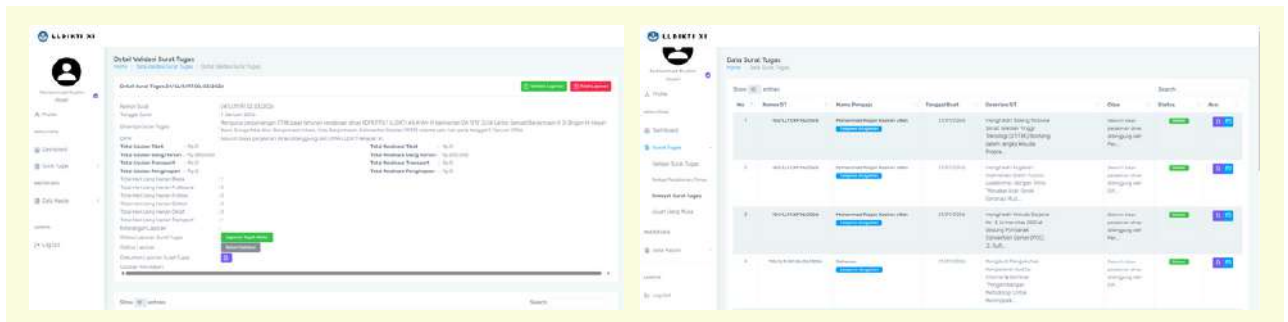
- Integrasi Menu pengisian survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat di ikuti langsung oleh pengguna setelah menerima layanan (survey sebelumnya dilakukan melalui tautan form yang disebar secara acak);
- Integrasi menu pengaduan secara daring (online) langsung pada antarmuka pegawai.



► Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Layanan Internal (SARLAIN)

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola layanan internal pada LLDIKTI Wilayah XI telah dilakukan perbaikan pada beberapa fitur di sistem Informasi Administrasi Layanan Internal (SARLAIN) sebagai berikut :

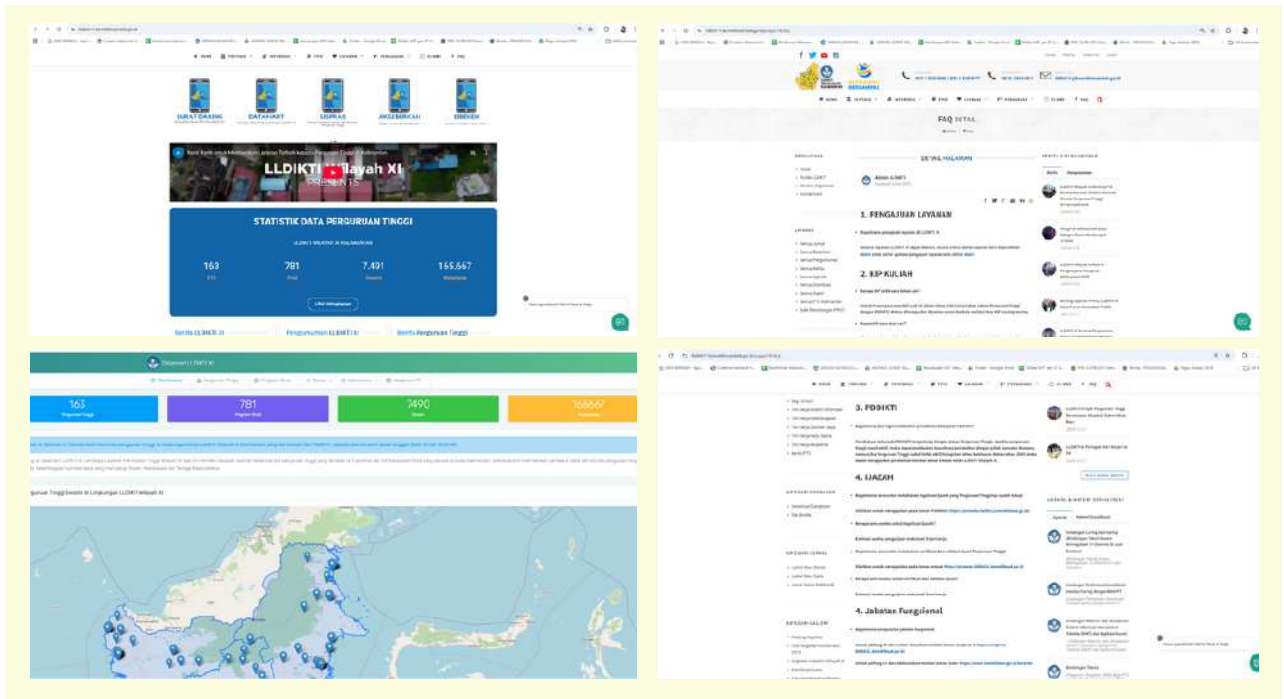
- **Layanan Modul Keuangan** : Pembaruan fitur keuangan agar setiap perjalanan dinas memiliki sistem perhitungan otomatis;
- **Manajemen Surat** : Pembaruan alur pengusulan Surat Tugas untuk mempercepat proses administrasi.



► Pengembangan Fitur Website

Pada tahun 2025, LLDIKTI Wilayah XI melakukan transformasi layanan informasi melalui pengembangan situs web resmi LLDIKTI Wilayah XI **<https://lldikti11.kemdiktisaintek.go.id>** yang kini mengintegrasikan fitur FAQ dan Dashboard Statistik Perguruan Tinggi. Inovasi ini mengedepankan sinkronisasi data real time dengan PDDIKTI, yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memantau data dan performa perguruan tinggi secara transparan dan akurat dalam satu website terpadu.

- **Fitur FAQ** : Penambahan fitur FAQ juga berfungsi sebagai pusat bantuan mandiri (*self-service*) yang mampu mempercepat respons terhadap kendala administratif PTS, sehingga mengurangi beban komunikasi manual dan meningkatkan kepuasan layanan di lingkungan Wilayah XI;
- **Fitur statistik data PTS** : fitur ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat mengetahui kondisi PTS di Kalimantan secara real time. Website tidak lagi menampilkan data statis, melainkan melakukan penarikan data langsung dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Hal ini mencakup jumlah PTS, jumlah mahasiswa aktif, jumlah dosen, dan jumlah prodi pada PTS di wilayah Kalimantan. Kemudian disediakan akses untuk masyarakat atau stakeholder ke aplikasi Datamart LLDIKTI Wilayah XI apabila ingin mengetahui kondisi PTS secara lebih terperinci.



► Digitalisasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

Untuk meningkatkan transparansi tata kelola keuangan pada tahun 2025 seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan sudah tersedia dalam bentuk digital dan sedang dalam proses integrasi data dengan Sistem Layanan Internal (SARLAIN) LLDIKTI Wilayah XI yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Digitalisasi ini akan memudahkan proses pengawasan dan audit baik oleh SPI maupun pihak eksternal satuan kerja serta menjaga keamanan arsip yang berpotensi rusak atau hilang.

Linimasa Pembangunan Sistem Informasi Layanan LLDIKTI Wilayah XI



PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin mendapatkan beberapa penghargaan baik dari internal maupun eksternal Kemdiktisaintek. Adapun penghargaan yang telah berhasil diperoleh sebagai berikut :

Gold Winner

Penghargaan SAKIP Tahun 2024
pada **Anugerah Diktisaintek 2025**



Silver Winner

Pengelolaan PDDIKTI
pada **Anugerah Diktisaintek 2025**



Bronze Winner

Pengelolaan Siaran Pers
pada **Anugerah Diktisaintek 2025**



Bronze Winner

Insan Humas
(Muhammad Adie Karya)
pada **Anugerah Diktisaintek 2025**



Terbaik Pertama

Akurasi Rencana Penarikan Dana
pada **KPPN Banjarmasin Awards Semester II 2024**



Terbaik Pertama

Kinerja Transaksi Kartu Kredit Pemerintah
pada **KPPN Banjarmasin Awards Semester II 2024**



Terbaik Kedua

Laporan Keuangan
pada **KPPN Banjarmasin Awards Semester II 2024**



Terbaik Kedua

Kuasa Pengguna Anggaran
(Dr. Drs. Muhammad Akbar, M.Si)
pada **KPPN Banjarmasin Awards Semester II 2024**





KPPN Banjarmasin Awards Semester II 2024



LLDIKTI Wilayah XI
sebagai
Terbaik Pertama
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Semester II Tahun 2024
Kategori SATKER dengan Pagu Besar



KPPN Banjarmasin Awards Semester II 2024

LLDIKTI Wilayah XI
sebagai
Terbaik Kedua
Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024
Kategori SATKER dengan Pagu Besar



KPPN Banjarmasin Awards Semester II 2024



LLDIKTI Wilayah XI
sebagai
Terbaik Pertama
Akurasi Rencana Penarikan Dana Semester II Tahun 2024
Kategori SATKER dengan Pagu Besar



KPPN Banjarmasin Awards Semester II 2024

Dr. Drs. Muhammad Akbar, M.Si
sebagai
Terbaik Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran Semester II Tahun 2024
Kategori SATKER dengan Pagu Besar





Anugerah DIKTISAINTEK 2025



LLDIKTI Wilayah XI
sebagai
Gold Winner Anugerah Perencanaan
Penyelenggara SAKIP Terbaik Tahun 2024 Kategori
LLDIKTI



Anugerah DIKTISAINTEK 2025

LLDIKTI Wilayah XI
sebagai
Silver Winner Anugerah Data dan Informasi
Pelaporan Data PDDIKTI Terbaik (LLDIKTI Klaster Kecil)



Anugerah DIKTISAINTEK 2025



LLDIKTI Wilayah XI
sebagai
Bronze Winner Anugerah HUMAS
Diktisaintek
Siaran Pers (LLDIKTI)



Anugerah DIKTISAINTEK 2025

Muhammad Adie Karya (LLDIKTI Wilayah XI)
sebagai
Bronze Winner Anugerah HUMAS
Diktisaintek
Insan Humas (LLDIKTI)



PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

Pada tahun 2025 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI melakukan beberapa program crosscutting/collaborative berikut ini :

► Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Program crosscutting (lintas sektor) antara LLDIKTI Wilayah XI (Kalimantan) dengan PPAPT dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) berfokus pada tata kelola, akuntabilitas, dan memastikan program tepat sasaran. LLDIKTI berperan sebagai perpanjangan tangan PPAPT di daerah, menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di Perguruan Tinggi Swasta. Sinergi antara PPAPT (sebagai pembuat kebijakan dan penyedia dana) dan LLDIKTI Wilayah XI (sebagai pengawas dan koordinator wilayah) mencakup beberapa area sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan Penyegaran Regulasi

- PPAPT : Menyusun dan menetapkan regulasi, pedoman teknis, dan skema terbaru program KIP Kuliah (termasuk besaran bantuan, kriteria ekonomi, dan kuota).
- LLDIKTI Wilayah XI : Secara aktif mengorganisir dan melaksanakan sosialisasi regulasi terbaru tersebut kepada seluruh pimpinan dan operator KIP Kuliah di PTS di wilayah Kalimantan. Ini memastikan semua PTS memiliki pemahaman yang seragam dan terkini.

b. Monitoring dan Evaluasi

- PPAPT : Menetapkan kerangka dan indikator evaluasi keberhasilan program secara nasional.
- LLDIKTI Wilayah XI : Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala di PTS yang berada di wilayahnya.

c. Penegakan Integritas dan Akuntabilitas

- PPAPT : Menyediakan sistem pelaporan dan menetapkan standar akuntabilitas program.
- LLDIKTI Wilayah XI : Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PTS yang menjadi jalur penyaluran KIP Kuliah. LLDIKTI juga memastikan PTS menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan komitmen untuk mengelola program secara transparan dan tepat sasaran. LLDIKTI berfungsi sebagai lembaga yang memberikan teguran hingga rekomendasi sanksi jika ditemukan pelanggaran.

d. Pelaporan dan Sinkronisasi Data

- PPAPT : Menggunakan data KIP Kuliah dari PT yang diverifikasi untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Penerima dan memproses pencairan dana melalui bank penyalur.
- LLDIKTI Wilayah XI : Bertanggung jawab mengawasi dan memverifikasi ketepatan pelaporan data oleh PTS di wilayahnya, memastikan nama, NIM, dan program studi mahasiswa penerima sudah sesuai dan tercatat di PDDIKTI sebelum ditetapkan oleh PPAPT.

► Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek

Program crosscutting atau sinergi antara LLDIKTI Wilayah XI dengan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek di bawah Ditjen Diktiristek dalam pemberian hibah penelitian kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kalimantan dilaksanakan melalui mekanisme kontrak berjenjang. Sinergi ini memastikan kebijakan hibah penelitian dari pusat dapat tersalurkan dengan baik kepada PTS di wilayah kerjanya.

Program crosscutting ini menempatkan LLDIKTI Wilayah XI sebagai koordinator regional dan pelaksana administratif hibah penelitian dan PKM yang dananya berasal dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek. Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu penelitian di seluruh PTS Kalimantan. Beberapa program hibah kepada Perguruan Tinggi tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penelitian Dikti Tahun 2025;
2. Program Mahasiswa Berdampak Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;
3. Program Hilirisasi Riset – Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025;
4. Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025;
5. Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun 2025;
6. Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2025;
7. Program Kosabangsa Tahun 2025;
8. Program Bantuan Publikasi pada Jurnal Bereputasi Tahun 2025;
9. Program Insentif Artikel Berkualitas pada Jurnas Internasional Tahun 2025.

Dari 9 (sembilan) program hibah dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan tersebut, anggaran yang disalurkan melalui LLDIKTI Wilayah XI ke perguruan tinggi di Kalimantan sebesar Rp. 29.020.785.000,-.



► Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2025

Sinergi atau program crosscutting antara LLDIKTI Wilayah XI dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek dalam rangka Program Hibah kepada Mahasiswa (terutama Program Kreativitas Mahasiswa - PKM) berfokus pada peningkatan partisipasi, pembinaan kualitas proposal, dan pengawasan implementasi kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

LLDIKTI Wilayah XI berfungsi sebagai penggerak, pembina, dan fasilitator regional untuk menyukseskan program nasional yang digagas oleh Belmawa.

Tujuan utama program sinergi ini adalah :

1. Memastikan PTS di Wilayah XI tidak tertinggal dalam perolehan dana hibah PKM dan meningkatkan perwakilannya di PIMNAS;
2. Menjamin bahwa dana hibah digunakan secara efektif untuk menghasilkan luaran kreativitas mahasiswa yang berdampak;
3. Memperkuat peran Lembaga Kemahasiswaan di PTS melalui pendampingan yang intensif.

Peran dari Belmawa adalah penyediaan program dan dana, sementara LLDIKTI Wilayah XI berperan dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program tersebut pada PTS di Kalimantan. Alokasi anggaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2025 sebesar Rp. 299.380.000,- yang disalurkan kepada PTS yang berhasil lulus seleksi.

Pencegahan Kekerasan pada Perguruan Tinggi

Program crosscutting selanjutnya antara LLDIKTI Wilayah XI dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah dalam upaya Pencegahan 5 Dosa Pendidikan Tinggi yang merupakan salah satu kebijakan Kemdiktisaintek yang ditetapkan melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. . Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan beretika pada seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Peran dari Belmawa adalah bertindak sebagai pembuat regulasi dan penyedia kerangka kebijakan, sementara LLDIKTI Wilayah XI bertindak sebagai fasilitator dan pengawas regional untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan dengan baik di tingkat PTS. LLDIKTI Wilayah XI secara aktif melakukan monitoring dan mendampingi proses pembentukan Satgas PPKPT di PTS dan memastikan PTS menyediakan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi satgas PPKPT.

▶ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Program crosscutting antara LLDIKTI Wilayah XI dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan kolaborasi strategis untuk memastikan penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi berjalan selaras dengan pembinaan di tingkat wilayah. Bentuk kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah Sosialisasi IAPT 4.0 dan Sapto 2.0 dengan menghadirkan seluruh PTS di Kalimantan secara hybrid. Kegiatan ini sebagai upaya BAN-PT bersama dengan LLDIKTI Wilayah XI untuk mitigasi risiko agar perguruan tinggi di wilayah Kalimantan tidak kehilangan status akreditasinya akibat keterlambatan informasi atau kesalahan teknis penyusunan dokumen.

Peran LLDIKTI Wilayah XI dalam akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai fasilitator dan pendamping, sedangkan BAN-PT sebagai penyusun regulasi dan penyediaan tim asesor penilai.



PENUTUP

KESIMPULAN

Capaian keberhasilan pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 110,77%. Secara keseluruhan dari 9 target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk 4 sasaran dinyatakan berhasil atau melebihi target kinerja. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 147.158.438.967,- atau 96,98% dari total pagu anggaran 2025 dengan angka efisiensi terhadap pencapaian sasaran kinerja sebesar 13,79%.

Kendala yang secara umum dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah keterbatasan kemampuan perguruan tinggi swasta dalam memenuhi kriteria pemenuhan capaian kinerja sesuai peraturan. Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- Capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 sudah sangat baik dibuktikan dengan capaian semua indikator kinerja telah melebihi dari target akhir perjanjian kinerja tahun 2025, hal tersebut sebagai cerminan bahwa pengelolaan program kegiatan pada LLDIKTI Wilayah XI sudah baik dan berbasis kinerja. Capaian tahun 2025 yang melampaui target harus dijadikan baseline (standar minimal) baru. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026 wajib menetapkan target yang lebih menantang namun tetap realistis;
- Tingkatkan kualitas pengukuran kinerja pada tahun yang akan datang dengan melakukan penajaman pada indikator kinerja utama, penguatan validitas dan reliabilitas data, dan analisis yang lebih mendalam terhadap indikator kinerja;
- Setiap tim kerja secara berkala melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan kepada stakeholder untuk menjadi masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna layanan;
- Tim IT dan Perencanaan segera melakukan pemutakhiran pada aplikasi eSAKIP agar sepenuhnya selaras dengan peraturan Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI yang terbaru apabila sudah ditetapkan;
- Seluruh pegawai agar terus meningkatkan kerjasama untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal.

A decorative horizontal line consisting of a series of yellow diamonds of varying sizes, arranged in a wave-like pattern.



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XI
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Akbar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.


Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Khairul Munadi
NIP 197108271999031005

Banjarmasin, 19 Mei 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XI


Muhammad Akbar
NIP 196707021994031004

Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91%
	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94%

[S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28,93%
	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3,26%
	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32%
[S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73%
	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25%
[S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.1] Predikat SAKIP	AA
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 77.404.296.000
2.	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 53.911.451.000
Total Anggaran			Rp. 131.315.747.000





Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Muhammad Akbar



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	91
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	94
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	28.93
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	3.26
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	32
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	73
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	25
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	AA
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp74.522.423.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp77.221.910.000
Total Anggaran			Rp151.744.333.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Khairul Munadi

Banjarmasin, 5 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan
 Pendidikan Tinggi Wilayah XI
 Muhammad Akbar



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan I
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan I tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	%	90	97.04
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	%	93.7	93.67
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28.93	%	28.93	31.01
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3.26	%	3.26	4.27
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32	%	25	23.42
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	%	70	70.25
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	%	23.9	27.22
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan triwulan I tahun 2025 kepada 270 responden, sebanyak 262 atau 97,04% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan, LLDIKTI Wilayah XI selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dari sistem yang telah ada salah satunya adalah aplikasi PINANDU. Untuk memudahkan perhitungan survey kepuasan pengguna yang saat ini dilakukan secara manual, akan dilakukan integrasi dengan aplikasi PINANDU sehingga nanti perhitungan kepuasan sudah dapat dilihat secara realtime lewat sistem.

Kendala/Permasalahan

1. Standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI belum dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
2. Perhitungan kepuasan pengguna belum terintegrasi dengan PINANDU.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mensosialisasikan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI secara berkala pada seluruh media sosial dan media lainnya.
2. Melakukan integrasi survey kepuasan dengan aplikasi PINANDU

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan I tahun 2025 adalah 93,67% atau 148 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah memenuhi target rencana aksi triwulan I 2024 sebesar 93,7%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI per 31 Maret 2025 dari 158 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan, Ada 148 (93,6%) Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan ada 10 (6,3%) Perguruan Tinggi yang tidak/belum Terakreditasi. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi Implementasi Sistem Pengelolaan Akreditasi Daring SAPTO BAN-PT 2.0 tanggal 27 Februari 2025
2. Membentuk tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang terdiri dari beberapa dosen berpengalaman dari PTN dan PTS. Salah satu tupoksi utama dari tim EKPT adalah melakukan evaluasi kepada Perguruan Tinggi yang tidak terakreditasi. Dengan diadakannya evaluasi, LLDIKTI XI dapat mengetahui letak kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi khususnya dalam hal akreditasi.
3. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pada Triwulan I terdapat 4 Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen melalui laman SIAGA, antara lain : 1. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi di Kota Pontianak dan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di Kota Pontianak menjadi Universitas Yarsi Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (2 PTS LLDIKTI XI); 2. Penggabungan STIE Indonesia Pontianak di Kota Pontianak dan ASMI Pontianak di Kota Pontianak menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indograha Manajemen (2 PTS LLDIKTI XI) 3. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dengan Akademi Kebidanan Sari Mutiara di Kota Medan menjadi Universitas Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Batara (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I); 4. Penggabungan Politeknik Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Multicom di Kota Pematangsiantar menjadi Universitas Borneo Merdeka di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Intelektual Indonesia (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I).

Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA.

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya sarana dan prasarana, Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa. Semakin canggih juga semakin baik.
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi.
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat, Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar.
4. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.
6. Proses penggabungan PTS sangat tergantung dari kesediaan pihak yayasan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana.
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen.
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan.
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0
5. Pemantauan proses 4 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen tersebut melalui laman SIAGA



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan I tahun 2025 adalah 31.01% atau 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 28.93%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025 yang Pelaksanaan magang dimulai sejak 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025 yang bekerjasama dengan Mitra-mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pembelajaran di pendidikan tinggi semakin terhubung dengan realitas dunia kerja dan semakin relevan terhadap kebutuhan zaman untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa, meningkatkan kompetensi, dan mendorong kontribusi langsung kepada masyarakat serta industri sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep “Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program ini terutama Program Magang Berdampak tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi mahasiswa dalam dunia kerja, tetapi juga untuk mencetak agen perubahan yang mampu menjawab tantangan masa depan, di bagian akademik kemahasiswaan juga untuk memperluas dan membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan Kampus Berdampak.

Kendala/Permasalahan

Belum ada koordinasi secara teknis antara kementerian dengan LLDIKTI Wilayah XI terkait program Kampus Berdampak

Strategi/Tindak Lanjut

Tim kerja Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal yang disebutkan, yaitu memperbanyak sosialisasi atau pengenalan program Kampus Berdampak melalui berbagai kegiatan, merupakan pendekatan yang sangat baik dan diperlukan. Sosialisasi yang efektif adalah fondasi untuk memastikan program tersebut dikenal luas, dipahami tujuannya, dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf) serta mitra terkait.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan I tahun 2025 adalah 4.27%



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

atau 7.051 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 3.26%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik.

Kendala/Permasalahan

1. Belum ada koordinasi secara teknis antara kementerian dengan LLDIKTI Wilayah XI terkait program Kampus Berdampak
2. Masih kurangnya dukungan PTS terhadap prestasi mahasiswa
3. Belum tersedianya akses LLDIKTI ke sistem SIMKATMAWA

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tim kerja Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal yang disebutkan, yaitu memperbanyak sosialisasi atau pengenalan program Kampus Berdampak melalui berbagai kegiatan, merupakan pendekatan yang sangat baik dan diperlukan. Sosialisasi yang efektif adalah fondasi untuk memastikan program tersebut dikenal luas, dipahami tujuannya, dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf) serta mitra terkait.
2. Memberikan informasi terkait ajang/lomba/kejuaraan antar mahasiswa
3. Koordinasi dengan tim SIMKATMAWA Kementerian perihal permintaan akses untuk LLDIKTI

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan I tahun 2025 adalah 23.42% atau 37 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I sebesar 25%. PTS yang telah memenuhi kriteria umumnya memiliki regulasi internal berupa Surat Keputusan atau Peraturan Rektor, pembentukan satuan tugas PPKS, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, pencegahan kekerasan seksual, bahaya narkoba, dan penguatan integritas sivitas akademika. Beberapa PTS juga telah memasukkan nilai-nilai tersebut dalam kurikulum, kegiatan mahasiswa, serta program orientasi mahasiswa baru. Sementara itu, sebagian besar PTS lainnya masih berada pada tahap penyusunan kebijakan internal, koordinasi dengan unit terkait, serta menunggu pendampingan teknis dari LLDIKTI untuk memastikan kesesuaian format dan substansi dokumen. Hingga saat ini, surat resmi terkait pedoman pelaksanaan IKU tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga proses pelaporan masih mengacu pada ketentuan tahun sebelumnya sambil menunggu arahan resmi dari Ditjen Diktiristek.

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Belum terbitnya surat resmi pedoman IKU tahun 2025 menyebabkan sebagian PTS belum memiliki acuan teknis yang jelas dalam penyusunan dan pelaporan implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.
2. Tingkat pemahaman dan komitmen pimpinan PTS masih beragam, sehingga proses pembentukan regulasi internal serta satuan tugas PPKS belum merata.
3. Terbatasnya sumber daya dan pendampingan teknis dari LLDIKTI juga memengaruhi percepatan implementasi di lapangan.
4. Sebagian PTS mengalami kendala administratif dalam mengunggah bukti dukung pelaporan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi seluruh PTS terkait penyusunan dan implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi, termasuk penyusunan regulasi internal dan pembentukan satuan tugas PPKS.
2. Melakukan monitoring dan pendampingan berkala terhadap PTS yang belum melaporkan implementasi, guna memastikan kesesuaian dengan standar kebijakan yang ditetapkan Ditjen Diktiristek.
3. Menyusun panduan internal sementara sambil menunggu terbitnya surat resmi pedoman IKU tahun 2025, agar proses pelaporan tetap terarah.
4. Mendorong peningkatan komitmen pimpinan PTS melalui surat edaran dan koordinasi langsung, sehingga target implementasi dapat tercapai secara bertahap.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan **[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus**

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan I tahun 2025 adalah 70.25% atau 112 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I sebesar 70%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus.

Kendala/Permasalahan

1. Beberapa PTS belum melaporkan data dosen berkegiatan diluar kampus
2. Pemahaman PTS dan dosen terhadap pemenuhan kriteria dosen berkegiatan diluar kampus masih belum optimal meskipun telah dilakukan beberapa kali bimbingan teknis
3. Terdapat beberapa Dosen yang telah melakukan kegiatan di luar kampus namun tidak melaporkan ke Pimpinan PTS
4. Sebagian besar PTS belum ada menjalin kerjasama, sebagian lainnya tidak mempunyai MoU (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) , MoA (Memorandum of Agreement / Perjanjian Kerja Sama) dan IA (wujud pelaksanaan dari MoA), serta tidak mendokumentasikan dokumen kegiatan lainnya.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyusun rencana kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan kualitas Dosen berkegiatan di luar kampus dan dilanjutkan dengan pendampingan ke PTS
2. LLDIKTI membuat edaran secara berkala terkait permintaan data Dosen berkegiatan di luar kampus



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

3. Menghimbau kepada Dosen yang telah melakukan kegiatan di luar kampus untuk melaporkan ke Pimpinan PTS nya.
4. Memotivasi dan memberikan dukungan kepada dosen-dosen di PTS agar melaksanakan kegiatan di luar kampus.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan I tahun 2025 adalah 27.22% atau 43 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I dan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 25%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat lima perguruan tinggi yang telah memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra, yaitu : Stikes Suaka Insan Universitas Darwan Ali Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Secara kuantitatif, total terdapat 10 program studi dari 5 perguruan tinggi swasta yang terlibat aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai macam mitra, yang mencakup dunia industri, instansi pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat. Secara umum, capaian pada Triwulan I ini menunjukkan bahwa program studi di lingkungan perguruan tinggi telah berprogres positif dalam mengintegrasikan unsur kemitraan sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma, dan diharapkan pada triwulan berikutnya jumlah kerja sama aktif serta kualitas implementasinya dapat terus meningkat, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan.

Kendala/Permasalahan

1. Mitra kerja sama tidak sesuai kriteria
2. PTS belum menyusun laporan pelaksanaan kerjasama
3. Kerja sama tidak diimplementasikan dengan baik oleh PTS

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan evaluasi secara berkala pada data kerja sama yang dilaporkan PTS

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdiktisaintek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV tahun 2025. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2024 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,2 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP ditahun



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2025. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi LHE SAKIP 2025. Pada tahun 2025 program prioritas tim SAKIP LLDIKTI Wilayah XI adalah pengembangan secara terus menerus aplikasi eSAKIP yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Kegiatan tim SAKIP yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2025 adalah penetapan tim SAKIP tahun 2025 dan menyusun laporan kinerja tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat beberapa kelemahan pada fitur eSAKIP
2. Masih banyak SDM SAKIP yang belum mempunyai sertifikat diklat SAKIP
3. Belum terbitnya Rencana Strategis Kemdiktisaintek
4. Keputusan Menteri terkait Indikator Kinerja Utama LLDIKTI tahun 2025 belum ada
5. Program kerja belum berjalan dengan baik karena perjanjian kinerja tahun 2025 belum disusun

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan pada fitur aplikasi eSAKIP
2. Mengikutsertakan SDM SAKIP pada diklat SAKIP
3. Menunggu penetapan Renstra Kemdiktisaintek dan IKU LLDIKTI
4. Penyesuaian program kerja dengan perjanjian kinerja tahun berjalan

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan Maret tahun 2025 masih belum dapat diperhitungkan karena aspek nilai perencanaan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada aspek perencanaan nilai disistem Monev Kemenkeu penggunaan RO SBK dan Efisiensi RO SBK masih 0. Untuk sementara berdasarkan data dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 100. Pada triwulan I, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2025, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, hampir seluruh transaksi keuangan yang dibayar oleh bendahara (95%) sudah menggunakan CMS atau cashless. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan terkait efisiensi yang tertuang dalam instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 menyebabkan anggaran LLDIKTI Wilayah XI diblokir sebesar Rp. 22.962.127.000,- yang tersebar dibelanja pegawai dan belanja barang. Dengan kebijakan efisiensi tersebut LLDIKTI Wilayah XI harus melakukan penyesuaian kembali beberapa program kerja sehingga program kerja tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Kendala/Permasalahan

1. Sistem monev Kemenkeu masih belum menampilkan nilai penggunaan dan efisiensi RO SBK sehingga NKA tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. Realisasi belanja pegawai dan barang masih sangat rendah;
3. Blokir anggaran karena kebijakan efisiensi dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2025.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penilaian Aspek perencanaan pada monev kemenkeu;
2. Menyusun strategi percepatan realisasi anggaran belanja barang;
3. Melakukan penyesuaian program kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	8	155	Rp4.937.739.000	Rp1.584.735.091	32.09
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1694	1753	Rp72.466.557.000	Rp58.028.684.000	80.08
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp825.000	8.25
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp489.586.000	Rp203.587.983	41.58
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp76.722.324.000	Rp62.707.999.344	81.73
Total Anggaran					Rp154.626.206.000	Rp122.525.831.418	79.24

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XI secara terus menerus melalui sistem yang telah dibangun
2. Setiap tim kerja agar selalu menjalin kerjasama yang baik karena setiap indikator kinerja saling beririsan satu dengan yang lainnya
3. Pertahankan kecepatan dan pastikan integrasi data ke sistem PDDikti berjalan *real-time* untuk menjaga akurasi data
4. Selalu lakukan evaluasi terhadap semua sistem yang sudah dibangun oleh LLDIKTI Wilayah XI untuk menjadi dasar dalam perbaikan kualitas yang berkelanjutan

Banjarmasin, 6 November 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala LLDIKTI Wilayah XI
 Muhammad Akbar



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan II
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	%	90	97.36
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	%	93.7	94.30
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28.93	%	28.93	31.01
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3.26	%	3.26	4.27
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32	%	28	26.58
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	%	71	70.89
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	%	23.9	28.48
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan sampai dengan triwulan II (januari – Juni) tahun 2025 kepada 455 responden, sebanyak 443 atau 97,36% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan, LLDIKTI Wilayah XI selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dari sistem yang telah ada salah satunya adalah aplikasi PINANDU. Perhitungan Kepuasan Pengguna telah terintegrasi dengan aplikasi PINANDU yang menjadi dasar dalam mengambil kebijakan terkait peningkatan kualitas layanan. LLDIKTI Wilayah XI juga telah melaksanakan kegiatan FGD dengan stakeholder dan tim teknis layanan untuk diskusi terkait Langkah yang akan dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Kegiatan ini direncanakan rutin dilakukan untuk mengetahui secara pasti kendala dan ekspektasi pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XI.

Kendala/Permasalahan

1. Standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI belum dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
2. Peta proses bisnis dan SOP terbaru belum ditetapkan;
3. Ekspektasi pengguna sangat tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XI.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mensosialisasikan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI secara berkala pada seluruh media sosial dan media lainnya;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta proses bisnis dan SOP yang terbaru;
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelayanan LLDIKTI Wilayah XI.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan II tahun 2025 adalah 94,30% atau 149 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah memenuhi target rencana aksi triwulan II 2024 sebesar 93,7%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI per 30 Juni 2025 dari 158 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan, Pada triwulan II tahun 2025 ada tambahan 1 PTS yang terakreditasi sehingga total 149 (94,3%) Perguruan Tinggi yang terakreditasi. 9 PTS (5%) Perguruan Tinggi yang tidak/belum Terakreditasi yang saat ini sedang dalam proses pendampingan & pengusulan Akreditasi. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

3. Menyebarkan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT Tahun 2024 kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi.
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0.

Pada Triwulan II, 4 (empat) usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) masih proses pengusulan / Perbaikan dokumen melalui laman SIAGA, antara lain : 1. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi di Kota Pontianak dan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di Kota Pontianak menjadi Universitas Yarsi Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (2 PTS LLDIKTI XI); 2. Penggabungan STIE Indonesia Pontianak di Kota Pontianak dan ASMI Pontianak di Kota Pontianak menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indograha Manajemen (2 PTS LLDIKTI XI) 3. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dengan Akademi Kebidanan Sari Mutiara di Kota Medan menjadi Universitas Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Batara (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I); 4. Penggabungan Politeknik Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Multicom di Kota Pematangsiantar menjadi Universitas Borneo Merdeka di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Intelektual Indonesia (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I).

Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA.

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya sarana dan prasarana, Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa. Semakin canggih juga semakin baik.
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi.
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat, Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar.
4. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.
6. Proses penggabungan PTS sangat tergantung dari kesediaan pihak yayasan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana.
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen.
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0
5. Pemantauan proses 4 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen tersebut melalui laman SIAGA

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan II tahun 2025 adalah 31.01% atau 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan II 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 28.93%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025 yang Pelaksanaan magang dimulai sejak 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025 yang bekerjasama dengan Mitra-mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pembelajaran di pendidikan tinggi semakin terhubung dengan realitas dunia kerja dan semakin relevan terhadap kebutuhan zaman untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa, meningkatkan kompetensi, dan mendorong kontribusi langsung kepada masyarakat serta industri sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep “Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program ini terutama Program Magang Berdampak diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kecakapan akademis, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Inisiatif ini memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar lingkup perkuliahan.

Kendala/Permasalahan

1. Belum ada koordinasi secara teknis antara kementerian dengan LLDIKTI Wilayah XI terkait program Kampus Berdampak
2. Keterbatasan akses ke simbolmawa sebagai aplikasi yang mengakomodir program kampus berdampak

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XI untuk triwulan ke-2 melalui bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal yang disebutkan, yaitu memperbanyak sosialisasi atau pengenalan program Kampus Berdampak melalui berbagai kegiatan. Sosialisasi yang efektif adalah pondasi untuk memastikan program tersebut dikenal luas, dipahami tujuannya, dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf) serta mitra terkait.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan II tahun 2025 adalah 4.27% atau 7.051 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 3.26%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Pada triwulan II LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi untuk mendukung kriteria mahasiswa yang meraih prestasi.

Kendala/Permasalahan

1. Belum ada koordinasi secara teknis antara kementerian dengan LLDIKTI Wilayah XI terkait program Kampus Berdampak
2. Kurangnya kemampuan Perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI wilayah XI untuk mengikuti event prestasi tingkat nasional diluar daerah
3. Belum tersedianya akses LLDIKTI ke sistem SIMKATMAWA
4. Keterbatasan akses ke simbelmawa sebagai aplikasi yang mengakomodir program kampus berdampak

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tim kerja Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal yang disebutkan, yaitu memperbanyak sosialisasi atau pengenalan program Kampus Berdampak melalui berbagai kegiatan, merupakan pendekatan yang sangat baik dan diperlukan. Sosialisasi yang efektif adalah fondasi untuk memastikan program tersebut dikenal luas, dipahami tujuannya, dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf) serta mitra terkait
2. Mendorong PTS untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam event kejuaraan nasional dan internasional
3. Koordinasi dengan tim SIMKATMAWA dan SIMBELMAWA Kementerian perihal permintaan akses untuk LLDIKTI

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan II tahun 2025 adalah 26.58% atau 42 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini belum mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II sebesar 30% namun sudah meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan I. Kenaikan ini menunjukkan mulai



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

tumbuhnya kesadaran dan komitmen pimpinan PTS terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai integritas dan keamanan kampus. Sebagian besar PTS yang baru melaporkan telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas PPKS, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual dan intoleransi. Beberapa kampus juga mulai memasukkan materi antikorupsi dan antinarkoba dalam kegiatan orientasi mahasiswa serta penguatan karakter di lingkungan akademik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah PTS yang memerlukan pendampingan lanjutan untuk penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal. Hingga kini, pedoman resmi IKU tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga pelaporan tetap mengacu pada format tahun sebelumnya sambil menunggu arahan Ditjen Diktiristek.

Kendala/Permasalahan

1. Sebagian besar PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan masih mengalami kesulitan dalam penyusunan regulasi internal dan pembentukan satuan tugas PPKS, terutama di PTS dengan sumber daya manusia terbatas.
2. Tingkat pemahaman pimpinan dan unit pelaksana terhadap indikator serta bukti dukung yang diperlukan juga masih bervariasi, sehingga proses pelaporan belum optimal.
3. Belum terbitnya surat resmi pedoman IKU tahun 2025 menyebabkan sebagian PTS ragu untuk memfinalisasi laporan karena belum ada format dan mekanisme pelaporan terbaru dari Ditjen Diktiristek.
4. Keterbatasan waktu dan pendampingan teknis dari LLDIKTI juga memengaruhi percepatan implementasi.
5. Beberapa PTS masih menganggap kebijakan ini sebatas pemenuhan administrasi, belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya kampus.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan intensitas pendampingan teknis dan konsultasi daring/luring kepada PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan, termasuk memberikan contoh dokumen dan panduan penyusunan regulasi internal.
2. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Diktiristek guna memperoleh kejelasan dan percepatan penerbitan surat pedoman resmi IKU 2025 sebagai acuan pelaporan yang seragam.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tematik yang melibatkan pakar atau narasumber dari Kementerian serta lembaga mitra terkait isu antiintoleransi, PPKS, dan antikorupsi.
4. LLDIKTI juga akan mendorong komitmen pimpinan PTS melalui surat edaran dan forum koordinasi wilayah agar seluruh kampus dapat segera mengimplementasikan kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan II tahun 2025 adalah 70.89% atau 112 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini belum mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II sebesar 71%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Pada Triwulan II, perkembangan capaian IKU dosen berkegiatan di luar kampus di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI masih berfokus pada tindak lanjut hasil kerja serta pelaporan yang telah dilakukan pada triwulan sebelumnya. Pada periode ini belum terdapat pelaksanaan kegiatan baru yang bersifat langsung



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

maupun substantif terkait peningkatan capaian dosen berkegiatan di luar kampus. Fokus utama LLDIKTI Wilayah XI adalah memantau progres pelaporan dari PTS, memastikan kesesuaian dan penyesuaian data, serta menelusuri PTS yang belum menyampaikan data dukung maupun kelengkapan dokumen. Selain itu, komunikasi informal melalui koordinasi daring dan layanan konsultatif tetap dilakukan untuk menjaga kelancaran arus informasi. Secara keseluruhan, Triwulan II dimanfaatkan untuk penguatan koordinasi dan penyesuaian data dengan PTS sambil menunggu kesiapan perguruan tinggi dalam melengkapi persyaratan administrasi dan bukti kegiatan. Upaya ini diharapkan mampu meminimalkan hambatan administratif sebelum memasuki Triwulan selanjutnya, yang akan berfokus pada pelaksanaan monitoring lanjutan serta evaluasi peningkatan capaian. Pada Triwulan II ini, terdapat penambahan satu PTS yang berhasil menunjukkan peningkatan kinerja, yaitu Politeknik Nusantara Balikpapan. PTS tersebut sebelumnya telah menjalani monitoring dan evaluasi (monev) pada tahun 2024, dan pada tahun berikutnya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan, pendampingan, serta rekomendasi tindak lanjut yang diberikan pada tahun sebelumnya telah mampu diimplementasikan dengan baik oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Peningkatan ini diharapkan dapat menjadi contoh serta motivasi bagi PTS lainnya untuk terus mendorong keterlibatan dosen dalam kegiatan di luar kampus secara lebih optimal.

Kendala/Permasalahan

Pada Triwulan II, LLDIKTI Wilayah XI masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kelancaran pelaporan, di mana sebagian besar permasalahan tersebut merupakan lanjutan dari hambatan yang telah teridentifikasi pada Triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan, tercatat sebanyak 40 PTS belum menyampaikan laporan karena belum tersedianya dokumen kerja sama formal seperti Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementation Agreement (IA) yang menjadi dasar legal dan persyaratan administratif pelaksanaan kegiatan di luar kampus. Ketidakterpenuhan dokumen kerja sama ini mengakibatkan kegiatan yang telah dilakukan belum dapat dibuktikan secara resmi sebagai kelengkapan pelaporan. Selain itu, sejumlah faktor internal turut memperlambat proses penyampaian laporan, antara lain kondisi merger kelembagaan, status pembinaan, serta beberapa PTS yang berada pada tahap hampir tidak beroperasi (hampir tutup). Situasi tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas manajerial dan administratif, sehingga pelaporan IKU tidak menjadi prioritas utama. Untuk PTS yang telah mengirimkan data, hasil verifikasi menunjukkan masih banyak bukti pendukung yang belum lengkap atau tidak sesuai format, seperti ketiadaan surat tugas, output kegiatan, maupun identitas mitra kerja sama. Hingga Triwulan II, bimbingan teknis secara khusus terkait pemahaman indikator, mekanisme pelaporan, serta standar bukti dukung belum dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pimpinan perguruan tinggi dan dosen belum sepenuhnya memahami regulasi, persyaratan, serta ketentuan pembuktian keterlibatan dosen dalam kegiatan di luar kampus. Akibatnya, terdapat dosen yang telah melakukan kegiatan namun belum melaporkan secara resmi melalui sistem atau prosedur yang berlaku. Beberapa PTS juga memilih menunda pelaporan karena saat ini sedang berfokus pada agenda lain yang dianggap lebih mendesak, seperti penyelesaian audit mutu internal, reakreditasi program studi, dan penyusunan laporan tahunan. Kombinasi faktor administratif, struktural, dan persepsional ini menjadikan penyampaian pelaporan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. LLDIKTI Wilayah XI menilai bahwa permasalahan ini perlu ditangani melalui pendekatan pembinaan yang lebih intensif, termasuk penyusunan panduan teknis, kegiatan sosialisasi mendalam, serta monitoring berkala yang komprehensif pada Triwulan berikutnya. Dengan adanya rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan hambatan administratif dapat diminimalkan, peningkatan pemahaman dapat dicapai, serta komitmen pimpinan terhadap pencapaian IKU 3 dapat semakin diperkuat.

Strategi/Tindak Lanjut

Dalam upaya menjaga konsistensi capaian Indikator Kinerja Utama, LLDIKTI Wilayah XI terus memperkuat strategi tindak lanjut melalui pendekatan yang lebih intensif dan terarah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat pemantauan terhadap PTS yang telah menjalani pendampingan sebelumnya, serta memperluas cakupan sosialisasi kepada pimpinan, dosen, dan operator data agar pemahaman mengenai mekanisme pelaporan semakin meningkat, meskipun bimbingan teknis khusus terkait IKU ini belum dilaksanakan pada periode ini. Selain itu, LLDIKTI Wilayah XI secara berkala menerbitkan surat pengingat



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

kepada PTS yang belum menyampaikan data kegiatan dosen berkegiatan di luar kampus sebagai bentuk penguatan komitmen dan dorongan untuk segera memenuhi kewajiban administrasi. Kanal konsultasi terpadu yang dibuka juga turut membantu menjawab berbagai pertanyaan teknis dari dosen, operator data, maupun pihak pengelola perguruan tinggi, sehingga hambatan dalam proses pelaporan dapat diminimalisir. Berdasarkan perkembangan tersebut, capaian pada Triwulan II menunjukkan tren positif, menandakan bahwa PTS mulai lebih siap dalam menghadapi periode evaluasi berikutnya dengan pelaporan yang lebih terstruktur, terdokumentasi, serta selaras dengan ketentuan yang berlaku.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan II tahun 2025 adalah 28.48% atau 45 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II dan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 25%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. ada Triwulan II Tahun 2025, terdapat dua perguruan tinggi yang telah memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra, yaitu: Universitas Sari Mulia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Secara kuantitatif, total terdapat 7 program studi dari dua perguruan tinggi swasta yang terlibat aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai macam mitra strategis. Kemitraan yang dibangun mencakup berbagai sektor, antara lain dunia industri, instansi pemerintah daerah, lembaga penelitian, rumah sakit pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Bentuk kerja sama yang dilaksanakan pun beragam, mulai dari kegiatan magang mahasiswa, penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat terpadu, hingga penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan mitra. Melalui kegiatan ini, program studi dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan dunia kerja. Secara umum, capaian pada Triwulan II ini menunjukkan bahwa program studi di lingkungan perguruan tinggi telah berprogres positif dalam mengintegrasikan unsur kemitraan sebagai bagian penting dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Kemitraan yang terjalin tidak hanya berfokus pada pencapaian administratif semata, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan keluaran yang berdampak nyata, baik bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar maupun bagi pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa. Diharapkan pada triwulan berikutnya, jumlah kerja sama aktif serta kualitas implementasinya dapat terus meningkat. Dengan adanya kolaborasi yang berkesinambungan antara perguruan tinggi dan mitra eksternal, maka diharapkan terbentuk ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Upaya ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Kendala/Permasalahan

1. Mitra kerja sama tidak sesuai kriteria
2. PTS belum menyusun laporan pelaksanaan kerjasama
3. Kerja sama tidak diimplementasikan dengan baik oleh PTS.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Melakukan evaluasi secara berkala pada data kerja sama yang dilaporkan PTS
2. Melaksanakan pendampingan kerjasama kepada PTS

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdiktisaintek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV tahun 2025. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2024 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,2 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP ditahun 2025. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi LHE SAKIP 2025. Pada tahun 2025 program prioritas tim SAKIP LLDIKTI Wilayah XI adalah pengembangan secara terus menerus aplikasi eSAKIP yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 telah ditetapkan pada bulan Mei 2025. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi dan penyesuaian Kembali program kerja agar selaras dengan indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penyesuaian program kerja dilakukan secara tersistem melalui aplikasi eSAKIP dimana setiap tim kerja menyampaikan usulan program kerja beserta data dukung yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan untuk memberikan persetujuan.

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat beberapa kelemahan pada fitur eSAKIP
2. Terbatasnya kuota peserta dari Kementerian dalam pelaksanaan diklat SAKIP
3. Akses eSAKIP ke PDDIKTI bermasalah sehingga data dukung tidak dapat ditarik ke sistem
4. Belum terbitnya Rencana Strategis Kemdiktisaintek
5. Keputusan Menteri terkait Indikator Kinerja Utama LLDIKTI tahun 2025 belum ada
6. Program kerja belum berjalan dengan baik karena perjanjian kinerja tahun 2025 belum disusun

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan pada fitur aplikasi eSAKIP
2. Mengikutsertakan SDM SAKIP dalam diklat SAKIP meskipun dengan kuota yang terbatas
3. Koordinasi dengan tim Pusdatin terkait akses mirroring PDDIKTI ke eSAKIP
4. Menunggu penetapan Renstra Kemdiktisaintek dan IKU LLDIKTI
5. Penyesuaian program kerja dengan perjanjian kinerja tahun berjalan

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan Maret tahun 2025 masih belum dapat diperhitungkan karena aspek nilai perencanaan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada aspek perencanaan nilai disistem Monev Kemenkeu penggunaan RO SBK dan Efisiensi RO SBK masih 0. Untuk sementara berdasarkan data dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 99.58. Nilai IKPA tidak optimal karena penurunan nilai pada indikator penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP. Pada triwulan II, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2025, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Terkait dengan kebijakan blokir sesuai instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 menyebabkan anggaran LLDIKTI Wilayah XI diblokir sebesar Rp. 22.962.127.000,- telah dilakukan relaksasi sehingga sisa blokir anggaran menjadi 2.773.869.000 yang merupakan efisiensi 50% anggaran perjalanan dinas. Dengan kebijakan efisiensi tersebut LLDIKTI Wilayah XI harus melakukan penyesuaian kembali beberapa program kerja sehingga program kerja tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya salah satunya dengan optimalisasi penggunaan daring/hybrid pada setiap kegiatan. LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 23.310.459.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja dosen PNS. Anggaran tukin dosen PNS menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian oleh Kemendiktisaintek. Pada triwulan II telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas teknis penilaian kinerja dosen yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dosen PNS.

Kendala/Permasalahan

1. Sistem monev Kemenkeu masih belum menampilkan nilai penggunaan dan efisiensi RO SBK sehingga NKA tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. Realisasi belanja pegawai dan barang belum sesuai target dari Kemenkeu sehingga nilai indikator penyerapan anggaran tidak optimal;
3. Penyesuaian program kerja baru dilaksanakan karena Perjanjian kinerja baru ditetapkan pada bulan Mei 2025;
4. Dosen PNS belum memahami sepenuhnya terkait teknis klaim kinerja pada aplikasi SISTER untuk pembayaran tunjangan kinerja;
5. Asesor SPI untuk penilai kinerja dosen PNS belum ditetapkan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penilaian Aspek perencanaan pada monev kemenkeu;
2. Menyusun strategi percepatan realisasi anggaran belanja pegawai khususnya untuk belanja tunjangan profesi dosen;
3. Melakukan penyesuaian program kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan memaksimalkan penggunaan metode hybrid/daring dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkala kepada dosen terkait tata cara klaim kinerja pada SISTER;
5. Pembentukan tim SPI penilai kinerja dosen PNS.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	145	155	Rp4.937.739.000	Rp1.584.735.091	32.09
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1779	1753	Rp72.466.557.000	Rp58.028.684.000	80.08
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp825.000	8.25



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp489.586.000	Rp203.587.983	41.58
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp76.722.324.000	Rp64.187.729.233	83.66
Total Anggaran					Rp154.626.206.000	Rp124.005.561.307	80.2

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XI secara terus menerus melalui sistem yang telah dibangun
2. Setiap tim kerja agar selalu menjalin kerjasama yang baik karena setiap indikator kinerja saling beririsan satu dengan yang lainnya
3. Selalu lakukan evaluasi terhadap semua sistem yang sudah dibangun oleh LLDIKTI Wilayah XI untuk menjadi dasar dalam perbaikan kualitas sistem layanan yang berkelanjutan
4. Program kerja yang disusun agar dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama
5. Pertajam basis data LLDIKTI Wilayah XI melalui PDDIKTI sehingga data yang tersaji sudah reliable dengan kondisi lapangan sebenarnya

Banjarmasin, 7 November 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala LLDIKTI Wilayah XI Muhammad Akbar
---	---



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan III
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	%	91	97.70
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	%	94	92.41
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28.93	%	28.93	31.01
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3.26	%	3.26	4.27
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32	%	30	26.58
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	%	72	72.15
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	%	24	29.75
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan sampai dengan triwulan III (januari – September) tahun 2025 kepada 870 responden, sebanyak 850 atau 97,70% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Dalam ekosistem pendidikan tinggi yang dinamis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memegang peran sentral sebagai perpanjangan tangan Kementerian yang bertugas mengawal mutu dan memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya. Keberhasilan LLDIKTI dalam menjalankan mandat ini sangat bergantung pada satu faktor kunci: kualitas layanan yang diberikan kepada para stakeholder. Stakeholder utama LLDIKTI meliputi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai mitra binaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, hingga Masyarakat Umum dan Dunia Usaha/Industri (DUDI) yang menjadi pengguna lulusan. Peningkatan kualitas layanan kepada kelompok-kelompok ini bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan pendidikan tinggi.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas layanan LLDIKTI akan berujung pada penguatan daya saing lulusan dan perguruan tinggi secara keseluruhan. PTS yang terbantu oleh layanan prima akan lebih leluasa berinovasi, menghasilkan penelitian yang relevan, dan mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, komitmen LLDIKTI untuk terus berinovasi, menyederhanakan prosedur, dan menempatkan stakeholder sebagai prioritas utama adalah investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan tinggi nasional yang lebih maju dan berdaya saing.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, transparan, dan berkeadilan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI yang membawahi perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah Kalimantan, telah mengambil langkah strategis dengan meluncurkan Aplikasi Unit Layanan Terpadu Online (PINANDU). PINANDU adalah sebuah terobosan layanan berbasis website yang secara menyeluruh mengubah cara stakeholder berinteraksi dengan LLDIKTI Wilayah XI. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dan birokrasi, mengingat luasnya cakupan wilayah Kalimantan. Pada triwulan III Perhitungan Kepuasan Pengguna telah terintegrasi sepenuhnya dengan aplikasi PINANDU dimana stakeholder langsung dapat memberikan tanggapan setelah menerima layanan oleh LLDIKTI. LLDIKTI Wilayah XI juga aktif melaksanakan pertemuan rutin dengan stakeholder untuk membahas masalah peningkatan kualitas layanan.

Kendala/Permasalahan

1. Standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI belum dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
2. Peta proses bisnis dan SOP terbaru belum ditetapkan;
3. Ekspektasi pengguna sangat tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XI.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mensosialisasikan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI secara berkala pada seluruh media sosial dan media lainnya;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta proses bisnis dan SOP yang terbaru;
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelayanan LLDIKTI Wilayah XI.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan III tahun 2025 adalah 92.41% atau 146 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini belum memenuhi target rencana aksi triwulan III 2024 sebesar 94%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI per 31 Oktober 2025 dari 158 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan, Pada triwulan III tahun 2025 ada pengurangan 3 PTS yang terakreditasi. Pengurangan ini disebabkan karena beberapa PTS tidak lolos pantau mutu dari BAN-PT sehingga total PT yang terakreditasi adalah 146 PTS (92,4%). 12 PTS (7%) yang tidak/belum Terakreditasi saat ini sedang dalam proses pengusulan akreditasi, proses penutupan maupun merger dengan Perguruan Tinggi lain. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0 bekerjasama dengan BAN-PT tanggal 14 Juli 2025.
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi.
4. Menyebarkan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT Tahun 2024 kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi.
5. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0.

Pada Triwulan III, 4 (empat) usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) masih proses pengusulan / Perbaikan dokumen melalui laman SIAGA, antara lain : 1. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi di Kota Pontianak dan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di Kota Pontianak menjadi Universitas Yarsi Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (2 PTS LLDIKTI XI); 2. Penggabungan STIE Indonesia Pontianak di Kota Pontianak dan ASMI Pontianak di Kota Pontianak menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indograha Manajemen (2 PTS LLDIKTI XI) 3. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dengan Akademi Kebidanan Sari Mutiara di Kota Medan menjadi Universitas Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Batara (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I); 4. Penggabungan Politeknik Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Multicom di Kota Pematangsiantar menjadi Universitas Borneo Merdeka di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Intelektual Indonesia (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I). Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA.

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya sarana dan prasarana, Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa. Semakin canggih juga semakin baik.
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi.
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat, Penelitian dan pengabdian akan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar.

4. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.
6. Proses penggabungan PTS sangat tergantung dari kesediaan pihak yayasan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana.
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen.
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan.
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0
5. Pemantauan proses 4 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen tersebut melalui laman SIAGA

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan III tahun 2025 adalah 31.01% atau 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan III 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 28.93%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025 yang bekerjasama dengan Mitra-mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), meluncurkan Program Magang Berdampak 2025 sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep "Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program ini terutama Program Magang Berdampak ada 397 lowongan dari Instansi dan Industri mitra dan bidang usaha yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Kendala/Permasalahan

Program magang berdampak, yang merupakan program dari Kampus berdampak Instansi dan Industri mitra dan bidang usaha yang tersedia jadi saat ini sebanyak 397 lowongan yang hanya ada beberapa berlokasi di Kalimantan yang sulit dilaksanakan oleh PTS yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI. Beberapa PTS yang masih belum mendapatkan/memahami manfaat dari Kampus Berdampak dan membutuhkan dana



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

yang besar untuk perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan Kampus Berdampak terutama Kampus Berdampak mandiri. PTS masih kekurangan SDM dalam pengelolaan Kampus Berdampak di perguruan tingginya

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XI untuk triwulan ke-3 melalui bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal sosialisasi atau pengenalan panduan program Kampus Berdampak, mendorong PTS ikut aktif dalam kegiatan baik itu melibatkan mahasiswa sebagai peserta, mitra dan mentor sebagai penyedia magang dan studi independen, serta koordinator perguruan tinggi (PT) dan dinas pendidikan provinsi (DPP) yang bersinergi untuk meningkatkan kualitas program. Untuk itu, diperlukan rekrutmen mahasiswa, mitra, koordinator PT, dan DPP dengan persyaratan yang sesuai.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan III tahun 2025 adalah 4.27% atau 7.051 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan III 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 3.26%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Pada triwulan II LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi untuk mendukung kriteria mahasiswa yang meraih prestasi.

Kendala/Permasalahan

1. LLDIKTI belum mendapat akses maupun diberikan data dari simkatmawa (Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan) sehingga data prestasi masih menggunakan data dari PDDIKTI
2. Kurangnya event prestasi tingkat nasional untuk perguruan tinggi di wilayah kalimantan
3. Kurangnya kemampuan Perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI wilayah XI untuk mengikuti event prestasi tingkat nasional diluar daerah
4. PTS kebanyakan hanya berfokus ke Hibah-hibah/Program program Akademik seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sedangkan prestasi di luar bidang akademik kurang mendapat perhatian dari Perguruan Tinggi. Harapannya Perguruan Tinggi juga harus memperhatikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di perguruan tinggi mereka juga harus fokus untuk mengembangkan mahasiswa di luar bidang akademik.
5. Keterbatasan akses ke simbelmawa sebagai aplikasi yang mengakomodir program kampus berdampak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi melalui surat resmi ke belmawa terkait permintaan data dan akses simkatmawa sehingga bisa memudahkan untuk pengumpulan data prestasi mahasiswa
2. Memfasilitasi Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dengan mengirimkan narasumber yang sudah terverifikasi nasional. Harapannya nantinya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di perguruan tinggi bisa dilakukan pembinaan mahasiswa untuk bisa mengikuti event prestasi tingkat nasional tidak hanya event di dalam bidang akademik maupun di luar bidang akademik

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan III tahun 2025 adalah 26.58% atau 42 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini belum mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II sebesar 30% namun sudah meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan I. Capaian ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran dan komitmen pimpinan PTS terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai integritas dan keamanan kampus. Sebagian besar PTS yang baru melaporkan telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas PPKS, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual dan intoleransi. Beberapa kampus juga mulai memasukkan materi antikorupsi dan antinarkoba dalam kegiatan orientasi mahasiswa serta penguatan karakter di lingkungan akademik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah PTS yang memerlukan pendampingan lanjutan untuk penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal. Hingga kini, pedoman resmi IKU tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga pelaporan tetap mengacu pada format tahun sebelumnya sambil menunggu arahan Ditjen Diktiristek.

Kendala/Permasalahan

1. Sebagian besar PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan masih mengalami kesulitan dalam penyusunan regulasi internal dan pembentukan satuan tugas PPKS, terutama di PTS dengan sumber daya manusia terbatas.
2. Tingkat pemahaman pimpinan dan unit pelaksana terhadap indikator serta bukti dukung yang diperlukan juga masih bervariasi, sehingga proses pelaporan belum optimal.
3. Belum terbitnya surat resmi pedoman IKU tahun 2025 menyebabkan sebagian PTS ragu untuk memfinalisasi laporan karena belum ada format dan mekanisme pelaporan terbaru dari Ditjen Diktiristek.
4. Keterbatasan waktu dan pendampingan teknis dari LLDIKTI juga memengaruhi percepatan implementasi.
5. Beberapa PTS masih menganggap kebijakan ini sebatas pemenuhan administrasi, belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya kampus. Untuk itu, pendampingan lebih intensif dan koordinasi langsung masih sangat dibutuhkan agar seluruh PTS dapat mencapai target implementasi secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pendampingan teknis dan konsultasi intensif kepada PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan, termasuk penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas PPKS, dan penyusunan bukti dukung pelaporan.
2. Melakukan koordinasi aktif dengan Ditjen Diktiristek untuk percepatan penerbitan surat resmi pedoman IKU 2025 sebagai acuan pelaporan yang seragam.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, workshop, dan pelatihan bagi pimpinan dan staf PTS terkait antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi, dengan materi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

praktik terbaik dan studi kasus.

4. LLDIKTI akan mendorong komitmen pimpinan PTS melalui forum koordinasi, surat edaran, dan monitoring berkala, agar seluruh kampus mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan menjadikannya bagian dari budaya akademik. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target implementasi 100% hingga akhir tahun.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan III tahun 2025 adalah 72.15% atau 114 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan III sebesar 72%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen, kesadaran, serta progres positif dari sebagian besar PTS dalam mendorong dosennya untuk aktif melaksanakan kegiatan di luar lingkungan institusi, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kemitraan strategis, serta peningkatan peran sosial perguruan tinggi di masyarakat. Adapun penambahan persentase tersebut berasal dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan (ITS NU Kalimantan) dan Universitas PGRI Palangka Raya, yang merupakan dua dari lima PTS yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada akhir bulan Juli dan awal Agustus 2025. Hasil monev menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut mampu menindaklanjuti rekomendasi pembinaan dengan menata kelengkapan dokumen pendukung, memperluas jangkauan kerja sama, serta mendorong partisipasi dosen dalam kegiatan secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pembinaan, pendampingan, serta saran tindak lanjut yang diberikan sebelumnya dapat diimplementasikan dengan baik oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, baik dari sisi administratif maupun substansi kegiatan. Adanya peningkatan ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) sekaligus motivasi bagi PTS lainnya untuk terus meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan di luar kampus secara lebih optimal, berkelanjutan, dan terukur. Dengan demikian, capaian IKU tidak hanya memberikan dampak pada indikator kinerja lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dosen, reputasi kampus, serta penguatan jejaring kerja sama akademik yang strategis.

Kendala/Permasalahan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dosen di luar kampus masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administratif maupun pemahaman substansi. Secara umum, kendala utama yang dihadapi antara lain:

1. Aspek Administratif dan Kerjasama: Banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) belum memiliki atau belum melengkapi dokumen kerja sama seperti MoU, MoA, dan IA, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan tri dharma di luar kampus. Kondisi ini menyebabkan pelaporan kegiatan tertunda dan bukti pendukung menjadi tidak lengkap.
2. Aspek Pemahaman dan Sosialisasi: Sebagian besar dosen dan pimpinan PTS belum memahami sepenuhnya konsep dan indikator IKU 3 (dosen berkegiatan tri dharma di luar kampus). Meskipun sudah dilaksanakan bimtek dan monev oleh LLDIKTI XI, informasi tersebut tidak selalu diteruskan kepada dosen.
3. Aspek Pelaporan dan Komunikasi Internal: Terdapat dosen yang telah melaksanakan kegiatan di luar kampus namun tidak melaporkan kepada pimpinan PTS, dan sebaliknya, ada pimpinan PTS yang tidak memperbolehkan dosen melakukan kegiatan di luar kampus karena kekhawatiran tertentu.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Selain itu, beberapa dosen enggan melapor karena alasan pribadi seperti pembagian insentif.

4. Aspek Komitmen dan Prioritas PTS: Sebagian PTS menganggap pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus bukan prioritas utama, bahkan ada PTS yang belum sama sekali melaksanakan kegiatan di luar kampus.
5. Aspek Data dan Kelembagaan: Adanya proses merger antar PTS menyebabkan ketidaksinkronan data, sehingga capaian persentase dosen berkegiatan di luar kampus menjadi tidak meningkat signifikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, LLDIKTI Wilayah XI akan melaksanakan beberapa langkah strategis untuk mendorong peningkatan kinerja PTS. Pertama, LLDIKTI Wilayah XI akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap PTS yang telah dimonev, guna memastikan bahwa rekomendasi dan perbaikan yang disarankan dapat diterapkan dengan baik dan berkelanjutan. Kedua, LLDIKTI akan terus menghimbau serta memotivasi para dosen agar aktif melaporkan dan meningkatkan kegiatan di luar kampus, terutama kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang memiliki dampak nyata. Ketiga, LLDIKTI Wilayah XI menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pelaporan bagi PTS yang mengalami kendala teknis maupun administratif dalam proses pelaporan data. Keempat, bagi PTS yang belum menyampaikan laporan data dosen, LLDIKTI Wilayah XI akan memberikan surat teguran sebagai bentuk penegasan terhadap kewajiban pelaporan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan pelaksanaan serta pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus dapat berjalan lebih optimal, terstruktur, akuntabel, serta berkontribusi terhadap peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan III tahun 2025 adalah 29.75% atau 47 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan III dan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 25%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Pada Triwulan III Tahun 2025, Tim Kerja Sama telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap capaian kerja sama yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelaporan kerja sama di lingkungan PTS, serta memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan sejalan dengan arah kebijakan dan tujuan strategis pendidikan tinggi di Indonesia. Pendampingan dilaksanakan di berbagai wilayah di Kalimantan, meliputi Kota Palangka Raya, Kota Sampit, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Setiap lokasi pendampingan melibatkan perwakilan dari PTS setempat yang telah melaporkan atau sedang dalam proses pelaporan kerja sama. Dalam kegiatan ini, Tim Kerja Sama tidak hanya memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporan kerja sama melalui sistem daring, tetapi juga melakukan evaluasi langsung terhadap kualitas isi laporan, kesesuaian dokumen pendukung, serta efektivitas



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan. Tujuan utama dari kegiatan pendampingan dan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun yang berpotensi muncul di kemudian hari, agar dapat diambil tindakan korektif dan preventif sedini mungkin. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu kerja sama perguruan tinggi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat dua PTS yang telah memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam aspek kerja sama, yaitu STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda dan Politeknik Nusantara Balikpapan.

Kendala/Permasalahan

1. Mitra kerja sama tidak sesuai kriteria
2. PTS belum menyusun laporan pelaksanaan kerjasama
3. Kerja sama tidak diimplementasikan dengan baik oleh PTS.

Strategi/Tindak Lanjut

Membuat surat pemberitahuan dan rekapitulasi data kerja sama pts untuk ditindak lanjuti pada triwulan ke IV

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdiktisaintek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV tahun 2025. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2024 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,2 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP tahun 2025. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi LHE SAKIP 2025. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI saat ini belum dapat berjalan optimal dan menghadapi tantangan signifikan terkait perencanaan program kerja. Kendala utama terletak pada belum terbitnya Rencana Strategis (Renstra) dari Kementerian Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang merupakan induk organisasi dan acuan strategis utama bagi LLDIKTI.

Dampak dan Implikasi

Keterbatasan Perencanaan: Tanpa Renstra yang definitif, LLDIKTI Wilayah XI belum memiliki dasar formal dan kerangka tujuan strategis yang jelas untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan menetapkan indikator kinerja yang sejalan dengan prioritas nasional dan Kementerian.

Ketidakpastian Program Kerja: Hal ini menyebabkan LLDIKTI Wilayah XI belum dapat menyusun dan melaksanakan program kerja serta kegiatan secara penuh yang terukur dan terarah. Program yang saat ini berjalan cenderung bersifat ad-hoc atau meneruskan inisiatif sebelumnya, sehingga potensi ketidakselarasan dengan arah kebijakan baru Kemendiktisaintek sangat besar.

Pengukuran Kinerja yang Belum Valid: Akibatnya, penilaian dan pelaporan kinerja melalui SAKIP menjadi kurang valid dan akuntabel karena tolok ukur (indikator dan target) yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan mandat dan sasaran strategis yang akan ditetapkan dalam Renstra baru.

LLDIKTI Wilayah XI berupaya untuk tetap menjaga operasional layanan berjalan, namun efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal menjadi terhambat hingga dokumen Renstra Kemendiktisaintek terbit dan dapat dijadikan panduan resmi. Penerbitan Renstra ini sangat krusial agar LLDIKTI Wilayah XI dapat segera menyusun ulang dokumen perencanaan kinerja dan melaksanakan program kerja secara terukur, terpadu, dan berdaya ungkit tinggi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sesuai dengan mandat SAKIP.

Kendala/Permasalahan

1. Diperlukan beberapa tambahan fitur pada eSAKIP.
2. Belum terbitnya Rencana Strategis Kemdiktisaintek dan pedoman IKU 2025
3. Pelaksanaan SAKIP belum berjalan dengan baik karena sistem SAKIP yang terintegrasi oleh Kemdiktisaintek yang dapat memudahkan pelaksanaan SAKIP pada satuan kerja belum dijalankan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan pada fitur aplikasi eSAKIP
2. Menunggu penetapan Renstra Kemdiktisaintek dan pedoman IKU LLDIKTI
3. Koordinasi dengan biro perencanaan terkait kepastian sistem SAKIP yang akan digunakan
4. Secara ringkas, ketiadaan Renstra Induk Kemendikisaintek ini menahan seluruh siklus SAKIP di LLDIKTI Wilayah XI untuk beralih ke periode perencanaan yang baru dan lebih efektif, sehingga fokus kami saat ini adalah mengelola kegiatan dengan mengedepankan efisiensi sambil secara aktif menantikan terbitnya Renstra Induk tersebut

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan September tahun 2025 masih belum dapat diperhitungkan karena aspek nilai perencanaan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada aspek perencanaan nilai disistem Monev Kemenkeu penggunaan RO SBK dan Efisiensi RO SBK masih 0. Untuk sementara berdasarkan data dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 99.70. Nilai IKPA tidak optimal namun sedikit ada kenaikan dengan triwulan II. Tidak optimalnya nilai IKPA karena penurunan nilai pada indikator penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan cerminan dari kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah satuan kerja. Bagi LLDIKTI Wilayah XI, upaya peningkatan NKA adalah suatu keharusan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara demi mendukung mutu layanan pendidikan tinggi.

Langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan oleh LLDIKTI Wilayah XI berfokus pada tiga pilar utama: Perencanaan Anggaran yang Matang, Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran, serta Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan.

Peningkatan dimulai dari tahap hulu, yaitu perencanaan. LLDIKTI Wilayah XI harus memastikan **keselarasan antara rencana kegiatan dan alokasi dana**.

- **Penyusunan Rencana Kebutuhan Riil:** Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang benar-benar **terukur dan realistis** sesuai dengan kebutuhan program penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya.
- **Optimalisasi Halaman III DIPA:** Memastikan isian Halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana dan Rencana Kegiatan) disusun secara **akurat dan proporsional** per bulan/triwulan, serta **melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD)** secara tepat waktu jika terjadi deviasi signifikan.
- **Minimalisasi Revisi Anggaran:** Melakukan konsolidasi internal secara ketat di awal tahun anggaran untuk **meminimalisasi frekuensi dan nilai revisi DIPA** yang tidak mendesak, sehingga alokasi anggaran lebih stabil dan terfokus.

Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran karena realisasi anggaran yang cepat dan tepat waktu adalah kunci utama dalam mendongkrak NKA/IKPA.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- **Akselerasi Belanja Kontraktual:** Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk **belanja modal dan belanja kontraktual**, dengan memulai tender dan penandatanganan kontrak sedini mungkin, idealnya di **triwulan I** tahun anggaran.
- **Disiplin Penyerapan Anggaran:** Memastikan penyerapan anggaran dilakukan **secara merata (proportional)** setiap bulan, tidak menumpuk di akhir tahun (bulan November-Desember), sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.
- **Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan:** Memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyelesaikannya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) **sesuai batas waktu** yang ditentukan (misalnya, dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih), serta menghindari penundaan pembayaran.
- **Efisiensi Pengelolaan Uang Persediaan (UP):** Mengoptimalkan penggunaan UP, terutama melalui **Kartu Kredit Pemerintah (KKP)**, dan memastikan **pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GUP)** diajukan secara teratur dan tepat waktu.
- **Pengisian Capaian Output Tepat Waktu:** Operator Satuan Kerja harus **disiplin** dalam melakukan pengisian data Capaian *Output* (CO) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) bulanan pada aplikasi yang ditetapkan (seperti SAKTI atau SPAN/OMSPAN) secara **akurat** sebelum batas akhir waktu pelaporan.
- **Reviu Kinerja Anggaran Berkala:** Secara rutin (misalnya, mingguan atau bulanan) melakukan **reviu internal terhadap nilai IKPA dan EKA** (Evaluasi Kinerja Anggaran) untuk mengidentifikasi indikator yang bermasalah dan segera mengambil **tindak lanjut perbaikan** sebelum terlambat.
- **Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komprehensif:** Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja anggaran secara berkala yang melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan, serta menetapkan **mekanisme reward dan punishment** atas capaian kinerja anggaran.

Pada triwulan III, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2025, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP. Untuk meningkatkan kualitas dokumen pertanggungjawaban keuangan pada triwulan III telah dilakukan penyusunan rencana pengembangan sistem SARLAIN untuk fitur dokumentasi pertanggungjawaban keuangan, dimana hasil yang diharapkan nanti seluruh dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sudah tersedia dalam bentuk softfile yang terintegrasi dengan sistem. Kemudian pembayaran tunjangan kinerja dosen PNS yang menjadi perhatian utama Kemendiknasaintek telah berhasil disalurkan kepada seluruh dosen PNS berdasarkan klaim kinerja yang diajukan pada aplikasi SISTER.

Kendala/Permasalahan

1. Sistem monev Kemenkeu masih belum menampilkan nilai penggunaan dan efisiensi RO SBK sehingga NKA tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. Realisasi belanja pegawai dan barang belum sesuai target dari Kemenkeu sehingga nilai indikator penyerapan anggaran tidak optimal;
3. Program kerja baru berjalan optimal pada triwulan ke III;
4. Nilai pengelolaan UP/TUP masih belum optimal

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penilaian Aspek perencanaan pada monev kemenkeu;
2. Menyusun strategi percepatan realisasi anggaran belanja pegawai khususnya untuk belanja tunjangan profesi dosen;
3. Menjalin koordinasi yang baik dengan setiap tim kerja agar program kerja berjalan sesuai dengan rencana;
4. Meningkatkan transaksi keuangan melalui UP bendahara agar nilai pengelolaan UP/TUP meningkat

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	145	155	Rp4.937.739.000	Rp1.584.735.091	32.09
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1779	1753	Rp72.466.557.000	Rp58.028.684.000	80.08
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp825.000	8.25
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp489.586.000	Rp203.587.983	41.58
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp76.722.324.000	Rp64.187.729.233	83.66
Total Anggaran					Rp154.626.206.000	Rp124.005.561.307	80.2

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XI secara terus menerus melalui sistem yang telah dibangun
2. Setiap tim kerja agar selalu menjalin kerjasama yang baik karena setiap indikator kinerja saling beririsan satu dengan yang lainnya
3. Selalu lakukan evaluasi terhadap semua sistem yang sudah dibangun oleh LLDIKTI Wilayah XI untuk menjadi dasar dalam perbaikan kualitas sistem layanan yang berkelanjutan
4. Program kerja yang disusun agar dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama sambil menunggu terbitnya renstra kemendiktisaintek
5. Tingkatkan kualitas pemetaan mutu perguruan tinggi melalui integrasi sistem dengan sumber data yang handal
6. Lakukan optimalisasi anggaran melalui usulan kegiatan inisiatif baru untuk meningkatkan keberhasilan IKU yang belum tercapai



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Banjarmasin, 7 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wilayah XI

Muhammad Akbar



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan IV Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	%	91	97.79
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	%	94	94.81
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28.93	%	28.93	31.82
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3.26	%	3.26	4.27
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32	%	32	33.77
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	%	73	75.97
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	%	25	33.77
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	AA	AA
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	Nilai	97	99.91



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan yang dilaksanakan pada tahun 2025 kepada 1.355 responden, sebanyak 1.325 atau 97,79% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88.55 (sesuai dengan PermenpanRB no.14 tahun 2017) . Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja triwulan IV tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI dan target Rencana Strategis dengan keberhasilan capaian sebesar 107%. Hal tersebut membuktikan bahwa strategi yang digunakan LLDIKTI Wilayah XI dalam memberikan layanan kepada seluruh stakeholder dengan tantangan geografis yang sangat luas telah berhasil.

Dalam ekosistem pendidikan tinggi yang dinamis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memegang peran utama sebagai perpanjangan tangan Kementerian yang bertugas mengawal mutu dan memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya. Keberhasilan LLDIKTI dalam menjalankan mandat ini sangat bergantung pada satu faktor kunci yaitu kualitas layanan yang diberikan kepada para stakeholder. Stakeholder utama LLDIKTI meliputi perguruan tinggi sebagai mitra binaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, hingga Masyarakat Umum dan Dunia Usaha/Industri (DUDI) yang menjadi pengguna lulusan. Dengan luasnya cakupan perguruan tinggi binaan LLDIKTI Wilayah XI yang tersebar di 5 (lima) provinsi Kalimantan Selatan maka peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder ini bukan lagi menjadi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan pendidikan tinggi di Kalimantan.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas layanan LLDIKTI akan berujung pada penguatan daya saing lulusan dan perguruan tinggi secara keseluruhan. Perguruan tinggi yang terbantu oleh layanan prima akan lebih leluasa berinovasi, menghasilkan penelitian yang relevan, dan mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, komitmen LLDIKTI Wilayah XI untuk terus berinovasi, menyederhanakan prosedur, dan menempatkan stakeholder sebagai prioritas utama adalah investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan tinggi di Kalimantan yang lebih maju dan berdaya saing.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, transparan, dan adil, Lembaga LLDIKTI Wilayah XI telah mengambil langkah strategis dengan membangun Aplikasi Unit Layanan Terpadu Online (PINANDU). PINANDU adalah sebuah terobosan layanan berbasis website yang secara menyeluruh telah mengubah cara stakeholder berinteraksi dengan LLDIKTI Wilayah XI. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dan birokrasi, mengingat luasnya cakupan wilayah Kalimantan. Layanan yang sebelumnya tidak mudah diakses oleh stakeholder, saat ini dapat diakses dari mana saja dengan mudah. Pada tahun 2025 aplikasi PINANDU semakin dikembangkan untuk memenuhi keinginan stakeholder dan internal LLDIKTI Wilayah XI. Formula perhitungan kepuasan pengguna telah terintegrasi sepenuhnya dengan aplikasi PINANDU dimana stakeholder langsung dapat memberikan tanggapan setelah menerima layanan oleh LLDIKTI. LLDIKTI Wilayah XI juga aktif melaksanakan pertemuan rutin dengan stakeholder untuk membahas masalah peningkatan kualitas layanan. Selain PINANDU, terdapat beberapa aplikasi lainnya yang mendukung layanan LLDIKTI Wilayah XI kepada stakeholder seperti Sistem Informasi Angka Kredit Online Dosen (SINGKRON), Sistem Informasi Beban Kerja Dosen (SIBEKEN), Aplikasi Presensi Dosen (AKSI BERKAH), dan Persuratan online PTS.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 untuk menunjang kinerja Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI adalah :

1. Pengembangan berkelanjutan aplikasi PINANDU;
2. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi layanan kepada stakeholder;
3. Melakukan survey kepuasan masyarakat setiap triwulan;
4. Forum diskusi publik peningkatan kualitas layanan.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana Unit Layanan Terpadu kantor LLDIKTI Wilayah XI.

Faktor Keberhasilan :



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI, khususnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh civitas akademika dan stake holder, khususnya yang berada di daerah yang jauh dari Kantor LLDIKTI Wilayah XI.
2. Penyesuaian dan Evaluasi waktu layanan pada Standar Pelayanan LLDIKTI Wilayah XI yang secara rerata LLDIKTI Wilayah XI memangkas waktu layanan yang semula 12,4 hari menjadi 7,5 hari.
3. Komitmen pimpinan dan seluruh stakeholder LLDIKTI Wilayah XI dalam hal pengembangan layanan daring secara progresif, dan penggunaan layanan daring yang konsisten oleh seluruh pihak.

Kendala/Permasalahan

1. Belum terpusatnya seluruh layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI. Banyaknya layanan sistem informasi yang dipegang oleh Perguruan Tinggi seperti halnya Sistem Informasi yang dimiliki oleh kementerian (PDDIKTI, SISTER, SIAGA), atau Sistem Informasi dari pihak lainnya seperti BAN PT (SAPTO), sehingga menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan layanan daring yang tidak single user. Memusatkan layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI memerlukan waktu, hal ini dikarenakan beberapa Layanan Daring tidak satu framework dengan layanan daring lainnya, yang menyebabkan pihak pengembang mengalami kesulitan untuk menggabungkan layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI ataupun menjadikannya single sign on;
2. Belum rutinnya dilakukan Forum Komunikasi Publik (FKP). Berdasarkan tujuan diselenggarakannya FKP adalah untuk mendengarkan langsung masukan dan kritik dari pengguna layanan bersama dengan para expert bidang layanan, untuk dilakukan pembenahan layanan yang sudah diberikan kepada pengguna layanan;
3. Belum efektifnya penggunaan kanal konsultasi layanan yang digunakan oleh LLDIKTI Wilayah XI baik secara luring (ULT) maupun secara daring (WA, Live chat). Konsultasi layanan yang dilakukan secara luring sangat berjalan efektif, hal ini dikarenakan pengguna layanan dapat langsung bertemu dengan petugas layanan. Akan tetapi, mengingat luasnya wilayah kerja LLDIKTI Wilayah XI yang melayani civitas akademika pada 5 provinsi di Kalimantan, Konsultasi secara daring harus diberikan secara khusus dan fokus. Kondisi saat ini, layanan konsultasi daring hanya dipegang oleh satu orang petugas front liner, belum adanya otomatisasi langsung ke petugas layanan inti sehingga frontliner memerlukan waktu untuk menyampaikan dan menanyakan kepada petugas layanan inti. Hal ini menyebabkan adanya spend time yang tinggi untuk memberikan respon kepada pengguna layanan yang ingin berkonsultasi;
4. Belum adanya kegiatan rutin penyampaian atau penjelasan standar pelayanan kepada stakeholder. Terdapat beberapa permasalahan dalam menterjemahkan waktu proses layanan tertentu. Waktu proses layanan menjadi tantangan bagi LLDIKTI Wilayah XI, karena pada unsur ini yang menjadi sorotan pengguna layanan. Pengguna layanan atau pihak stakeholder yang menjadi penanggung jawab pada perguruan tinggi dapat menjadi target sosialisasi atau perpanjangan tangan LLDIKTI Wilayah XI pada layanan tertentu seperti layanan sumber daya (layanan jabatan fungsional dosen) agar dapat memberikan pemahaman bagaimana proses layanan tersebut dilakukan oleh LLDIKTI.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Integrasi Aplikasi pada layanan Daring LLDIKTI Wilayah XI;
2. Update Standar Pelayanan (menyesuaikan dengan prosedur layanan yang terbaru);
3. Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala;
4. Melakukan Sosialisasi Standar Pelayanan kepada stakeholder atau civitas akademika dengan tujuan memberikan pemahaman khusus bagi layanan yang berdasarkan hasil evaluasi hasil survei.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan IV tahun 2025 adalah 94,81% atau 146 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah memenuhi target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 94% dengan capaian keberhasilan sebesar 100,86%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI Wilayah XI dari 154 PTS Aktif yang ada di Kalimantan total PTS yang terakreditasi adalah 146 PTS (94,81%). 8 PTS (5,19%) yang tidak/belum terakreditasi saat ini sedang dalam proses pengusulan akreditasi, proses penutupan maupun merger dengan Perguruan Tinggi lain.

Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0 bekerjasama dengan BAN-PT tanggal 14 Juli 2025;
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi;
4. Menyebarkan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi;
5. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0;
6. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT) kepada PT yang belum terakreditasi;
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTS baru / PTS Hasil Perubahan Bentuk, Penggabungan, atau Penyatuan;
8. Melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi Legalitas Badan Penyelenggara PTS;
9. Melaksanakan kegiatan fasilitasi unsur penunjang penguatan akreditasi perguruan tinggi seperti Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dan lainnya.

Pada tahun 2025, 7 (tujuh) usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) masih proses pengusulan / Perbaikan dokumen melalui laman SIAGA, antara lain :

1. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi di Kota Pontianak dan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di Kota Pontianak menjadi Universitas Yarsi Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (2 PTS LLDIKTI XI);
2. Penggabungan STIE Indonesia Pontianak di Kota Pontianak dan ASMI Pontianak di Kota Pontianak menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indograha Manajemen (2 PTS LLDIKTI XI);
3. Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Tanjung Redeb Kalimantan Timur di Kabupaten Berau yang diselenggarakan oleh Yayasan Kharisma Mandiri Tanjung Redeb ke Universitas Muhammadiyah Berau di Kabupaten Berau yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah (2 PTS LLDIKTI XI);
4. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dengan Akademi Kebidanan Sari Mutiara di Kota Medan menjadi Universitas Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Batara (1 PTS LLDIKTI XI dan 1 PTS LLDIKTI I);
5. Penggabungan Politeknik Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Multicom di Kota Pematangsiantar menjadi Universitas Borneo Merdeka di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Intelektual Indonesia (1 PTS LLDIKTI XI dan 1 PTS LLDIKTI I);
6. Penggabungan Politeknik Aisyiyah Pontianak di Kota Pontianak dan Sekolah Tinggi Pertanian Panca Bhakti di Kota Pontianak menjadi Universitas Aisyiyah Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah (2 PTS LLDIKTI XI);
7. Penyatuan Politeknik Teknokrat Internasional Kolaka di Kabupaten Kolaka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Muslim Teknokrat Kolaka ke Universitas Mulia di Kota Balikpapan yang diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga (1 PTS LLDIKTI XI dan 1 PTS LLDIKTI IX).



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan/penyatuan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara/Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan.

Faktor Keberhasilan :

(Faktor Internal):

1. Perumusan target IKU yang tepat (Relevan dan Realistis);
2. Sistem manajemen yang efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian (monev), untuk memastikan pencapaian target IKU yang dilakukan perTriwulan;
3. Terdapatnya kebijakan Insentif dari DIKTI terhadap Pengusul dalam usulan Penggabungan atau Penyatuan PTS yang mendorong stakeholder dalam melakukan pengusulan;

(Faktor Eksternal / Stakeholder):

1. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan (PTS) terkait pentingnya Akreditasi Perguruan Tinggi;
2. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan (Yayasan) terkait dampak positif dari penggabungan atau penyatuan PTS yang diselenggarakannya;
3. Feedback dari pemangku kepentingan yang responsif terhadap berbagai kegiatan fasilitasi yang dilakukan LLDIKTI XI dalam rangka pencapaian target IKU tersebut.

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya sarana dan prasarana : Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa;
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia : Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, dan jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi;
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat : Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar.
4. Pencapaian Tridharma : Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi peningkatan akreditasi perguruan tinggi.
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana;
2. Melakukan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen;
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan;
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0;
5. Melakukan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi ;
6. Pemantauan proses 7 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen tersebut melalui laman SIAGA.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan IV tahun 2025 adalah 31.82% atau 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 28.93% dengan tingkat capaian keberhasilan sebesar 101%.

Indikator ini dirancang untuk mengukur sejauh mana efektivitas sosialisasi dan implementasi kebijakan "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah LLDIKTI Wilayah XI (sekarang dikenal dengan nama program Kampus Berdampak). Program ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi hingga 1 semester (setara dengan 20 SKS) di perguruan tinggi yang sama, atau hingga 2 semester (setara dengan 40 SKS) di perguruan tinggi berbeda. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, seperti magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, proyek independen, serta membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T). Tujuan utama program ini adalah untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka secara langsung di lapangan untuk menghasilkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Demi kemajuan pendidikan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk dapat terlibat dalam kebijakan ini mahasiswa dimaksud harus berasal dari program studi yang terakreditasi, dan aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Capaian kinerja dari indikator ini diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025. Pelaksanaan magang dimulai sejak 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025, bekerjasama dengan para mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. LLDIKTI Wilayah XI telah memperkenalkan Program Magang Berdampak 2025 sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep "Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada Program Magang Berdampak ada 397 lowongan dari Instansi, Industri mitra, dan bidang usaha yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Inisiatif ini memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar lingkup perkuliahan.

Faktor Keberhasilan :

1. Ketersediaan data pelaporan pembelajaran di luar program studi pada PDDIKTI memungkinkan pengukuran capaian indikator kinerja tahun 2025;
2. Sebagian PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah memenuhi kriteria indikator berdasarkan data PDDIKTI; dan
3. Indikator tetap dapat diukur karena struktur pelaporan pembelajaran di luar program studi masih tersedia dalam sistem PDDIKTI.

Kendala/Permasalahan

1. Pengukuran indikator sepenuhnya berbasis data PDDIKTI sehingga perkembangan pelaksanaan di



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- tingkat perguruan tinggi tidak dapat dipantau secara langsung;
2. Masih terdapat perbedaan tingkat ketepatan dan kelengkapan pelaporan aktivitas pembelajaran di luar program studi oleh PTS pada PDDIKTI; dan
 3. Adanya jeda waktu pemutakhiran data PDDIKTI mempengaruhi keterbacaan capaian indikator.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong peningkatan ketepatan dan kelengkapan pelaporan PTS terhadap aktivitas pembelajaran di luar program studi pada PDDIKTI;
2. Melakukan analisis dan pemetaan PTS berdasarkan kontribusi data PDDIKTI terhadap capaian indikator; dan
3. Memanfaatkan hasil analisis data PDDIKTI sebagai dasar pembinaan dan pendampingan PTS.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi triwulan IV tahun 2025 adalah 4.27% atau 7.051 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 3.26% dengan tingkat capaian 130,98%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi untuk mendukung kriteria mahasiswa yang meraih prestasi.

Faktor Keberhasilan :

1. Data pembobotan mahasiswa pada PDDIKTI tersedia sehingga capaian indikator dapat diukur;
2. Sebagian mahasiswa PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah tercatat memenuhi kriteria indikator berdasarkan pelaporan kegiatan dan prestasi mahasiswa pada PDDIKTI; dan
3. Mekanisme pembobotan pada indikator mendukung tercapainya target kinerja.

Kendala/Permasalahan

1. Capaian indikator sangat bergantung pada ketepatan dan kelengkapan pelaporan data mahasiswa pada PDDIKTI;
2. Belum seluruh kegiatan dan prestasi mahasiswa dilaporkan secara optimal oleh PTS; dan
3. Adanya perbedaan pemahaman PTS terhadap kriteria dan pembobotan prestasi mahasiswa yang mempengaruhi keterbacaan data indikator.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pemetaan PTS berdasarkan besaran kontribusi data mahasiswa terhadap capaian indikator;



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Mendorong peningkatan ketepatan dan kelengkapan pelaporan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan prestasi mahasiswa pada PDDIKTI; dan
3. Memanfaatkan hasil pemilihan mahasiswa berprestasi sebagai dasar pembinaan PTS dalam peningkatan pelaporan prestasi mahasiswa.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan IV tahun 2025 adalah 33,77% atau 52 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 32% dengan tingkat capaian keberhasilan 105,53%. Capaian ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran dan komitmen pimpinan PTS terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai integritas dan keamanan kampus. Sebagian besar PTS yang baru melaporkan telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas PPKS, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual dan intoleransi. Beberapa kampus juga mulai memasukkan materi antikorupsi dan antinarkoba dalam kegiatan orientasi mahasiswa serta penguatan karakter di lingkungan akademik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah PTS yang memerlukan pendampingan lanjutan untuk penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang menggantikan dan memperluas cakupan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (tentang PPKS) istilah PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) diubah menjadi PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) yang merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman secara menyeluruh.

Tujuan utama perubahan ini adalah:

1. Integrasi Penanganan : Agar kampus tidak perlu membentuk banyak kepanitiaan terpisah untuk setiap jenis kekerasan;
2. Kepastian Hukum : Memberikan payung hukum yang kuat untuk menindak pelaku perundungan atau intoleransi yang selama ini mungkin hanya dijatuhi sanksi etik ringan;
3. Budaya Kampus yang Inklusif : Menjamin bahwa kampus adalah ruang yang merdeka dari segala bentuk intimidasi, bukan hanya intimidasi seksual.

Dengan adanya PPKPT, mahasiswa dan staf memiliki alur pelaporan yang lebih luas. Jika terdapat adanya praktik senioritas yang berlebihan (perundungan) atau diskriminasi berbasis SARA (intoleransi), Satgas PPKPT memiliki kewenangan resmi untuk memproses laporan tersebut, sama seriusnya dengan laporan kekerasan seksual. Langkah awal yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam implementasi indikator ini adalah pembentukan satgas PPKPT. Satgas ini adalah "garda terdepan" di dalam kampus yang memiliki mandat resmi dari negara (melalui Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024) untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apa pun di kampus baik itu kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), maupun intoleransi. Sebagai upaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mendukung implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) secara resmi meluncurkan aplikasi SAHABAT sebagai portal pengelolaan PPKPT pada setiap perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah XI telah memberikan Bimbingan Teknis kepada seluruh PTS terkait tata cara penggunaan aplikasi tersebut.

Tercapainya target kinerja 2025 mencerminkan hasil dari upaya sistematis LLDIKTI Wilayah XI dalam mendorong PTS untuk tidak hanya mengimplementasikan kebijakan, tetapi juga melaporkannya secara tertib dan terverifikasi. Pencapaian tersebut juga menunjukkan meningkatnya kesadaran PTS terhadap pentingnya kebijakan pencegahan dan penanganan isu strategis di lingkungan kampus sebagai bagian dari



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

tata kelola perguruan tinggi yang baik. Hal ini menjadi titik awal bagi penguatan budaya kampus yang aman, inklusif, dan berintegritas di wilayah LLDIKTI Wilayah XI.

Upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Monitoring Dan Evaluasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi pada PTS di Provinsi Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur;
2. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi SAHABAT dan peningkatan Implementasi IKU 2.3 pada PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI

Faktor Keberhasilan :

1. Adanya kebijakan nasional melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memperluas cakupan PPKS menjadi PPKPT sebagai dasar implementasi kebijakan di perguruan tinggi;
2. Sebagian PTS telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan Satgas PPKPT, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan; dan
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis oleh LLDIKTI Wilayah XI, termasuk pemanfaatan aplikasi SAHABAT mendorong peningkatan pelaporan dan keterpenuhan indikator.

Kendala/Permasalahan

1. Belum seluruh PTS menyelesaikan pembentukan Satgas PPKPT dan penyusunan regulasi internal sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024;
2. Masih terdapat PTS yang mengalami kendala dalam penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal implementasi kebijakan; dan
3. Perbedaan tingkat kesiapan sumber daya manusia PTS dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan PPKPT secara menyeluruh.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melanjutkan pendampingan dan pembinaan kepada PTS yang belum memenuhi kriteria indikator, khususnya terkait pembentukan Satgas PPKPT dan penyusunan regulasi internal;
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan PPKPT melalui pemanfaatan aplikasi SAHABAT; dan
3. Mendorong peningkatan kualitas dan ketertiban pelaporan implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan IV tahun 2025 adalah 75.97% atau 117 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 73 % dengan tingkat capaian keberhasilan sebesar 104,07%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar PTS telah menunjukkan kinerja yang selaras dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Peningkatan kinerja yang dimaksud tidak hanya tercermin dari aspek kuantitatif berupa persentase capaian, tetapi juga dari perubahan pola pelaksanaan Tri Dharma



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Perguruan Tinggi yang semakin terbuka terhadap keterlibatan eksternal. Kegiatan di luar kampus mencakup aktivitas akademik dan profesional yang relevan dengan bidang keilmuan dosen, seperti penelitian kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan mitra, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri. Dibandingkan dengan sebelumnya, terjadi penambahan jumlah PTS yang memenuhi kriteria indikator. Kondisi ini menunjukkan adanya tren perbaikan kinerja yang berkelanjutan, sekaligus mencerminkan meningkatnya kemampuan institusi dalam menyesuaikan kebijakan internal dengan arah kebijakan kinerja nasional. PTS yang sebelumnya belum memenuhi indikator mulai melakukan penyesuaian pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dosen diluar kampus sehingga mampu mencapai ambang batas yang ditetapkan. Capaian ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran institusional terhadap pentingnya kegiatan dosen di luar kampus sebagai bagian dari pengembangan mutu dosen dan peningkatan relevansi perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dalam kegiatan eksternal memberikan dampak positif terhadap pengayaan keilmuan, peningkatan jejaring profesional, serta penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian, capaian IKU tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan target administratif, tetapi juga sebagai indikator kemajuan tata kelola akademik. Dari perspektif kelembagaan, capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa PTS mulai mengintegrasikan kegiatan dosen di luar kampus ke dalam sistem pengelolaan kinerja dosen secara lebih terstruktur. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah PTS yang mampu menyajikan bukti dukung kegiatan secara lengkap, valid, dan terdokumentasi. Integrasi tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa kegiatan dosen diluar kampus dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari kinerja institusi. Secara keseluruhan, capaian IKU pada periode pelaporan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kinerja dosen dan institusi. Meskipun masih terdapat PTS yang belum memenuhi target indikator, keberhasilan capaian tersebut mencerminkan kondisi kinerja yang relatif baik dan menjadi landasan yang kuat untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih merata pada periode selanjutnya.

Upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI dalam meningkatkan capaian indikator ini adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dosen berkegiatan diluar kampus pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta dan pendampingan kepada PTS terkait pelaporan dosen yang berkegiatan diluar kampus.

Faktor Keberhasilan :

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lapangan yang Efektif
Pelaksanaan Monev secara langsung (jemput bola) memungkinkan LLDIKTI memperoleh informasi faktual, melakukan pembinaan langsung kepada pimpinan dan dosen, serta meningkatkan pemahaman PTS terkait indikator dan mekanisme pelaporan indikator kinerja.
2. Meningkatnya Komitmen Pimpinan PTS terhadap Kebijakan IKU
Komitmen pimpinan PTS dalam menyesuaikan kebijakan internal, termasuk pemberian izin dan pengakuan terhadap kegiatan dosen di luar kampus, mendorong peningkatan partisipasi dan pelaporan kegiatan dosen.
3. Perbaikan Tata Kelola Pelaporan dan Dokumentasi Kinerja
Meningkatnya kemampuan PTS dalam menyajikan bukti dukung kegiatan secara lengkap, valid, dan terdokumentasi dengan baik berkontribusi terhadap meningkatnya akurasi perhitungan capaian persentase indikator kinerja.

Kendala/Permasalahan

1. Pemahaman sebagian PTS terhadap indikator dan jenis kegiatan dosen di luar kampus yang dapat diakui sebagai capaian IKU belum merata;
2. Tata kelola serta kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan dosen diluar kampus belum optimal;
3. Kapasitas SDM pengelola kinerja di tingkat PTS masih terbatas;
4. Dukungan kebijakan internal PTS belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan IKU;
5. Jejaring kerja sama dengan mitra eksternal masih terbatas;
6. Kendala teknis dalam proses pelaporan dan verifikasi data kinerja;
7. Dinamika kebijakan dan keterbatasan pendanaan mempengaruhi kesiapan PTS.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan terkait indikator IKU dan kegiatan dosen di luar kampus;
2. Melakukan pendampingan penguatan tata kelola serta standardisasi administrasi dan dokumentasi kegiatan;
3. Meningkatkan kapasitas pengelola kinerja PTS melalui bimbingan teknis dan pendampingan;
4. Mendorong penyesuaian kebijakan internal PTS agar selaras dengan kebijakan IKU;
5. Memfasilitasi penguatan jejaring kerja sama PTS dengan mitra eksternal;
6. Memperkuat monitoring, evaluasi, dan pendampingan teknis pelaporan data kinerja;
7. Menyesuaikan strategi pembinaan dengan dinamika kebijakan dan optimalisasi sumber pendanaan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan IV tahun 2025 adalah 33,77% atau 52 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 25% dengan tingkat keberhasilan capaian sebesar 135,08%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Pada Tahun 2025, Tim Kerja Sama telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap capaian kerja sama yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelaporan kerja sama di lingkungan PTS, serta memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan sejalan dengan arah kebijakan dan tujuan strategis pendidikan tinggi di Indonesia. Pendampingan dilaksanakan di berbagai wilayah di Kalimantan, meliputi Kota Palangka Raya, Kota Sampit, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Setiap lokasi pendampingan melibatkan perwakilan dari PTS setempat yang telah melaporkan atau sedang dalam proses pelaporan kerja sama. Dalam kegiatan ini, Tim Kerja Sama tidak hanya memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporan kerja sama melalui sistem daring, tetapi juga melakukan evaluasi langsung terhadap kualitas isi laporan, kesesuaian dokumen pendukung, serta efektivitas pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan. Tujuan utama dari kegiatan pendampingan dan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun yang berpotensi muncul di kemudian hari, agar dapat diambil tindakan korektif dan preventif sedini mungkin. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu kerja sama perguruan tinggi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pendampingan yang dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan yang meliputi kota dan kabupaten dengan karakteristik PTS yang beragam memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi faktual implementasi kerja sama di lapangan. Dari hasil evaluasi, masih ditemukan variasi tingkat pemahaman PTS terhadap mekanisme pelaporan, kelengkapan dokumen pendukung, serta keterkaitan kerja sama dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan berkelanjutan masih sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan kualitas substansi kerja sama, bukan hanya kuantitas laporan yang diunggah. Di sisi lain, kegiatan ini juga menghasilkan temuan positif, di mana beberapa PTS telah mampu mengelola dan melaporkan kerja sama secara tertib, sistematis, dan relevan dengan IKU. PTS



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

yang memenuhi capaian IKU pada aspek kerja sama mencerminkan adanya komitmen institusi dalam menjadikan kerja sama sebagai bagian integral dari strategi pengembangan institusi. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi PTS lainnya. Secara keseluruhan, pendampingan dan evaluasi pada Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah perbaikan ke depan, baik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan mekanisme monitoring, maupun peningkatan kualitas implementasi kerja sama agar lebih berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

Selain melalui pendampingan, LLDIKTI Wilayah XI juga melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan Kerjasama secara daring sebanyak 2 kali dengan menghadirkan pembicara dari dunia usaha atau industri yang berskala nasional dan internasional untuk membuka akses Kerjasama PTS dengan dunia usaha yang sesuai dengan kriteria sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini.

Faktor Keberhasilan :

1. Pendampingan dan evaluasi secara berkala oleh Tim Kerja Sama di berbagai wilayah Kalimantan sehingga PTS mendapatkan bimbingan langsung terkait pelaporan dan substansi kerja sama;
2. Komitmen pimpinan PTS yang mulai menjadikan kerja sama sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi, sehingga mendorong prodi aktif mencari mitra yang relevan;
3. Fasilitasi dan pengembangan kerja sama secara oleh LLDIKTI Wilayah XI dengan menghadirkan mitra.

Kendala/Permasalahan

1. Tindak lanjut kerja sama kurang optimal, sehingga beberapa kerja sama hanya berhenti pada penandatanganan dokumen tanpa implementasi nyata;
2. Variasi tingkat pemahaman PTS terhadap mekanisme pelaporan dan kriteria IKU, sehingga kualitas laporan tidak seragam;
3. Laporan pelaksanaan kerja sama tidak dibuat atau tidak diunggah secara lengkap ke sistem daring.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola kerja sama melalui pelatihan khusus, workshop, dan klinik kerja sama;
2. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis daring untuk memantau tindak lanjut dan implementasi kerja sama secara periodik;
3. Memperbanyak kegiatan fasilitasi yang mempertemukan PTS dengan dunia usaha, industri, dan mitra internasional agar kerja sama lebih relevan, berdampak, dan berkelanjutan;
4. Melanjutkan dan memperluas program pendampingan secara terjadwal dengan fokus pada peningkatan kualitas substansi kerja sama, bukan hanya jumlah kerja sama.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2025, LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,45 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP ditahun 2025. Predikat ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan secara sangat baik, efisien, dan berorientasi pada hasil. Capaian ini meningkat sebesar 0,25 dari tahun sebelumnya karena upaya perbaikan dalam pengelolaan SAKIP yang terus dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI dengan menindaklanjuti catatan pada LHE tahun sebelumnya seperti penetapan target kinerja berdasarkan pertimbangan capaian pada tahun sebelumnya, memastikan partisipasi seluruh pegawai PNS dan Non PNS (OB dan Security) dalam penyusunan laporan kinerja, dan memberikan gambaran perubahan budaya kerja



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

yang terjadi karena pengelolaan SAKIP yang semakin baik. Untuk mendukung digitalisasi pengelolaan SAKIP, LLDIKTI Wilayah telah membangun aplikasi eSAKIP sebagai bagian dari pendukung aplikasi SPEKTA Kemdiktisaintek. Pada tahun 2025 aplikasi eSAKIP sudah dapat mengakomodir seluruh proses pelaksanaan SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk kedepannya aplikasi eSAKIP akan disesuaikan kembali mengikuti regulasi tentang Indikator Kinerja Utama LLDIKTI. Hal ini akan memastikan bahwa data yang dihasilkan tetap relevan dan mendukung pengambilan keputusan strategis pada tingkat kementerian dan LLDIKTI Wilayah XI sendiri. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah :

1. Menyusun laporan kinerja tahun 2024;
2. Menyusun draft Rencana Strategis tahun 2025-2029;
3. Menyusun perjanjian kinerja tahun 2025;
4. Menyusun rencana aksi kinerja tahun 2025;
5. Menyusun tindak lanjut rekomendasi LHE tahun 2024;
6. Menyusun laporan kinerja setiap triwulan tahun 2025;
7. Melakukan evaluasi mandiri pelaksanaan SAKIP tahun 2025;
8. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan SAKIP setiap triwulan;
9. Mengikut sertakan SDM pada pelatihan SAKIP;
10. Melakukan pengembangan pada aplikasi eSAKIP.

Faktor Keberhasilan :

1. Tindaklanjut terhadap Rekomendasi : Menindaklanjuti catatan LHE tahun sebelumnya secara konsisten;
2. Budaya Kerja Inklusif : Melibatkan seluruh lini pegawai, termasuk PNS dan Non-PNS (OB dan Security), dalam penyusunan laporan kinerja. Hal ini menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap target organisasi;
3. Digitalisasi Proses : Pemanfaatan aplikasi eSAKIP yang telah mencakup seluruh siklus SAKIP (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan).

Kendala/Permasalahan

1. Pengukuran kinerja masih menggunakan regulasi lama yaitu Kepmen 210 tahun 2023 karena regulasi tentang Indikator Kinerja Utama LLDIKTI yang terbaru belum ditetapkan;
2. eSAKIP belum terintegrasi dengan SPEKTA Kemdiktisaintek;
3. Siklus SAKIP sempat terhenti karena perjanjian kinerja ditetapkan pada bulan Mei tahun 2025 (seharusnya diawal tahun). Hal tersebut membuat program kerja pendukung IKU baru efektif dilaksanakan pada triwulan III;
4. Rencana strategis eselon I dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum ditetapkan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. LLDIKTI seluruh Indonesia secara rutin telah melakukan serangkaian kegiatan pembahasan terkait rencana IKU beserta dengan pengumpulan baseline dan rencana target tahun 2026, saat ini sedang menunggu persetujuan dari kementerian;
2. Setelah regulasi terkait IKU terbaru ditetapkan maka akan dilanjutkan dengan integrasi eSAKIP dan SPEKTA. Sebelumnya rencana integrasi sudah dikoordinasikan dengan tim pengembang SPEKTA untuk mengetahui langkah awal yang harus dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XI dalam integrasi data tersebut;
3. Penyusunan program kerja difokuskan pada kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XI khususnya terkait peningkatan kualitas layanan dan kegiatan krusial lainnya sambil menunggu penetapan regulasi IKU LLDIKTI yang terbaru;
4. Segera menetapkan dokumen rencana strategis 2025-2029 setelah renstra Ditjen Dikti Kemendikisaintek terbit.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 adalah 99,91 yang merupakan hasil dari pembobotan pada aspek nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Capaian tersebut telah melebihi dari target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 97 dengan Tingkat capaian 103%. Berdasarkan data pada monev kemenkeu nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 100 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 99,81. Berikut analisis berdasarkan dari aspek penunjang nilai kinerja anggaran tersebut :

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Berdasarkan pada Monev Kemenkeu, LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin berhasil meraih pencapaian yang luar biasa dengan nilai sempurna pada seluruh indikator perencanaan tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut :

Indikator	Nilai	Kategori
Capaian RO (Efektivitas)	100	Sempurna
Penggunaan SBK	100	Sempurna
Efisiensi SBK	100	Sempurna

Analisis setiap indikator :

1. Efektivitas: Capaian RO (100)

Capaian Rincian Output (RO) sebesar 100 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja fisik yang direncanakan telah tercapai sepenuhnya. Perencanaan anggaran yang dibuat terbukti realistis dan dapat dieksekusi dengan tepat sasaran.

1. Efisiensi: Penggunaan & Efisiensi SBK (100)

Nilai 100 pada Efisiensi SBK (Standar Biaya Keluaran) menandakan bahwa:

- LLDIKTI Wilayah XI berhasil menghasilkan output dengan biaya yang optimal dan tidak melebihi standar biaya yang ditetapkan pemerintah.
- Adanya sinkronisasi yang baik antara penyerapan anggaran dengan pencapaian fisik output

Pencapaian nilai 100 ini mengindikasikan bahwa LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin telah menerapkan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan negara. LLDIKTI Wilayah XI mampu merencanakan anggaran dengan tepat, mengeksekusi dengan efektif, dan menjaga efisiensi biaya.

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan data dari OMSPAN, Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin periode Desember 2025 sebesar 99,81 adalah capaian yang sangat baik (Sangat Memuaskan). Capaian tersebut tidak mencapai nilai sempurna (100) dikarenakan satu indikator, yaitu Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Aspek IKPA	Nilai Aspek	Status
------------	-------------	--------



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kualitas Perencanaan Anggaran	100	Sempurna
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99.77	Sangat Baik (Perlu optimasi)
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100	Sempurna

Analisis Titik Lemah: Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran memiliki nilai 99,07 dengan bobot tertinggi kedua (20%). Ini adalah satu-satunya komponen yang tidak bernilai 100.

- Dampak pada Nilai Akhir: Dengan nilai 99,07, kontribusi nilai yang didapat adalah 19,81 dari total bobot 20,00. Artinya, ada kehilangan poin sebesar 0,19.
- Penyebab Umum: Nilai 99,07 menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja hingga akhir Desember sedikit meleset dari target penyerapan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan analisis yang lebih mendalam penyerapan anggaran tidak optimal pada semester I karena beberapa kebijakan seperti efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang ada di LLDIKTI Wilayah XI.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan LLDIKTI Wilayah XI sangat baik. Kehilangan 0,19 poin pada penyerapan anggaran adalah hal yang sangat teknis karena beberapa kebijakan yang menyebabkan daya serap anggaran tidak dapat optimal sesuai dengan target nasional.

Langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan oleh LLDIKTI Wilayah XI kedepan berfokus pada tiga unsur utama : Perencanaan Anggaran yang Matang, Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran, serta Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan.

Peningkatan dimulai dari tahap awal anggaran yaitu perencanaan. LLDIKTI Wilayah XI harus memastikan keselarasan antara rencana kegiatan dan alokasi dana.

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Riil: Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang benar-benar terukur dan realistis sesuai dengan kebutuhan program penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya.
- Optimalisasi Halaman III DIPA: Memastikan isian Halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana dan Rencana Kegiatan) disusun secara akurat dan proporsional per bulan/triwulan, serta melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara tepat waktu jika terjadi deviasi signifikan.
- Minimalisasi Revisi Anggaran: Melakukan konsolidasi internal secara ketat di awal tahun anggaran untuk meminimalisasi frekuensi dan nilai revisi DIPA yang tidak mendesak, sehingga alokasi anggaran lebih stabil dan terfokus.

Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran karena realisasi anggaran yang cepat dan tepat waktu adalah kunci utama dalam mendongkrak NKA/IKPA.

- Akselerasi Belanja Kontraktual: Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk belanja modal dan belanja kontraktual, dengan memulai penandatanganan kontrak sedini mungkin, idealnya di triwulan I tahun anggaran.
- Disiplin Penyerapan Anggaran: Memastikan penyerapan anggaran dilakukan secara merata setiap bulan, tidak menumpuk di akhir tahun (bulan November-Desember), sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.
- Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan: Memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyelesaikannya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai batas waktu yang ditentukan serta menghindari penundaan pembayaran.
- Efisiensi Pengelolaan Uang Persediaan (UP): Mengoptimalkan penggunaan UP, terutama melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan memastikan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GUP) diajukan secara teratur dan tepat waktu.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Pengisian Capaian *Output* Tepat Waktu: Operator Satuan Kerja harus disiplin dalam melakukan pengisian data Capaian *Output* (CO) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) bulanan pada aplikasi yang ditetapkan secara akurat sebelum batas akhir waktu pelaporan.
- Reviu Kinerja Anggaran Berkala: Secara rutin melakukan reviu internal terhadap nilai IKPA dan EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) untuk mengidentifikasi indikator yang bermasalah dan segera mengambil tindak lanjut perbaikan sebelum terlambat.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala : Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja anggaran secara berkala yang melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan, serta menetapkan mekanisme *reward* dan *punishment* atas capaian kinerja anggaran.

Faktor Keberhasilan :

1. Akurasi Perencanaan yang tinggi dengan meminimalisir revisi anggaran dan pengendalian deviasi halaman III DIPA yang optimal;
2. Kedisiplinan Administrasi Perbendaharaan yang menunjang indikator ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP/TUP;
3. Manajemen Pengadaan yang baik sehingga nilai pada indikator belanja kontraktual dapat optimal;
4. Anggaran berorientasi pada hasil sehingga seluruh target fisik dapat dicapai 100%;
5. Efisiensi anggaran telah di implementasikan dengan baik;
6. Koordinasi antara tim perencanaan dengan pengelola keuangan berjalan dengan sangat baik.

Kendala/Permasalahan

1. Optimalisasi Penyerapan Anggaran belum dapat dilaksanakan pada semester I karena beberapa faktor eksternal seperti adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun yang membuat LLDIKTI Wilayah XI harus menyusun kembali seluruh program kerja dan penetapan target perjanjian kinerja yang baru dilakukan pada triwulan kedua sehingga program kerja baru berjalan optimal pada triwulan ketiga setelah perjanjian kinerja ditetapkan;
2. Meskipun Deviasi Halaman III DIPA mendapat nilai 100 namun penyusunan rencana penarikan pada halaman III DIPA menjadi suatu tantangan tersendiri bagi LLDIKTI Wilayah XI karena dinamisnya waktu pelaksanaan kegiatan yang tergantung dari arahan/kebijakan dari pusat;
3. Dilema Antara Efisiensi dan Penyerapan anggaran, ketika lembaga berhasil menjalankan program secara efisien (menggunakan biaya lebih rendah dari standar), hal ini secara otomatis menyisakan anggaran yang tidak terpakai. Dalam sistem penilaian IKPA, sisa anggaran ini justru menurunkan nilai indikator Penyerapan anggaran meskipun secara kinerja fisik sudah mencapai 100. Hal tersebut menjadi tantangan untuk bagaimana dapat mendapatkan nilai yang optimal tanpa harus menurunkan kinerja di salah satu indikator.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait capaian nilai kinerja anggaran;
2. Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan dan pengelola keuangan;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan dengan melakukan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan internal.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	161	161	Rp4.937.739.000	Rp2.339.530.593	47.38
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1824	1831	Rp69.584.684.000	Rp69.580.886.700	99.99
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	1	Rp10.000.000	Rp825.000	8.25
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp489.586.000	Rp321.590.001	65.69
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Rp76.722.324.000	Rp74.993.495.315	97.75
Total Anggaran					Rp151.744.333.000	Rp147.236.327.609	97.03

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI pada triwulan IV tahun 2025 sudah sangat baik dibuktikan dengan capaian semua indikator kinerja telah melebihi dari target akhir perjanjian kinerja tahun 2025, hal tersebut sebagai indikasi bahwa pengelolaan program kegiatan pada LLDIKTI Wilayah XI sudah baik dan berbasis kinerja. Capaian tahun 2025 yang melampaui target harus dijadikan *baseline* (standar minimal) baru. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026 wajib menetapkan target yang lebih menantang namun tetap realistis;
2. Tingkatkan kualitas pengukuran kinerja pada tahun yang akan datang dengan melakukan penajaman pada indikator kinerja utama, penguatan validitas dan reliabilitas data, dan analisis yang lebih mendalam terhadap indikator kinerja;
3. Setiap tim kerja secara berkala melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan kepada stakeholder untuk menjadi masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna layanan;
4. Tim IT dan Perencanaan segera melakukan pemutakhiran pada aplikasi eSAKIP agar sepenuhnya selaras dengan peraturan Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI yang terbaru apabila sudah ditetapkan;
5. Seluruh pegawai agar terus meningkatkan kerjasama untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal.

Banjarmasin, 14 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
 Tinggi Wilayah XI
 Muhammad Akbar



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pernyataan Telah Direviu
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarmasin, 29 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,



Drs. H. Mohdari, M.Si

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
	6. Analisis dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	☒
	7. Laporan kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	☒